

CARA

Edisi Oktober 2025

PANDANG

Inspirasi Terkini!



PERLAHAN PRABOWO LEPAS DARI BAYANG-BAYANG JOKOWI

JOKOWI BUKAN NEGARAWAN TAPI
POLITISI YANG HAUS KEKUASAAAN

JPPI: INI BUKTI NEGARA
GAGAL MENYEHATKAN RAKYAT

LOISJEANS.ID

DISCOUNT

UP TO 70%

YEAR

END

Sale

TAJUK

**BAYANG-BAYANG
KEKUASAAN, KRISIS
ENERGI, DAN GELOMBANG
MUDA: INDONESIA DI
PERSIMPANGAN GLOBAL** **5**

POLITIK

**KERACUNANN MBG CAPAI
BELASAN RIBU JPPI: INI
BUKTI NEGARA GAGAL
MENYEHATKAN RAKYAT** **12**

**JOKOWI BUKAN NEGARAWAN
TAPI POLITISI YANG HAUS
KEKUASAAN** **20**

**MEMBACA PERTEMUAN
JOKOWI DAN ABU BAKAR
BAASYIR: DARI NASEHAT
DAN SIKAP POLITIK LABIL
JOKOWI** **26**

EDUKASI

**REVITALISASI SEKOLAH
KEMENDIKDASMEN:
MENATA ULANG RUANG
BELAJAR, MENYALAKAN ASA
BANGSA** **30**

**MENYENTUH MASA DEPAN
PENDIDIKAN: INTERACTIVE
FLAT PANEL DAN
LOMPATAN DIGITALISASI
KEMENDIKDASMEN** **35**

INTERNASIONAL

**DEMO RICUH DI BERBAGAI
NEGARA, MEMANTIK
PERLAWANAN YANG SAMA
KEKECEWAAAAN TERHADAP
PEMERINTAH** **40**

**FASE PERTAMA
PERDAMAIAN, BABAK BARU
DI TENGAH PUING GAZA** **48**

TEKNOLOGI

**SATELIT N5 UNTUK
KEMANDIRIAN DAN
KEDAULATAN TEKNOLOGI
INDONESIA** **52**



POLITIK

PERLAHAN PRABOWO LEPAS DARI BAYANG-BAYANG JOKOWI **6**

Perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan reshuffle biasa. Namun reshuffle ini diduga bagian dari langkah Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi. Pencopotan Budi Arie memperkuat dugaan tersebut, sebab dia simbol dari kekuatan Jokowi di pemerintah.

EKONOMI

**KRISIS BBM DI INDONESIA:
DI BALIK KISRUH SHELL,
VIVO, BP, DAN PEMERINTAH** **58**

OPINI

**KETIKA REVITALISASI
SEKOLAH MENJADI MESIN
PERTUMBUHAN EKONOMI** **74**

CARA PANDANG

**SATU TAHUN
KEMENDIKDASMEN:
MENENUN ARAH ASTA
CITA PRESIDEN DALAM
PENDIDIKAN BERMUTU
UNTUK SEMUA** **66**

OLAHRAGA

**MIMPI YANG KEMBALI
PUPUS: KEGAGALAN
INDONESIA MENUJU PIALA
DUNIA 2026** **76**

FILM

**RANGGA DAN CINTA (2025):
REINKARNASI ROMANSA,
RELEVANSI BARU** **80**

OPINI

**KERJA NYATA
MENDIKDASMEN HADIRKAN
LAYANAN PENDIDIKAN
MERATA, INKLUSIF DAN
BERMUTU BAGI SELURUH
ANAK INDONESIA** **70**

MUSIK

**PESTAPORA 2025:
PANGGUNG MUSIK,
PANGGUNG PROTES** **82**

Sebagai warga negara yang peduli terhadap arah masa depan bangsa, saya ingin menyampaikan pandangan mengenai perjuangan Bapak Prabowo Subianto dalam memimpin dan membenahi negeri ini. Terlepas dari dinamika politik yang terus bergulir, satu hal yang tak bisa dipungkiri adalah bahwa jalan yang beliau tempuh bukanlah jalan yang mudah.

Prabowo telah menunjukkan komitmen terhadap kedaulatan, ketahanan nasional, dan perbaikan sektor strategis seperti pertahanan dan pangan. Namun, perjuangan ini belum selesai. Tantangan yang dihadapi bangsa kita—dari ketimpangan sosial hingga ancaman global—memerlukan kepemimpinan yang

kuat, konsisten, dan didukung oleh rakyatnya.

Dukungan publik bukan sekadar suara di bilik TPS, tetapi juga partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas, menyuarakan aspirasi dengan bijak, dan mengawal kebijakan yang pro-rakyat. Kita perlu mengingat bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan waktu, ketekunan, dan solidaritas.

Mari kita lihat perjuangan ini sebagai proses panjang yang memerlukan energi kolektif. Jika kita percaya pada visi yang sedang dibangun, maka sudah sepatutnya kita ikut serta, bukan hanya mengamati dari kejauhan.

Muryati
Kabupaten Bekasi



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Faozan Amar, S.Ag, M.M., Jalu Dwi Putranto S.IP

Pemimpin Umum: Zulfikar Rachman **Ombudsman:** Mahmud Marhaba (Ahli Pers Dewan Pers) **Direktur:** Michael Malik

Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab: Habibi **Wakil Pimred:** Amir Fiqi, Mujamin Jassin **Koordinator Daerah:** Nafik Muthohirin (Jawa Timur), Wiwin Alfianti (Riau), Hamid Toliu (Gorontalo), Linda Sari (Sumatera Barat) **Redaktur Pelaksana:** Amir Fiqi, Edo Soeryadi **Redaktur:** Rais Syauqi, Jirga R. Azka, Amira Izzati, Wiwin Alfianti, Zoel Rachman, Haedar Zafran **IT Support:** Zulfikar Iskandar, Dede Hidayatullah **Kreatif:** Robby Firmansyah, Hengki **Media Sosial:** Obie **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayah

Alamat Redaksi Pusat

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp: (021) 82760392 dan (021) 21383521
Email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

BAYANG-BAYANG KEKUASAAN, KRISIS ENERGI, DAN GELOMBANG MUDA: INDONESIA DI PERSIMPANGAN GLOBAL

Di tengah transisi kekuasaan yang seharusnya menandai babak baru bagi Indonesia, publik justru menyaksikan sebuah kontinum politik yang belum sepenuhnya berubah arah. Prabowo Subianto, yang kini memegang tampuk kepemimpinan, masih berjalan dalam bayang-bayang Jokowi—baik secara simbolik maupun struktural. Kabinet yang diisi oleh wajah-wajah lama, arah kebijakan yang belum menunjukkan perbedaan signifikan, serta gestur politik yang cenderung melanjutkan warisan pendahulunya, membuat publik bertanya: apakah ini benar-benar era baru, atau hanya kelanjutan dari narasi lama dengan aktor berbeda?

Ketika harapan akan perubahan mulai diuji oleh kenyataan, sektor energi menjadi titik nyala keresahan rakyat. Kisruh BBM yang merebak di berbagai daerah bukan sekadar soal antrean panjang atau kelangkaan di SPBU swasta. Ia mencerminkan ketidaksiapan sistem distribusi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan absennya komunikasi publik yang transparan. Di tengah tekanan global terhadap harga minyak dan transisi energi, Indonesia justru terjebak dalam tarik ulur antara kepentingan bisnis dan kebutuhan rakyat. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya meredam gejolak, tetapi juga menetapkan arah kebijakan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sementara itu, dari belahan dunia lain, generasi muda mengguncang lanskap politik dengan cara yang tak terduga. Gen Z, yang selama ini dianggap

apatis atau terlalu sibuk dengan dunia digital, justru menjadi motor perubahan di berbagai negara. Di Iran, mereka menuntut kebebasan dan hak perempuan. Di Prancis, mereka turun ke jalan menolak ketidakadilan ekonomi. Di Madagaskar, mereka memprotes korupsi dan ketimpangan. Fenomena ini bukan sekadar tren, melainkan sinyal bahwa generasi muda tidak lagi mau diam. Mereka menuntut ruang, transparansi, dan masa depan yang bisa mereka percaya.

Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap gelombang ini. Gen Z di tanah air pun mulai menunjukkan keresahan yang sama—meski belum seintensif di luar negeri. Ketika ruang partisipasi politik terasa sempit, ketika suara muda dianggap belum cukup matang, maka potensi konflik sosial bisa tumbuh dalam diam. Pemerintah dan masyarakat perlu membuka ruang dialog yang sejati, bukan sekadar simbolik. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pemimpin hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan mewarisi konsekuensinya.

Dalam pusaran tiga isu besar ini—politik yang belum sepenuhnya merdeka, energi yang belum stabil, dan generasi muda yang mulai bersuara—Indonesia berdiri di persimpangan. Kita bisa memilih untuk melanjutkan narasi lama dengan sedikit modifikasi, atau berani menulis ulang cerita bangsa dengan keberanian, kejujuran, dan keterlibatan semua lapisan masyarakat. Yang jelas, waktu tidak menunggu. Dan sejarah hanya berpihak pada mereka yang berani mengambil sikap.

PERLAHAN PRABOWO LEPAS DARI BAYANG-BAYANG JOKOWI

Perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bukan reshuffle biasa. Namun reshuffle ini diduga bagian dari langkah Prabowo ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi. Pencopotan Budi Arie memperkuat dugaan tersebut, sebab dia simbol dari kekuatan Jokowi di pemerintah.



Pasca kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan langkah-langkah penting sebagai upaya menjaga pemerintahannya agar tetap tetap berjalan sesuai harapan. Yakni menjaga kepercayaan publik terhadap roda kepemimpinan yang dia jalankan.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabaowo Subianto dengan melakukan perombakan kabinet. Cepat dan pasti, Presiden Prabowo dalam waktu kurang dalam satu bulan langsung melakukan dua kali *reshuffle* kabinet yakni pada tanggal 8 September 2025 dan 17 September 2025.

Reshuffle kabinet yang dilakukan pada 8 September 2025, Presiden Prabowo mengganti lima Menteri, yakni mencopot Sri Mulyani dari jabatan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu). Kemudian, Budi Gunawan yang dicopot dari posisi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Selanjutnya, Prabowo mencopot Abdul Kadir Karding dari kursi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi serta Dito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Namun, pada saat *reshuffle* tersebut, Presiden Prabowo melantik pengganti untuk tiga pos kementerian yakni Purbaya Yudhi

Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Sementara untuk kursi Menko Polkam dan Menpora masih dibiarkan kosong.

Namun, ada yang menarik dari *reshuffle* ini dengan hadirnya kementerian baru yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini merupakan pengembangan dari Badan Penyelenggara (BP) Haji yang kini naik setingkat kementerian. Prabowo melantik Mochamad Irfan Yusuf atau yang dikenal dengan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah. Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak dipercaya sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Pelantikan keduanya berlangsung bersamaan



Sri Mulyani



Budi Arie Setiadi



Dito Ariotedjo



Budi Gunawan



Abdul Kadir Karding

dengan menteri lain di Istana Negara.

Pada *reshuffle* kedua, Rabu, 17 September 2025, Prabowo mengganti satu menteri, satu wakil menteri (wamen), dan dua kepala badan. Berikut daftar menteri, wamen, dan kepala badan yang diganti Prabowo:

1. Erick Thohir dicopot dari posisinya sebagai Menteri BUMN
2. Sulaiman Umar dicopot dari jabatannya Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut)
3. Hasan Nasbi dicopot dari jabatannya Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO)
4. AM Putranto dicopot dari jabatannya Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Selanjutnya Presiden Prabowo langsung melantik menteri, wakil Menteri, kepala badan dan wakil kepala badan. Mereka adalah;

1. Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam
2. Erick Thohir menjadi Menpora

3. Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
4. Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut)
5. Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)
6. Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
7. Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan
8. Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
9. Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN
10. Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian
11. Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP.

Perombakan atau *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Presiden

Prabowo merupakan upaya dari pemerintah dalam menjaga kinerja dalam mengemban amanah rakyat.

Seperti disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahwa *reshuffle* ini dilakukan atas dasar masukan dan evaluasi yang diterima oleh Presiden Prabowo.

“Atas berbagai perkembangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” kata Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Jawab Ketidakpuasan Publik

Kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 menjadi alarm bagi pemerintah. Rakyat menilai bahwa pemerintah tidak menjalankan amanah dengan baik sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang terjadi di Masyarakat. Sepeti masalah ekonomi, keadilan hukum dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Maka *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan bisa menjawab ketidakpuasan publik terhadap kinerja dari pemerintahan Presiden

Prabowo Subianto.

Seperti disampaikan oleh Dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Dr. Tunjung Sulaksono langkah *reshuffle* yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah untuk merespon dinamika politik terkini, terutama desakan dari gerakan “17+8” yang menuntut perbaikan kinerja pemerintah dan transparansi.

Menurutnya *reshuffle* ini sebagai langkah strategis untuk menjawab ketidakpuasan publik. Melalui langkah ini setidaknya ada tiga dampak yang dapat dihasilkan;



Purbaya Yudhi Sadewa



Mukhtarudin



Ferry Juliantono

Pertama, upaya ini dapat meredakan tensi politik dan mendorong stabilitas. Dia menjelaskan bahwa *reshuffle* ini berfungsi sebagai katup pengaman untuk mengurangi ketegangan politik. Dengan mengganti menteri-menteri yang dianggap bermasalah atau menuai protes, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mendengarkan aspirasi rakyat.

“Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi sendiri menyatakan, salah satu pertimbangan perombakan kabinet adalah gejala demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu,” ujar Tunjung seperti dilansir *umy.ac.id*.

Selanjutnya, dampak kedua adalah dapat meningkatkan optimisme publik. Menurutnya, *Reshuffle* juga dilihat sebagai momentum untuk memulihkan optimisme masyarakat.

Dia mengatakan dengan wajah baru menteri-menteri di Kabinet Merah Putih ini bisa menawarkan



Mochamad Irfan Yusuf



Dahnil Anzar Simanjuntak

kebijakan pro-rakyat, berkeadilan, dan solutif akan memicu harapan baru di tengah masyarakat yang sempat kecewa dengan beberapa kebijakan sebelumnya yang dianggap tidak populis.

Ketiga, legitimasi politik kembali terbangun. Menurutnya, hal ini dapat mengembalikan kepercayaan publik yang menurun drastis belakangan ini. Peningkatan legitimasi politik ini tidak hanya penting untuk empat tahun ke depan, tetapi juga menjadi investasi politik yang berharga bagi pemerintah.

“*Reshuffle* ini mengirim pesan bahwa Presiden Prabowo serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat,” ujarnya.

Loyalis Jokowi Tersingkir

Tidak hanya untuk mengembalikan kepercayaan publik, *Reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo juga dibaca publik bagian dari langkah politik Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yakni dengan menyingkirkan menteri-menteri “titipan” Jokowi di Kabinet Merah Putih.

Sehingga *reshuffle* yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dibaca secara politik bukan *reshuffle* biasa, sebab secara mengejutkan Prabowo mencopot sejumlah orang-orang dekat Jokowi seperti Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan yang dikenal luas sebagai teknokrat berpengaruh di era Presiden Jokowi.

Selain Sri Mulyani, nama Budi Gunawan juga hilang dari kabinet. Mantan Kepala BIN yang sempat dipercaya menjadi Menko Polhukam kini tidak lagi mengisi kursi penting tersebut.

Kemudian ada Budi Arie Setiadi,

yang selama ini dikenal sebagai loyalis Jokowi dan pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Dan sejumlah nama lain yang dianggap dekat dengan Jokowi seperti Hasan Nasbi sebagai Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO) dan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Disingkirkannya para loyalis Jokowi dari panggung kekuasaan menjadi petanda bahwa Presiden Prabowo ingin menghilangkan pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di pemerintahannya. Sebab, meski Prabowo telah berkuasa, Jokowi masih ingin memastikan dirinya masih memiliki pengaruh di pemerintahan sekarang.

Menempatkan para loyalisnya di lingkaran pusat kekuasaan adalah langkah Jokowi dalam membangun benteng untuk memastikan bahwa suara dan pengaruh Jokowi tetap terjaga di setiap keputusan penting.

Namun, kini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo benteng tersebut telah runtuh, setelah satu per satu loyalis yang diharapkan menjadi tameng justru disingkirkan dari panggung kekuasaan.

Contoh paling jelas adalah pencopotan Budi Arie dari jabatan menteri itu bukan sekadar *reshuffle* biasa melainkan pukulan telak terhadap warisan politik Jokowi. Budi Arie bukan menteri sembarang, dia adalah simbol kedekatan Jokowi dengan jaringan relawan. Sosok yang sejak lama berada di garis depan mengkoordinasi dukungan.

Dengan pencopotan itu, pesan yang muncul sangat gamblang kedekatan Jokowi tidak lagi cukup untuk bertahan dalam orbit



Erick Thohir



AM Putranto

kekuasaan.

Jika loyalis sekelas itu bisa dilengserkan begitu saja, apa artinya sisa pengaruh Jokowi di lingkaran inti kekuasaan. Hilangnya loyalis bukan sekadar soal Menteri, ia membawa pesan simbolik yang jauh lebih besar, bahwa suara Jokowi tidak lagi diperhitungkan sebagai faktor penentu.

Seperti diungkapkan oleh mantan sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu bahwa pencopotan Budi Arie merupakan dari langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menjaga jarak dengan Jokowi.

Apalagi, Budi Arie terjerat isu negatif, terutama berkaitan dengan skandal judi *online* (judol) di lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemkominfo), kini Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi).

“Sekarang kita masuk ke Budi



Hasan Nasbi



Sulaiman Umar

Arie, Menteri Koperasi. Sudah saatnya lah,” kata Said Didu, dikutip dari tayangan podcast yang diunggah di kanal YouTube Hersubeno Point, Selasa, 9 September 2025.

Keputusan Prabowo mencopot Budi Arie menjadi tanda bahwa Jokowi tidak lagi memiliki pengaruh untuk mempertahankan para loyalisnya di panggung kekuasaan. Prabowo mempertegas bahwa tidak ada bayang-bayang Jokowi di pemerintahan yang dia pimpin.

“Nah, ini Pak Prabowo ingin menunjukkan, ‘Budi Arie walaupun kau tangan kanannya dan mungkin dompetnya Joko Widodo, apa boleh buat? Aku harus hentikan Anda karena Anda banyak sekali isu negatif tentang Anda,’” tambahnya.

“Jadi, itu simbol Pak Prabowo menyatakan, ‘Pak Jokowi, orang kepercayaan Anda yang sangat loyal kepada Anda itu, apa boleh buat saya harus buang,’” ujarnya.

Menurut pengamat politik lulusan

Teknik Industri di Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, Budi Arie tidak cocok masuk dalam barisan Kabinet Merah Putih. Sebab, pemerintah sekarang ini melakukan perubahan dan perbaikan.

“Karena memang tidak cocok dengan karakter yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo untuk melakukan perubahan dan perbaikan ke depan,”katanya.

Sementara pengamat politik, Agus Widjajanto menilai perombakan kabinet ini sebagai akibat dari dinamika yang terjadi di awal pemerintahan. Di mana saat Presiden Prabowo harus mengakomodir berbagai kepentingan, beberapa menteri justru menimbulkan keresahan dan tidak memenuhi harapan publik sehingga terjadilah perombakan kabinet.

“Mungkin Presiden Prabowo sedang mencari formasi kabinet yang tepat, di mana awal dibentuk Presiden harus mengakomodir berbagai pihak

yang berkepentingan, yang tentu jauh dari keinginan Prabowo sendiri,” kata Agus dalam keterangannya Senin 22 September 2025.

Soal anggapan bahwa perombakan kabinet adalah upaya bersih-berih Geng Solo, dia menjawab bahwa ini hal itu bisa terjadi. Sebab dalam dunia politik tidak ada lawan dan musuh yang abadi. Politik adalah berbicara tentang kepentingan.

“Yang pasti dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan politik yang berkuasa,” tuturnya.

Bersihkan Menteri yang Bermasalah

Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo tidak hanya menyingkirkan orang dekat dan loyalis Jokowi. Namun, *reshuffle* ini juga ingin membersihkan Kabinet Merah Putih dari para menteri yang bermasalah.

Hal ini disampaikan oleh

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan bahwa pencopotan sejumlah menteri cukup mengejutkan, sebab dilakukan secara senyap.

Menurutnya, Presiden Prabowo membaca harapan publik. Sehingga nama-nama menteri yang terkena pencopotan adalah sederet nama yang kerap didesak oleh publik untuk mundur.

Dia mencontohkan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang sejauh ini banyak didesak oleh publik untuk diganti, karena kinerjanya dinilai buruk.

“Penerimaan pajak negara gagal mencapai target, dan kemudian kurangnya kreativitas dalam memaksimalkan penerimaan negara, dan salah satu penyebab demonstrasi ricuh di DPR beberapa waktu lalu,” kata Iwan melalui pesan tertulis yang dikutip Liputan6.com pada Selasa, 9 September 2025.

Nama berikutnya adalah Menteri Koperasi Budi Arie yang sudah sering dan banyak sekali mendapat desakan untuk mundur dan diganti oleh Presiden Prabowo. Apalagi, lanjut Iwan, Budi Arie beberapa kali disebut dalam kasus judi *online* saat menjabat sebagai Menteri Komdigi.

“Saya juga sering berpendapat bahwa Budi Arie ini sebaiknya memang diganti oleh Presiden, karena bisa menjadi sumber masalah. Apalagi dia itu diberikan tanggung jawab untuk menangani langsung Koperasi Merah Putih yang akan mengelola uang negara ratusan triliun rupiah. Budi Arie dipertanyakan oleh publik terkait integritasnya,” catat dia.

Berikutnya, lanjut Iwan, Menteri Abdul Kadir Karding, Iwan menyoroti yang bersangkutan sering



Djamari Chaniago



Rohmat Marzuki



Afriansyah Noor



Farida Farichah



Angga Raka



Muhammad Qodari



Nanik S Deyang



Sony Sanjata



Ahmad Dofiri



Sarah Saqida

melakukan blunder dan menjadi polemik dan perhatian publik, seperti pernyataannya yang kontroversial menanggapi #kaburajadulu.

“Bahkan paling baru adalah bermain domino dengan eks tersangka pembalakan liar. Kinerjanya juga tidak bagus-bagus amat,” kata Iwan.

Hak Prerogatif Presiden

Reshuffle kabinet yang menyingkirkan orang dekat dan loyalisnya, Presiden ke-7 RI, Joko

Widodo mengatakan bahwa soal *reshuffle* merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

“Kabinet dan *reshuffle* menteri itu adalah prerogatif presiden. Itu kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto,” katanya kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat, 12 September 2025.

Mantan wali kota Solo dan gubernur Jakarta itu enggan berkomentar yang menyebut *reshuffle* tersebut sebagai upaya menyingkirkan orang-orangnya di

kabinet Merah Putih. Dia Kembali tegas mengatakan ini sepenuhnya kewenangan dari Presiden Prabowo.

“Itu kewenangan presiden, hak presiden. Saya tidak bisa memberikan komentar. Itu kan prerogatif presiden,” tegasnya.

Selanjutnya, dia tegas mengatakan bahwa soal pergantian atau perombakan di dalam kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo dirinya tidak pernah ikut campur. Dengan nada santai dia mengatakan bahwa dirinya di Solo tidak mungkin ikut campur persoalan *reshuffle*.

“*Ndak ndak ndak*. Itu prerogatif presiden. Saya tidak ingin ikut campur, saya di Solo,” ucap Jokowi.

Sementara Istana membantah tuduhan bahwa *reshuffle* kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo merupakan upaya menyingkirkan orang-orang Jokowi di Kabinet Merah Putih.

Hal itu tegas disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi bahwa perombakan kabinet murni dilakukan atas dasar evaluasi dan pertimbangan Presiden demi kepentingan bangsa dan negara.

“Enggak ada (upaya bersih-bersih), enggak ada,” tegas Prasetyo kepada wartawan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah membedakan latar belakang para pejabat yang duduk di kabinet. Prabowo katanya dalam memilih pembantunya berdasarkan kemampuan. Dan mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia.

“Enggak ada, orang siapa-orang siapa, semua adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia,” katanya.



KERACUNANN MBG CAPAI BELASAN RIBU

JPPI: INI BUKTI NEGARA GAGAL MENYEHATKAN RAKYAT

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, Pada September memaparkan data kasus keracunan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan laporan resmi per 30 September 2025, total korban mencapai 6.457 orang.

Pemaparan data tersebut

disampaikan Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 1 Oktober 2025. Ia menjelaskan, BGN membagi sebaran kasus dalam tiga wilayah besar: Wilayah I (Sumatra), Wilayah II (Jawa), dan Wilayah III (Indonesia Timur).

“Kalau dilihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di Wilayah I itu tercatat ada yang mengalami

gangguan pencernaan sebanyak 1.307 orang. Wilayah II ini sudah bertambah. Kemudian Wilayah III ada 1.003. Kita catat tanggal per tanggal kejadian ini,” ujar Dadan dikutip dari siaran KompasTV.

Dadan menyebutkan, Wilayah II (Pulau Jawa) menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yakni 46 kasus dengan total 4.147 korban. Sementara Wilayah I (Sumatra) mencatat 9 kasus



Dadan Hidayana (Tengah)

dengan 1.307 korban, dan Wilayah III (Indonesia Timur) terdapat 17 kasus dengan 1.003 korban.

Berikut rincian data kasus keracunan MBG berdasarkan tanggal dan lokasi kejadian yang dilaporkan oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG):

- **13 Januari 2025:** Nunukan Selatan, Kalimantan Utara (90 korban)
- **14 Januari:** Indramayu, Jawa Barat (6 korban)
- **16 Januari:** Sukoharjo, Jawa Tengah (40 korban)
- **24 Januari:** Bulukumba, Sulawesi Selatan (4 korban)
- **27 Januari:** Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan (7 korban)
- **18–19 Februari:** Empat Lawang, Sumsel (8 korban) dan Pandeglang, Jawa Barat (480 korban)
- **April 2025:** Serangkaian kasus di Batang, Cianjur, Karanganyar, Sleman, Bombana, Bandung, dan Tasikmalaya, dengan total lebih dari 670 korban.
- **Mei–Agustus 2025:** Kasus

meningkat tajam di beberapa daerah seperti PALI (172 korban), Bogor (223 korban), Bengkulu (467 korban), Sukabumi (503 korban), dan Bandung (320 korban).

- **September 2025:** Gelombang baru kasus muncul di berbagai provinsi, termasuk Sumbawa (106 dan 120 korban), Banggai Kepulauan (338 korban), Bandung Barat (722 korban gabungan dari tiga lokasi), serta Kebumen (101 korban).

Selain di Pulau Jawa, kasus juga muncul di sejumlah daerah di luar Jawa, seperti Kupang (140 korban), Tambolaka (65 korban), Manokwari (6 korban), Lombok Tengah (9 korban), dan Mamuju (27 korban).

Dadan menjelaskan, BGN saat ini tengah melakukan penelusuran sumber pencemaran dan standar pengolahan makanan pada tiap SPPG. “Kita sudah menugaskan tim laboratorium untuk meneliti kandungan bahan makanan dan proses distribusi di lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil

pemeriksaan sementara menunjukkan adanya indikasi pencemaran silang pada tahap penyimpanan dan distribusi di sejumlah lokasi, namun investigasi mendalam masih berlangsung.

Sementara itu, Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk meninjau ulang sistem keamanan pangan dalam program MBG, terutama terkait pengawasan penyedia jasa katering dan dapur umum.

Program Makanan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang menasar pelajar dan anak usia sekolah, dengan tujuan meningkatkan gizi dan menurunkan angka stunting. Namun, gelombang kasus keracunan yang terus meluas sejak awal 2025 kini menjadi sorotan publik.

BGN berjanji akan menyampaikan laporan lengkap hasil investigasi dan langkah korektif pada rapat lanjutan dengan Komisi IX DPR RI.

Data JPPI Per-Oktober, Korban Capai 11 Ribu

Sementara itu, dalam rentang waktu hanya sebulan, total korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) capai 11.566 hingga 12 Oktober 2025. Bertambah 5.000 kasus hanya dalam kurun waktu sebulan. Data ini disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama para relawan yang terus melakukan pemantauan dan menerima laporan dari berbagai daerah.

Dalam periode 6–12 Oktober 2025, JPPI mencatat ada 1.084 korban baru keracunan MBG. Dengan penambahan ini, total korban sejak awal tahun mencapai 11.566 anak.

“Setiap pecan, ribuan anak

tumbang karena MBG, tapi negara justru membiarkan dapur-dapur tetap beroperasi. Ini bukan sekadar kelalaian, ini adalah krisis tanggung jawab publik,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangan pers yang dirilis pada Senin, 13 Oktober 2025.

Pada pekan ini, sambungnya, dua provinsi baru terpapar kasus keracunan yakni Kalimantan Selatan (Kab. Banjar) dan Gorontalo (Kota Gorontalo), yang sebelumnya belum pernah dilaporkan. Ini menunjukkan penyebaran kasus yang semakin luas.

Ubaid juga merinci provinsi dengan korban terbanyak pekan ini, yakni:

- Nusa Tenggara Timur: 384 korban (Timor Tengah Selatan)
- Jawa Tengah: 347 korban (Karanganyar, Klaten, Salatiga)
- Kalimantan Selatan: 130 korban (Kab. Banjar).

Jika dihitung sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, Lima Provinsi dengan korban kracunan MBG tertinggi adalah

- Jawa Barat: 4.125 korban
- Jawa Tengah: 1.666 korban
- DIY: 1.053 korban
- Jawa Timur: 950 korban
- Nusa Tenggara Timur: 800 korban

JPPI Minta Seluruh Dapur MBG Ditutup

Melihat kasus keracunan yang terus terjadi, JPPI memberikan rekomendasi berikut:

Perkuat Transparansi, Akuntabilitas dan Perlibatan Publik

Draf Peraturan Presiden terkait MBG hingga kini masih tertutup rapat. Publik dan organisasi masyarakat sipil sama sekali belum tahu isi draf Perpres ini. Kita sudah sangat kecolongan.



Anggaran triliunan bisa ngacir tanpa dasar hukum yang jelas. Ini sangat berbahaya jika terus dibiarkan.

Bersihkan Konflik Kepentingan di Dapur MBG

“Konflik kepentingan merajalela di semua lini. Bagaimana mungkin Polri menindak dapur yang mereka kelola sendiri? DPR mengawasi proyek yang dikerjakan oleh timnya sendiri?”

Bahkan dapur-dapur di bawah BGN terafiliasi dengan TNI. Program publik tak bisa dikelola seperti bisnis keluarga kekuasaan.

Utamakan Kualitas, Bukan Kuantitas

Obsesif mengejar target jutaan penerima justru mengorbankan mutu gizi dan keselamatan penerima. Program gizi seharusnya menyelamatkan, bukan mencelakakan, kata Ubaid.

JPPI mendukung usulan Kemendikdasmen untuk melibatkan kantin sekolah dalam penyediaan paket MBG. Ini jauh lebih transparan,

efisien, dan memperkuat ekonomi lokal dan sektor pendidikan.

Tutup Semua Dapur MBG

JPPI mendesak penghentian total sementara semua dapur MBG hingga ada audit independen dan aturan hukum yang jelas. Menjalankan program dengan ribuan korban setiap minggu adalah bentuk kelalaian sistemik yang mendekati kejahatan kebijakan.

“Ribuan korban setiap pekan bukan sekadar angka statistik, itu adalah nyawa anak-anak bangsa yang mestinya dilindungi, bukan dijadikan eksperimen proyek politik. Setiap sendok nasi dari MBG yang berujung keracunan adalah bukti nyata gagalnya negara menyehatkan rakyatnya,” tutup Ubaid.

DPR Bersuara, Minta BGN Akui Kekurangan

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), merilis, per 5 Oktober 2025 tercatat 119 kejadian dengan 11.660

kasus keracunan MBG di 25 provinsi dan 88 kabupaten/kota.

Sejumlah sekolah, orang tua, dan masyarakat di beberapa daerah pun mulai menolak program yang sudah menghabiskan anggaran negara Rp13 triliun per 8 September 2025 ini. Dari semua kejadian ini sudah semestinya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, dari mulai perencanaan, anggaran, hingga pelaksanaannya.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan, munculnya keracunan massal dalam program MBG menunjukkan ada metode ataupun pendekatan yang keliru dalam pelaksanaan program tersebut. Badan Gizi Nasional (BGN), katanya, tidak perlu malu mengakui adanya kekurangan itu.

“Pemerintah haru mencari cara yang paling tepat. Apakah cara sekarag sudah tepat. Harus berani ada evaluasi. Jangan takut ada evaluasi dan kontrol. Jangan gerah kalau ada kritik,” papar Zulfikar kepada Aktual.com, Jakarta, Sabtu (10/10/2025).

Menurutnya, program MBG bertujuan mulia karena itu pengelolanya harus memiliki semangat yang sama.

“Laksanakan sungguh-sungguh, niatnya dalam rangka masyarakat



Ahmad Sufmi Dasco



Putih Sari

hidup berkualitas. Jangan sampai niatnya proyek dan rente,” ujar Zulfikar.

Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Gerindra Putih Sari pun mendesak hal sama. BGN, katanya, tidak perlu takut untuk melakukan evaluasi secara total tata kelola program MBG.

“Program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan,” kata Putih dalam keterangan persnya.

BGN, katanya, harus mampu mengevaluasi secara detail setiap teknis penyelenggaraan dari hulu ke hilir serta meningkatkan standar keamanan makanan. Evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan agar manfaat besar yang dibawa program tidak tertutupi oleh catatan buruk pengelolaan di lapangan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Ahmad Sufmi Dasco meminta aparat penegak hukum (APH) turun

melakukan investigasi terkait kasus keracunan massal MBG yang marak terjadi selama beberapa bulan terakhir.

“Kita minta APH ikut melakukan investigasi lapangan. Ini untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan akibat kelalaian, mana yang memang di duga ada unsur kesengajaan,” kata Dasco September lalu.

Dasco menegaskan bahwa lembaganya sangat prihatin terhadap apa yang terjadi terhadap anak-anak bangsa. Dimana program tersebut harusnya menyehatkan anak-anak, sekarang malah menjadi penyakit bagi mereka yang mengkonsumsi makanan dari program Prabowo tersebut.

“Kita juga meminta pada BGN, ayolah, lakukan evaluasi cepat. Semua yang dianggap perlu untuk evaluasi, lakukan. Sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat dan meminta evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa kasus berulang seperti ini menunjukkan lemahnya



Zulfikar Arse Sadikin



Cucun Ahmad Syamsurijal

penerapan SOP di lapangan.

“Kalau SOP dilanggar, higien dan sanitasi tidak dijaga dengan baik, apalagi bahan baku tidak disiapkan sesuai standar, maka kejadian seperti ini akan terus berulang,” kata Cucun.

Ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar memperketat pengawasan dan menutup sementara dapur penyedia MBG yang terindikasi melanggar aturan. Menurutnya, sebelum kembali beroperasi, setiap SPPG harus menjalani proses verifikasi dan menandatangani fakta integritas baru.

“Kalau sudah kejadian seperti ini, BGN harus tutup dulu dapur yang bersangkutan. Perbaiki dulu, baru boleh buka setelah diverifikasi. Kalau tidak bisa menjalankan SOP dengan baik, ganti saja dengan yang baru,” tegasnya.

Lebih lanjut, politisi senior PKB itu menilai, perlu adanya sistem digital untuk memantau proses pengadaan dan pengolahan bahan makanan. Ia mengusulkan agar BGN membangun aplikasi yang dapat memantau bahan baku yang akan digunakan setiap SPPG, termasuk durasi penyimpanan bahan basah seperti daging dan ikan.

“Bisa jadi makanan sudah terpapar bakteri karena terlalu lama disimpan. Kalau ada aplikasi, bahan yang mau dimasak bisa diunggah dan dicek dulu,” ujarnya.

Cucun juga menyarankan agar pelaksana program MBG belajar dari pondok pesantren. Disana menurut Cucun, selama puluhan tahun mampu mengelola makanan untuk ribuan santri tanpa sering terjadi kasus keracunan.

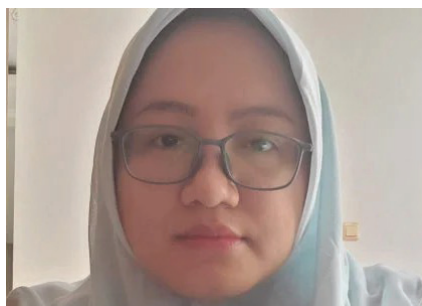
Peneliti: BGN Abai Terhadap Quality Control dan Food Safety

Peneliti Center of Human dan

Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Diah Hesti Kusumawardani menyampaikan, keracunan makanan di program MBG bukan sekadar kesalahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau dari analisa sistem, ikan busuk dari kepalanya. Kesalahan apapun itu awalnya ya datang dari pusatnya, dari pimpinannya. Seharusnya BGN secara tegas sudah menyiapkan SOP, quality control, dan food safety,” kata Diah Hesti, kepada Aktual.com, Jakarta, Sabtu (10/10/2025).

Dari kasus keracunan massal, ujarnya, terlihat BGN mengabaikan quality control dan food safety. Hal ini, katanya, tidak baik untuk kelangsungan MBG dalam jangka panjang. “Walau misalnya, dari 3 ribu porsi yang dimasak itu korban keracunan tidak keseluruhannya, tetap harus ada evaluasi menyeluruh



Diah Hesti Kusumawardani



Diah Saminarsih

karena ini berkaitan dengan manusia, apalagi anak-anak,” papar Diah Hesti.

Kejar Target Korbankan Siswa

Founder dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih, menyampaikan, insiden keracunan merupakan akibat dari ketergesaan pengelolaan program yang ingin mengejar target capaian penerima manfaat, jumlah dapur, serapan anggaran, dan mengesampingkan aspek gizi dan keamanan pangan.

“Kami meyakini, kasus keracunan MBG yang terjadi di berbagai daerah diakibatkan oleh belum siapnya infrastruktur tata kelola kelembagaan dan monitoring-evaluasi,” papar Diah.

Pihaknya pun meminta dilakukan evaluasi menyeluruh program MBG yang mencakup tata kelola organisasi, penentuan menu kualitas makanan yang disalurkan, serta besaran alokasi dan akuntabilitas anggaran.

Diah juga menyebutkan, sangat minimnya pelibatan pemerintah daerah dan pihak sekolah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program turut berkontribusi pada maraknya kasus keracunan MBG di daerah.

Pihaknya pun mengusulkan desain program MBG yang targeted, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan dan pendidikan, menimbang keterbatasan ruang fiskal dan besarnya anggaran MBG mendisrupsi agenda pembangunan prioritas lainnya.

Eliza Mardian, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyampaikan, persoalan

utama MBG adalah pada model dapur yang digunakan Pemerintah yang menggunakan sistem sentralistik.

Ia pun mengusulkan model dapur yang bisa menjadi solusi bersama di tengah ambisi pemerintah untuk ekspansi penerima manfaat hingga 82,9 juta siswa, dan menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Pertama, dapur UMKM. Dapur yang dikelola UMKM setempat. Dapur ini bisa menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja memperkuat rantai pasok makan lokal. Dapur ini juga bisa menerima hasil panen atau produk pangan lokal masyarakat setempat,” paparnya.

Kedua, dapur sekolah. Eliza menjelaskan, dapur yang berada di sekolah akan menekan biaya distribusi dan menciptakan kualitas yang lebih ketat. Dapur sekolah juga, katanya, bisa perkuat hubungan sekolah, orang tua dan siswa.

“Ketiga, dapur koperasi pedagang pasar. Dapur ini akan berintegrasi dengan para pedagang pasar yang menjadi anggota koperasi. Dari segi pengadaan bahan baku lebih murah sehingga menekan biaya produksi,” ucapnya.

Model terakhir, adalah dapur yang dikelola oleh lembaga masyarakat atau lembaga sosial (NGO). Dengan model dapur ini, membuka ruang



partisipasi masyarakat sipil untuk terlibat. “Pemerintah perlu reorientasi kebijakan. Indikator keberhasilan MBG bukan hanya seberapa cepat atau seberapa banyak penerima manfaat, tapi seberapa kualitas program ini,” ujarnya.

Diyah Hesti mengatakan, pelaksanaan MBG selama ini mengabaikan modal sosial. SPPG mestinya tidak hanya dari instansi pemerintah, masyarakat, sekolah, dan orang tua siswa juga bisa berperan dalam pengelolaan dapur.

“Di Jepang misalnya, makan bergizi disediakan sekolah. Sehingga orang tua dan masyarakat bisa mengawasi,” ungkapnya.

Zulfikar menyampaikan, semestinya ada semangat desentralisasi dalam program prioritas seperti MBG. Pemerintah daerah perlu dilibatkan dari proses hingga pelaksanaannya. “Desentralisasi yang sesuai potensi masing-masing daerah. Kan bisa riset kemudian bisa diputuskan yang

paling sesuai dengan karakteristik daerahnya,” katanya.

KPK Turun Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sedang dikaji kedeputian pencegahan dan monitoring.

Proses ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini KPK sedang melakukan kajian,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan yang dikutip Rabu, 15 Oktober.

Budi tidak memerinci sejak kapan kajian dilaksanakan. Dia hanya bilang proses ini akan berujung pada penerbitan rekomendasi.

“Mengingat dalam konteks program MBG ini kan ada beberapa pihak yang dilibatkan sehingga dari kajian itu KPK akan memberikan rekomendasi dan harapannya adalah untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.



Eliza Mardian



Budi Prasetyo

Berbagai rekomendasi ini, sambung Budi, juga diharapkan membuat pelaksanaan MBG jauh dari praktik lancung. “Sehingga tata kelola, mekanisme, prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien,” tegas dia.

“Dan hasilnya pun, ketika didistribusikan, makanan-makanan itu kepada anak-anak kita itu juga mempunyai kualitas yang baik,” imbuh Budi.

Adapun kajian ini disebutkan dilakukan dengan berbagai metodologi. Di antaranya, kata Budi, dengan melakukan pengambilan contoh atau sampling hingga menemukan fakta di lapangan lewat observasi.

Wawancara juga bisa saja dilakukan komisi antirasuah terhadap sejumlah pihak untuk mengetahui kendala di lapangan. Sebab, pelaksanaan MBG ini melibatkan sejumlah stakeholder atau pemangku kepentingan.

“Sehingga nantinya kita bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang lengkap untuk kemudian memberikan rekomendasi yang konkret dalam upaya mendukung keberbaikan program MBG Ini,” pungkas Budi.

Pertolongan Pertama MBG

Gejala Keracunan Makanan bisa muncul beberapa jam hingga hari



Tri Wibawa

setelah mengonsumsi makanan tersebut seperti disampaikan Guru Besar Mikrobiologi Klinik FK-KMK UGM, Prof. dr. Tri Wibawa, Ph.D., Sp.MK(K).

Tri mengatakan sebagian besar kasus keracunan makanan bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus. Namun, ada kondisi tertentu dapat berakibat serius jika tidak segera ditangani.

Bila menemui siswa yang mengalami keracunan usai santap MBG Tri menekankan pentingnya penanganan pertama yang cepat dan tepat ketika siswa menunjukkan gejala keracunan makanan. Hal yang penting adalah penderita mesti

banyak minum air putih atau cairan dengan suplemen elektrolit.

“Muntah dan diare dapat menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Langkah paling penting dalam pertolongan pertama adalah mengganti cairan dan elektrolit yang hilang untuk mencegah dehidrasi,” tegas Tri mengutip laman UGM, Rabu, 15 Oktober 2025.

Jika muntah terus terus terjadi, coba minum sedikit demi sedikit.

“Dan jika kondisi memburuk, segera cari pertolongan dari petugas kesehatan,” tambah Tri.

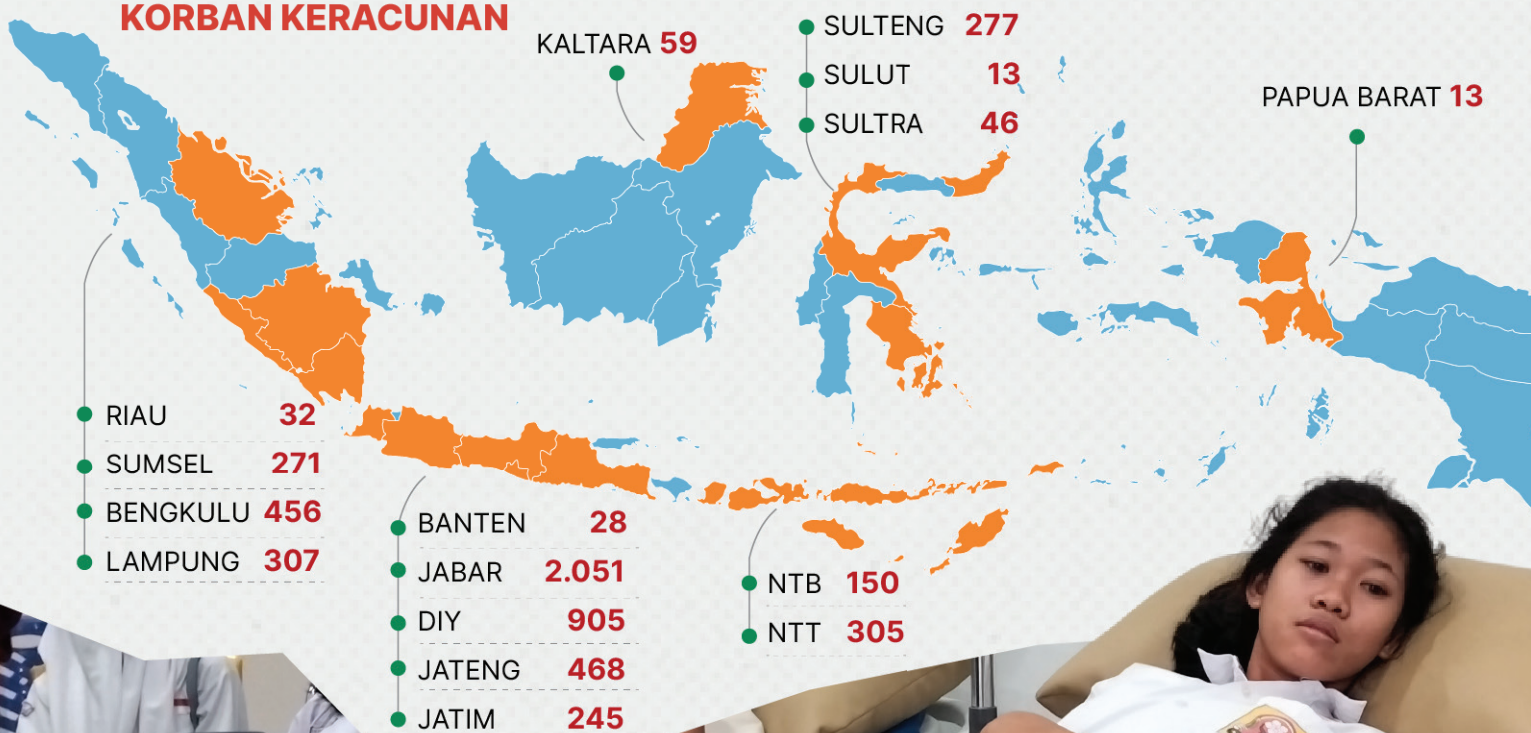
Usai keracunan makanan, seseorang bisa mengalami demam. Itu merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Peningkatan suhu tubuh membantu memperlambat pertumbuhan bakteri serta mengoptimalkan kerja sistem imun.

“Demam membantu mengendalikan infeksi dengan memberi tekanan panas pada patogen dan meningkatkan efektivitas sistem kekebalan tubuh,” paparnya.

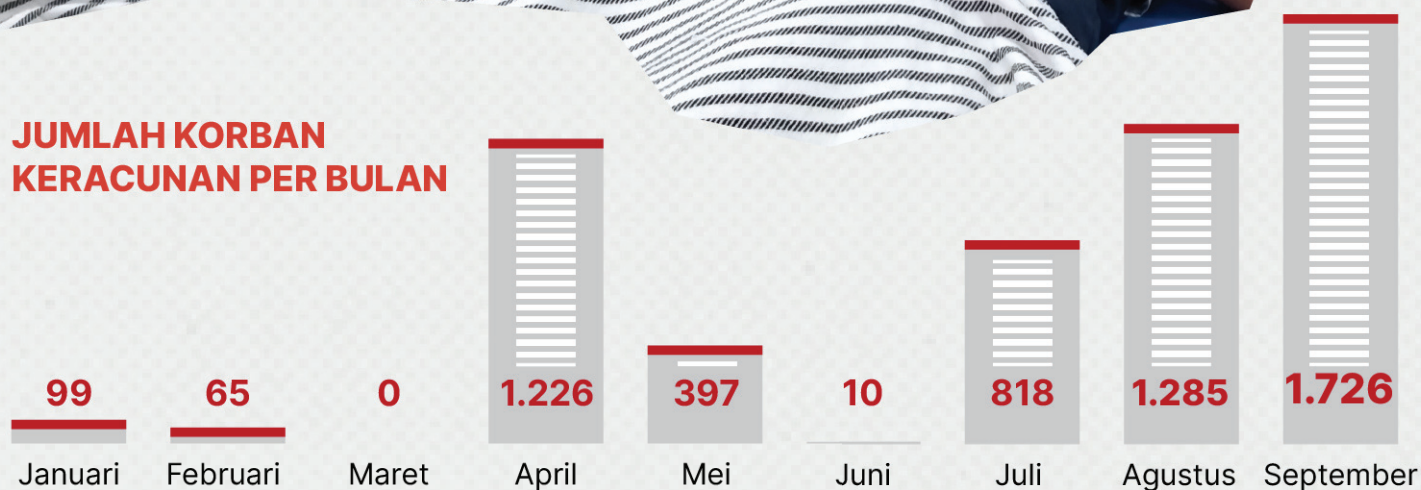


5.626 ORANG KERACUNAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PERIODE 17 JANUARI -18 SEPTEMBER 2025

SEBARAN KORBAN KERACUNAN



JUMLAH KORBAN KERACUNAN PER BULAN



JOKOWI BUKAN NEGARAWAN TAPI POLITISI YANG HAUS KEKUASAAN

Pasca purna tugas sebagai Presiden RI, Jokowi masih sibuk dengan urusan politik praktis. Bahkan, meskipun Pilpres 2029 masih jauh Jokowi sudah memberikan arahan kepada relawannya mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

Janji tinggal janji. Ungkapan tersebut bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dianggap hal yang wajar. Sebab, publik telah paham bahwa mantan Gubernur Jakarta ini dikenal kerap tidak sejalan antara ucapan dan perbuatan.

Semasa masih menjabat sebagai Presiden Jokowi dengan bangganya mengatakan bahwa anak-anaknya tidak tertarik dengan dunia politik. Namun faktanya anak-anak bahkan menantunya dipersiapkan untuk menjabat sebagai kepala daerah.

Puncak dari politik dinasti yang dibangun Jokowi adalah mempersiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu. Bahkan, untuk mencapai posisi tersebut publik menduga terjadi permainan di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengubah persyaratan usia untuk presiden dan wakil presiden.



Permainan di MK pun berhasil sehingga Gibran mulus mendapatkan tiket untuk bertarung di Pilpres mendampingi Prabowo Subianto. Dan alhasil pasangan Prabowo-Gibran menang mutlak mengalahkan pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahmud pada Pilpres 2024.

Publik pun menduga bahwa kemenangan mutlak yang diraih oleh Prabowo-Gibran tidak terlepas dari peran Jokowi yang pada saat itu menjabat Presiden RI dengan menggunakan fasilitas-fasilitas negara.

Dugaan publik pun sangat kuat, sebab Jokowi secara terang-terangan menyampaikan bahwa dirinya tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2024. Dia mengklaim langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

“Saya harus cawe-cawe,” kata Presiden ketika berbincang-bincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.

Namun sikap tidak netral itu pun dibaca oleh publik bahwa Jokowi bisa menyalagunakan kekuasaannya



Pangsi Syarwi Chaniago

untuk memenangkan Gibran pada Pilpres 2024.

Seperti diungkapkan oleh analis politik Pangsi Syarwi Chaniago bahwa Jokowi tidak lazim menyampaikan melontarkan pernyataan tersebut dalam negara demokratis, kendati dibungkus alasan ‘demi bangsa dan negara’. Menurut Pangsi campur tangan Jokowi dalam menentukan penerusnya berdampak pada netralitas institusi.

Dia menyebut cawe-cawe Jokowi ini membuat garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya menjadi kabur.

“Indonesia masih membutuhkan kekuasaan Presiden dan negara yang netral, sebab sistem Pemilu kita masih lemah, yang bisa berpotensi tergelincir pada Pemilu partisan. Terus terang kita ingin trayek pemilu yang adil, terbuka dan demokratis,”katanya.

Instruksikan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode

Janji Jokowi yang akan pensiun dan istirahat di Solo pasca purna tugas sebagai Presiden ke-7 RI tinggal janji. Pasalnya, Jokowi selalu melakukan manuver-manuver politik. Misalnya pada Pilkada serentak 2024 dia aktif melakukan kampanye selama pelaksanaan Pilkada. Beberapa kali dia muncul di acara kampanye,



seperti Luthfi-Yasin di Jawa Tengah dan Ridwan Kamil di Jakarta.

Manuver yang terbaru adalah Jokowi memberikan intruksi kepada relawanya untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran dua periode.

Seperti disampaikan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay bahwa dirinya mendapatkan mandat amanat dari Jokowi untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode.

Pernyataan itu disampaikan Frans dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 di Kompleks Museum Joang ‘45, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

“Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak

Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.

Dan Jokowi pun membenarkan arahan tersebut. Menurutnya arahan tersebut telah lama disampaikan.

“Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu (dukung Prabowo-Gibran dua periode),” kata Jokowi saat ditanya mengenai pernyataan relawan Bara JP mendapat arahan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, Jumat 19 September 2025.

Jokowi pun mengatakan di dalam negara demokrasi menyampaikan arahan tersebut adalah hal yang wajar. Dan dia pun tidak masalah jika ada pihak yang tidak suka dengan arahan yang dia sampaikan kepada relawannya.

“Kalau ada yang *nggak* setuju itu ya *nggak* apa-apa. Namanya demokrasi,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan arahan itu disampaikan dalam pertemuan dengan relawan. Ia mengatakan arahan itu mencuat karena ada

relawan yang mempertanyakan soal dukungan untuk Prabowo-Gibran. “Itu kan saya sampaikan itu sejak awal ke dalam pertemuan. Relawan ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk 2 periode,” ujarnya.

Arahan Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran pun direspon dingin oleh sejumlah politisi tanah air.

Seperti diungkapkan oleh Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 masih jauh.

“Pemilu masih jauh,” kata Puan singkat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

Puan mengatakan saat ini bukan waktunya untuk bicara soal itu. Dan dia mengajak kepada semua pihak untuk bekerja sama membangun bangsa dan negara bersama-sama.

Ia mengingatkan semua pihak tentang pentingnya bergotong royong, “Jadi yang penting bagaimana



Puan Maharani

kita bergotong-royong,” tutur Puan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI yang juga legislator Partai Gerindra, Titiek Soeharto. Menurutnya terlalu cepat membahas soal tersebut.

Dia mengatakan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan satu tahun. Lebih baik fokus bekerja dari pada sibuk bicara dua periode.

“Ah, itu nanti aja selesai dulu, ini baru setahun,” kata Titiek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025.



Titiek Soeharto

Selanjutnya dia kembali tegas mengatakan bahwa biarkan Presiden Prabowo membuktikan bisa bekerja untuk mensejahterakan rakyatnya. Dia pun menilai Prabowo kemungkinan juga belum memikirkan Pemilu 2029.

“*Selesai* 5 tahun dulu, kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa menyejahterakan bangsa ini,” ungkap Titiek.

Pernyataan Titiek sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo sebelumnya. Dalam acara Kongres IV PP Tidar pada Sabtu, 17 Mei 2025 Prabowo menyatakan dirinya tidak akan maju dua periode jika kepemimpinannya dinilai gagal.

Prabowo pun secara tegas meminta kepada seluruh kader Partai Gerindra tidak membahas soal dua periode pemerintahannya. Ia mengaku belum setahun menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Karenanya, Prabowo meminta dukungan agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Niat itu (dua periode), silakan disimpan di dalam hati. Tapi saya sudah katakan nanti yang menentukan apakah Prabowo dua periode atau tidak adalah Tuhan Yang Maha Kuasa dan Prabowo sendiri,”



Kaesang Pangarep dan Willem Frans Ansanay

ujar Prabowo.

“Kalau saya menilai, kalau saya menilai, saya menilai, tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai presiden RI. Saya akan menilai,” sambungnya.

Prabowo meminta pendukungnya tak mendesaknya untuk maju pada Pilpres 2029. Sebab, Prabowo akan menilai terlebih dahulu berhasil atau tidaknya ia selama menjadi Presiden periode 2024-2029.

“Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya maju lagi,”katanya.

Untuk Keberlanjutan

Dukungan Prabowo-Gibran 2 periode dianggap merupakan keberlanjutan dari program-program pemerintahan Jokowi yang belum tuntas.

Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik meyakini bahwa perintah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) agar relawan mendukung Prabowo-Gibran 2 periode merupakan upaya menyongsong Indonesia maju tahun 2045.

“Jadi tujuannya bahwa memang sangat penting ini dilanjutkan untuk visi Indonesia maju 2045, regenerasi juga penting di sini,” ujar Freddy,



Freddy Damanik



Ade Armando

Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Selanjutnya dia menyampaikan bahwa dukungan para pendukung Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran sebenarnya sudah dilakukan sejak Pilpres 2024.

“Ini komitmen untuk menjaga kesinambungan pemerintahan agar program pembangunan berjalan lancar. Salah satu tema kampanye waktu itu adalah keberlanjutan. Projo dan sejumlah organ relawan sebelumnya sudah menginisiasi Musyawarah Rakyat untuk mencari pelanjut Jokowi. Pak Prabowo lah pelanjut Pak Jokowi,” jelasnya.

Dia memaparkan bahwa dukungan Prabowo-Gibran dua periode adalah untuk memastikan program-program pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif terhadap rakyat banyak.

Menurut Freddy waktu 5 tahun terlalu singkat untuk mewujudkan program-program Prabowo Gibran. “Dalam setiap pertemuan dengan relawan maupun tokoh-tokoh relawan pasca Pilpres Presiden Jokowi kerep menyatakan relawan harus mengawal dan memastikan serta mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran agar berhasil menjalankan program-programnya,” imbuhnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Politisi PSI, Ade Armando bahwa Presiden Jokowi berharap program-program keberlanjutan itu tetap berjalan.

Dan dia pun menegaskan bahwa dukungan Jokowi tersebut membantuk framing yang menyebutkan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto akan digantikan Gibran Rakabuming dalam beberapa tahun.

“Pak Jokowi itu sedang ingin mengingatkan pada kita semua bahwa itu enggak benar ya. Kami itu serius bahwa kami akan terus mendukung Gibran sampai 2034. Karena Anda harus ingat bahwa atau teman-teman barangkali juga ingat bahwa sebetulnya yang mengajukan nama Gibran sebagai calon wakil presiden adalah bukan Pak Jokowi. Yang mengajukan adalah Pak Prabowo sendiri berdasarkan hasil survei-survei di masa itu,” kata Ade di Bola Liar KompasTV, Jumat, 26 September 2025.

Menurutnya Gibran maju sebagai wakil presiden bukan ancaman bagi Presiden Prabowo. Ade mengutip apa yang disampaikan Jokowi bahwa Prabowo-Gibran adalah duet yang sepenuhnya dia dukung. Karena pasangan ini adalah yang tepat untuk keberlanjutan program di masa pemerintahan Jokowi.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa arahan Jokowi sebagai pengingat kepada relawan agar tetap serius mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Dia mengungkapkan saat ini di kalangan relawan yang merasa kecewa dengan Prabowo.

“Ada yang sudah merasa kecewa. Dan kami (relawan) tidak lagi mendukung Prabowo, terutama pemberian amesty kepada mas

Hasto,” ujarnya.

Menurut Ade, hal-hal seperti bagi Jokowi ini harus dihindari. Jokowi ingin menegaskan jika relawan mendukung dirinya maka harus juga mendukung Prabowo-Gibran.

“Gibran pada tahun 2029 belum masanya menjadi seorang presiden. Maka dukunglah Prabowo Gibran,” ujarnya.

Menabrak Logika Sejarah Jokowi

Seperti diungkapkan oleh para relawan bahwa dukungan Prabowo-Gibran dua periode untuk keberlanjutan justru bertentangan dengan logika sejarah politik Jokowi sendiri.

Menurut Wasekjen DPP PDI Perjuangan Adian Napitupulu pernyataan Jokowi yang menginginkan keberlanjutan pasangan Prabowo-Gibran sampai dua periode justru menabrak proses yang pernah dijalani Jokowi.

“Kenapa di masa Prabowo harus sama (wapresnya), masa lu boleh beda. Terus masa sekarang harus sama begitu? Logika itu menabrak proses sejarah Jokowi sendiri,” kata Adian acara Bola Liar episode “Siasat Jokowi Arahkan Prabowo-Gibran 2 Periode” di KompasTV, Jumat (26/9/2025).

Menurut Adian Jokowi sendiri ketika menjadi presiden memiliki wakil presiden berbeda antara periode pertama dan kedua.

“Artinya keberlanjutan pemerintahan tidak harus berarti paket presiden-wapresnya sama. Ini sudah dibuktikan Jokowi sendiri,” lanjutnya.

Adian juga menyindir Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik yang sebelumnya ngotot mendukung pernyataan Jokowi



Adian Napitupulu

tersebut. Menurutnya, tidak tepat memaksakan syarat keberlanjutan hanya pada pasangan Prabowo-Gibran.

“Kalau tafsiran itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri,” ujarnya.

Selanjutnya politisi PDI Perjuangan ini memandang dukungan Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran dua periode sebagai manuver politik yang penuh tanda tanya.

Pasalnya akhir-akhir ini Jokowi dan keluarga mendapatkan serangan bertubi-tubi, baik dari isu ijazah palsu, pemakzulan Gibran, sampai isu pembubaran DPR. Menurutnya ini menjadi salah satu alasan di balik sikap Jokowi.

“Ini salah satu risiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Dia sudah memilih,” kata Adian, menggarisbawahi bahwa situasi politik sekarang memang penuh tekanan bagi Jokowi.

Adian juga menyinggung perbedaan cara pandang antara seorang negarawan dan politisi. “Negarawan selalu berpikir tentang generasi berikutnya, politisi

berpikir tentang pemilu berikutnya. Pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan,” ujarnya.

Dengan demikian, Adian berharap publik bisa menilai secara kritis manuver politik Jokowi. “Tidak ada yang salah orang bicara apa saja. Tapi dari situ kita memahami cara berpikirnya seperti apa,” tegasnya.

Jokowi Ingin Mempertahankan Gibran

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting memandang bahwa arahan dukungan Jokowi terhadap Prabowo-Gibran dua periode merupakan strategi atau langkah Jokowi dalam mempertahankan Gibranagar tetap berada di lingkaran kekuasaan.

Menurutnya arahan Jokowi ini juga sebagai bentuk tekanan bagi Prabowo. Menurut Selamat Jokowi sedang ingin menunjukkan bahwa dia masih memiliki pengaruh meski tak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

“Ya, tentu saja ini ada motif politik ya,” kata Selamat, dikutip dari tayangan Bola Liar yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (27/9/2025).

“Karena saya ilmuwan politik, tentu saja dari perspektif politik, dia ingin mengunci bahwa Gibran itu harus tetap berada di dalam radar kekuasaan,” tambahnya.

“Bukan hanya hingga 2029 sampai 2034, sekaligus sebenarnya Jokowi juga ingin menunjukkan pada publik bahwa dia masih punya pengaruh politik yang sangat kuat pasca-lengser 2024,” papar Selamat.

Dia mengatakan siasat politik yang sedang dijalankan oleh Jokowi ini merupakan bagian dari upayanya

untuk mengunci lawan-lawan atau Kawan-kawan politiknya agar anak sulungnya masih berada di radar kekuasaan.

“Dan ini juga artinya menekan Presiden Prabowo agar tetap menggunakan Gibran untuk periode selanjutnya,” ujarnya.

Kemudian, Selamat menilai arahan dukungan Prabowo-Gibran dua periode ini justru bisa membuat Prabowo tidak nyaman karena masih terlalu dini.

Di tempat terpisah Selamat menilai tindakan Jokowi yang mengintruksi relawannya mendukung Prabowo-Gibran 2 periode bukanlah cerminan sikap negarawan, melainkan indikasi adanya “konflik kejiwaan”.

Ginting menduga, Jokowi belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya tidak lagi berkuasa dan masih terus berusaha untuk “menyetir” pemerintahan dari luar.

“Problem apa yang terjadi dalam diri Jokowi? Memang ada konflik dalam dirinya, konflik kejiwaan yang dia enggak tahu bahwa dia sudah tidak berkuasa,” ujar Ginting dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Forum Keadilan TV, 22 September 2025.

Lebih jauh, Ginting menilai manuver ini didasari oleh rasa “haus dan maruk akan kekuasaan” serta keinginan untuk melindungi dinasti politik keluarganya. Menurutnya pernyataan “dua periode” ini dianggapnya sebagai cara congkak untuk menunjukkan kepada publik bahwa Presiden Prabowo Subianto seolah-olah masih berada di bawah kendalinya.

Menurutnya, hal ini merupakan sebuah tekanan politik yang mengganggu otonomi Prabowo sebagai presiden. Melihat kondisi ini, Ginting bahkan menyarankan agar



Refly Harun

Jokowi lebih fokus pada kesehatannya daripada terus mencampuri urusan politik yang dinilainya sudah tidak punya makna.

“Sudahlah Jokowi menurut saya hentikan bicara tentang politik apalagi politik yang tidak punya makna. Konsentrasilah pada kesehatan dirimu,” katanya.

Terlalu dini

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai arahan Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran terlalu dini sebab Prabowo juga baru menjabat kurang dari satu tahun sebagai Presiden.

Bahkan, menurutnya, Prabowo sendiri pernah menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan kembali pencalonannya pada tahun ketiga masa jabatannya, tergantung pada keberhasilannya selama ini.

“Prabowo sendiri mengatakan dia akan mencalonkan (lagi) kalau dia anggap berhasil. Kalau tidak, ya dia tidak akan mencalonkan diri lagi,” jelas Refly.

Maka itu, dia mengkritik kelompok-kelompok yang mengklaim diri sebagai pendukung Prabowo dengan cara yang menutup ruang kritik.

Menurutnya, Prabowo bukanlah sosok yang hanya perlu dicintai

secara buta, melainkan harus diawasi kinerjanya demi menjaga kedaulatan rakyat.

“Kalau mereka mengatakan gerakan cinta Prabowo, berarti mereka ingin mengklaim dialah tokoh yang paling cinta dengan Presiden Prabowo, yang lainnya tidak. Padahal Prabowo adalah pemimpin yang harus diawasi, bukan cuma dicintai,” tutur Refly.

Ia juga menekankan pentingnya masyarakat memahami cara bernegara yang baik. Dukungan dua periode seharusnya diberikan berdasarkan prestasi dan hasil kerja nyata, bukan hanya karena label atau klaim cinta kepada seorang pemimpin.

“Belum apa-apa, belum jelas prestasinya, tiba-tiba sudah main dukung 2 periode saja,” tambahnya.

Refly juga mengingatkan bahwa nama Prabowo adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik kelompok tertentu. Oleh karena itu, tidak pantas jika nama Presiden atau Wakil Presiden dijadikan label kelompok yang kemudian berpotensi menimbulkan kepentingan politik terselubung.

“Tidak boleh nama Presiden dan Wakil Presiden dipakai untuk nama kelompok, apalagi untuk dibenturkan dengan kelompok lainnya. Itu bukan cara bernegara yang benar,” tegasnya.

Sebagai kesimpulan, Refly mengajak masyarakat untuk memberikan ruang bagi Prabowo bekerja sebaik-baiknya dan melakukan penilaian kritis terhadap kinerjanya. Jika hasilnya baik, dukungan layak diberikan; jika tidak, masyarakat berhak mencari alternatif yang lebih baik.

“Begitu cara bernegara yang benar dan masuk akal,” tegasnya.



MEMBACA PERTEMUAN JOKOWI DAN ABU BAKAR BAASYIR:

DARI NASEHAT DAN SIKAP POLITIK LABIL JOKOWI

Pertemuan antara Jokowi dan Abu Bakar Baasyir yang berlangsung selama 20 menit mengandung makna penting. Tidak hanya nasihat namun pertemuan tersebut secara politik memiliki makna mendalam.

Kabar pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi bersama pengasuh pondok pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Abu Bakar Baasyir sangat mengejutkan publik. Sebab pertemuan kedua tokoh ini secara perhitungan tidak mungkin terjadi.

Pasalnya, Jokowi selama ini merupakan figure yang berada di kutub yang berseberangan dalam narasi politik dan ideologi negara. Sementara Abu Bakar Baasyir merupakan sosok yang anti Pancasila dan ingin mendirikan negara Islam (Islam Konservatif). Bahkan Baasyir adalah mantan narapidana terorisme.

Ustad Abu Bakar Baasyir menemui Jokowi di kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo pada Senin, 29 September 2025.

Momen kedatangan Baasyir itu sempat dilihat langsung awak media. Baasyir tiba di rumah Jokowi pukul 12.33 WIB. Dengan menggunakan tongkat, dia berjalan perlahan masuk ke rumah Jokowi.

Jokowi yang sudah menunggu dari sebelum Baasyir tiba, pun menyambut kedatangannya dengan hangat bahwa terlihat dia sempat mencium tangan ulama tersebut, sebuah gestur penghormatan yang mendalam dalam budaya Jawa dan Islam.

Selanjutnya, Jokowi mengantar

Baasyir masuk ke dalam rumah. Jokowi dan Baasyir melakukan pertemuan secara tertutup sekitar selama 20 menit.

Baasyir Nasehati Jokowi

Usai pertemuan, Abu Bakar Baasyir menceritakan momen pertemuannya dengan Jokowi. Kepada awak media Baasyir mengatakan bahwa inti kedatangannya adalah untuk menyampaikan nasihat keagamaan kepada Jokowi.

Kepada awak media Ba'asyir menegaskan bahwa kedatangannya murni didasari oleh kewajiban seorang ulama untuk menasihati, tanpa didorong oleh kepentingan politik atau pujian.

Dalam pertemuan tersebut dia memberikan nasihat agar Jokowi menegakan menegakkan hukum Islam di Indonesia.

"Nasihatnya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik, sebab saya ini sedang berjuang minta supaya negara ini diatur dengan hukum Islam," tuturnya.

Sebelum menemui Jokowi, Baasyir diketahui sempat menyurati Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat menjadi Wali Kota Solo. Kemudian Baasyir juga bersurat ke Presiden Prabowo Subianto dan meminta agar hukum Islam diterapkan.

"Presiden pun saya nasihati lewat surat, hanya nasihat itu kewajiban

seorang ulama menasihati-menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin, mau tidak mau Allah yang menentukan bukan saya. Itu saja nggak ada tujuan lain," jelasnya.

Sementara itu, pada waktu yang sama Presiden ke-7 RI, Jokowi mengaku kaget dengan kunjungan ustad Abu Bakar Baasyir.

"Sangat kaget saya kedatangan beliau," ujar dia.

Diketahui dari informasi yang diterima, kunjungan Abu Bakar Baasyir ini terbilang mendadak. Sementara itu, Jokowi mengatakan kedatangan Abu Bakar Baasyir untuk memberikan nasihat kepada dirinya. Nasihat itu, kata Jokowi, agar dirinya mengabdikan kepada Islam.

"Intinya beliau menasihati saya untuk mengabdikan pada Islam. Udhah itu aja," ujar Jokowi.

Jokowi Bertaubatlah

Melalui sambungan telfon dengan Wartawan Senior, Edy Mulyadi, Ustad Baasyir menjelaskan secara langkah isi pertemuan tersebut.

Baasyir mengungkapkan bahwa kedatangannya ke kediaman Jokowi adalah semata-mata menjalankan perintah agama, yakni memberi nasihat kepada pemimpin.

Tanpa basa-basi, ustad Abu Bakar Baasyir langsung menasehati Jokowi ke inti masalah. Nasihat yang disampaikan dengan lugas, tanpa tedeng aling-aling.

"Saya sampaikan kepada pak Jokowi, bahwa kalau tuduhan-tuduhan di luar itu keliru, Pak Jokowi bersabar," ujar ustad Abu Bakar Baasyir.

Namun, dia tegas mengingatkan jika tuduhan itu benar, yang terbaik adalah mengakuinya, bertaubat, dan

mengembalikan apa yang bukan haknya, termasuk bila terkait harta negara. Baasyir juga mengingatkan bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, tujuan utama adalah keselamatan di akhirat.

“Saya juga sampaikan, kalau pak Jokowi pernah korupsi, selain bertobat juga segera kembalikan semua hasil korupsi itu ke negara. Supaya nanti di akhirat mudah dan hisabnya,” kata mantan ulama yang keluar masuk penjara karena memperjuangkan penerapan Islam secara kaaffah itu.

Selain itu, dia juga menyarankan agar keluarga Jokowi mengadakan pengajian rutin untuk lebih memahami Islam dengan benar. Menurut beliau, kehidupan bangsa hanya akan selamat bila dijalankan dengan hukum Allah.

Menurut pengakuannya, saat dirinya menyampaikan nasihat Jokowi hanya mendengarkan dengan tenang tanpa banyak komentar. Bahkan ia sempat mengatakan bahwa seharusnya dirinyalah yang datang ke pesantren, bukan sebaliknya.

Ustadz Abu menutup dengan penegasan: seorang ulama wajib menyampaikan kebenaran, apapun risikonya, dan semua itu diniatkan hanya untuk mencari ridha Allah.

Jokowi “Manusia Labil”

Bagi sebagian pihak, pertemuan ini bisa dilihat sebagai upaya rekonsiliasi atau silaturahmi kemanusiaan antara dua tokoh bangsa dengan latar belakang yang berbeda. Sementara bagi Ba’asyir, ini adalah realisasi dari keyakinan pribadinya tentang tugas moral seorang ulama.

Peristiwa ini menunjukkan dinamika yang terus bergerak dalam kancah sosial dan politik Indonesia,

di mana komunikasi bahkan bisa terjalin antara tokoh-tokoh yang memiliki pandangan ideologis yang sangat kontras.

Namun bagi politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean menilai di balik pertemuan tersebut memberikan sebuah tanda kepada publik. Tanda yang dia maksud adalah mempertegas bahwa Jokowi adalah sosok yang labil.

“Pertanda bahwa memang Jokowi ini manusia labil,” ujar Ferdinand seperti dilansir fajar.co.id, Rabu, 1 Oktober 2025.

Sikap yang labil Jokowi ini memperkuat penilaian publik bahwa integritas Jokowi semakin diragukan. Dan dia heran, mengapa seorang Presiden dua periode itu membangun komunikasi dengan mantan terpidana kasus terorisme.

“Karena Abu Bakar Ba’asyir ini adalah terpidana teroris puluhan tahun, terlibat bom Bali,” Ferdinand menuturkan.

“Abu Bakar Ba’asyir juga tidak menerima Pancasila,” tambahnya.

Mengenai Jokowi yang pernah membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) yang dianggap berbahaya, Ferdinand memberikan komentar menohok. Menurutinya dari pertemuan ini mempertanyakan, apa sebenarnya ideologi Jokowi.

“Jadi kalau Jokowi seorang mantan Presiden yang pernah membubarkan ormas FPI hingga HTI, inikan jadi lucu. Di mana sebetulnya ideologi Jokowi, tidak jelas,” timpalnya.

Ia pun semakin curiga, setelah cawe-cawe Jokowi meminta relawan mendukung Prabowo-Gibran dua periode, ada upaya lain setelahnya. Politikus PDI Perjuangan ini memandang sikap Jokowi menerima Ustad Abu Bakar Baasyir ini hanya

untuk kepentingan politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka.

“Saya melihat ini hanya sebuah agenda, Jokowi sedang mengumpulkan siapapun, mau teroris atau apapun, yang penting suara bisa dikumpulkan untuk Gibran 2029,” katanya.

Backup Kultural

Terpaan sejumlah kasus yang dialami Jokowi dan keluarganya dari kasus ijazah sampai dugaan korupsi membawa kecemasan psikologis dalam diri Jokowi.

Kecemasan tersebut sangat beralasan- sebab di tengah serangan publik terhadap Jokowi, dukungan kepadanya hanya datang dari para relawan yang tidak mempunyai kekuatan yang besar. Pembelaan dari partai politik untuk membackup nya pun tak bergema.

Melihat kondisi ini pengamat politik Rocky Gerung membaca bahwa dibalik pertemuan Jokowi dan ustad Baasyir merupakan langkah atau cara Jokowi dalam mencari “penyangga kultural” di saat dukungan politik formalnya kian menipis.

“Abu Bakar Ba’asyir sudah mengucapkan janji setiap ada merah putih. Jokowi dalam kecemasan dia hari-hari ini dia memerlukan semacam *backup* kultural kira-kira begitu karena *backup* politik sudah nggak punya dia kan,” kata Rocky lewat kanal Youtube Hendri Satrio, seperti dikutip redaksi Kamis, 2 Oktober 2025.

Rocky pun menilai keberadaan Abu Bakar Baasyir dalam pertemuan itu memberi kesan sebagai representasi dukungan moral dari kalangan muslim, terutama terkait nilai-nilai Islam.



Rocky Gerung

Dalam pertemuan tersebut, Abu Bakar Ba'asyir berpesan kepada Jokowi agar selalu berpihak pada Islam. Pesan itu sangat jelas, menurut Rocky pesan itu bukan sekadar simbol, melainkan tuntutan agar negara tegak di atas nilai keadilan, kesejahteraan, dan kejujuran.

Namun, dosen Filasafat UI itu tegas mengatakan bahwa pertemuan ini tidak mengandung skenario politik besar. Ia menyebutnya hanya sebagai kebiasaan kecil seorang tokoh bangsa menerima tamu.

"Nggak ada skenario di situ. Itu cuma ya hobi kecil buat terima tamu karena nggak ada lagi tamu yang datang ke situ, ya diatur," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Peneliti ISEAS Yusuf-Ishak Institute, Antonius Made Tony Supriatma. Dia menilai bahwa pertemuan tersebut sangat penting bagi Jokowi sebab dirinya semakin terpojok situasi yang dihadapinya.

Jika kembali membaca sejarah Jokowi dalam meraih kekuasaan karena dirinya berhasil membelah pemilih Islam dan menakuti pemilih minoritas.

"Banyak orang dulu memilih dia karena dianggap anti radikalisme. Di bawah dia, gerakan Islam yang progresif ditindas habis. Dan, dia berhasil berkuasa karena membelah



Antonius Made Tony Supriatma

pemilih Islam dan menakut-nakuti pemilih minoritas. Jadilah pemilih minoritas memilih dia dengan angka sekitar 90%," ungkapnya.

Saat ini dia terpojok, Jokowi melakukan strategi baru yakni dengan merangkul lawan-lawan yang dulu dia hajar dengan keras. Dia memandang Jokowi adalah sosok yang labil dan hanya berorientasi pada kepentingannya.

"Seolah tidak ada rasa bersalah. Tidak ada masa lalu. Yang konstan adalah kepentingan. Yang lain boleh bergerak ke mana saja," kritiknya.

Yang menjadi pertanyaan, apakah sikap Jokowi ini akan berpengaruh dengan para pembelanya yang anti terhadap Islam Radikal.

Dia memandang ada tiga golongan yang akan muncul dari para pembela Jokowi. Golongan pertama tetap setia. Mereka akan sibuk membangun narasi untuk membenarkan dengan adanya pertemuan tersebut. Narasi yang akan dibangun dengan alasannya bahwa pertemuan tersebut untuk rekonsiliasi dan demi persatuan bangsa.

Golongan kedua adalah garuk-garuk apa aja yang tidak gatel. Sambil berusaha memahami: kok bisa begini ya? Dan golongan yang ketiga adalah merasa dikhianati dan marah.

"Kita tidak tahu mana yang lebih

banyak sekarang di kalangan para pendukungnya itu," ujarnya.

Selanjutnya dia mengatakan dalam politik seharusnya mempunyai pendirian dan sikap yang jelas. Sehingga politisi akan jujur menyatakan bahwa dia berada di pihak mana harus berdiri.

Politisi yang Anda lihat di sini (Jokowi, red) bukan tipe politisi yang memiliki pendirian. Kita bahkan tidak tahu di mana ia berdiri.

Kembali mengingat perjalanan politiknya untuk meraih kekuasaan, Jokowi pernah menjual imajinasi pro rakyat. Ternyata, setelah berkuasa dia lebih pro terhadap kekuasaan dan oligarki. Tidak hanya itu dia juga berkuasa dengan membangun nepotisme dan mementingkan keluarganya.

Jokowi dan keluarga menjual kesederhanaan, namun setelah berkuasa keluarganya hidup dengan mewah.

Menurutnya Jokowi merupakan sosok yang bersedia menukar apa saja demi kekuasaan. Apa saja. "Anda masih percaya pada politisi macam begini dan keluarganya?" tanya Made.

Menurutnya sikap seperti ini bukan hanya ada pada Jokowi. Sebagian besar politisi di Indonesia juga lebih mengutamakan bagaimana meraih kekuasaan bukan untuk memperjuangkan nilai dan kebenaran.

"Oh ya, sebagian besar politisi kita macam ini. Kita bisa menjumpainya di mana saja. Bahkan tidak hanya politisi tapi juga akademisi, intelektual, dan bahkan aktivis! Tidak ada nilai, tidak ada pegangan, tidak ada ideologi ... hanya cuan dan kekuasaan!" tutup Made Supriatma, dikutip dari akun media sosialnya, Selasa, 30 September 2025.



REVITALISASI SEKOLAH KEMENDIKDASMEN:

**MENATA ULANG RUANG BELAJAR,
MENYALAKAN ASA BANGSA**



Di tengah arus perubahan kebijakan pendidikan nasional, program revitalisasi sekolah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menjelma menjadi tonggak penting dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan

dari akar rumput. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, program ini adalah manifestasi komitmen negara untuk menghadirkan ruang belajar yang bermartabat, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia secara menyeluruh.

Sejak diluncurkan, program ini telah melampaui ekspektasi.

Target awal yang ditetapkan sebesar 10.440 satuan pendidikan kini telah terlampaui, dengan capaian mencapai 16.170 sekolah di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyampaikan dalam konferensi



Gogot Suharwoto

pers, “Kami tidak hanya membangun gedung, kami sedang membangun masa depan. Setiap ruang kelas yang diperbaiki adalah ruang bagi mimpi anak-anak untuk tumbuh.”

Revitalisasi ini mencakup rehabilitasi ruang kelas,

pembangunan toilet yang sehat dan ramah anak, penguatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), serta penyediaan ruang kesenian dan laboratorium. Di SDN Padurenan 4, Kota Bekasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, turun langsung meninjau progres pembangunan. Ia menyampaikan, “Kami ingin memastikan bahwa setiap anak, dari Sabang sampai Merauke, memiliki akses ke ruang belajar yang aman, bersih, dan inspiratif. Pendidikan bukan hanya soal kurikulum, tapi juga soal lingkungan yang mendukung proses belajar.”

Dampak program ini terasa nyata di berbagai daerah. Di SMK Negeri 1 Cibogo, Kabupaten Subang, dua

ruang belajar yang sebelumnya nyaris roboh kini telah berdiri kokoh berkat bantuan revitalisasi. Kepala sekolah, Ade Suhedin, mengenang masa-masa sulit itu, “Kami sempat khawatir setiap kali hujan turun. Anak-anak belajar dengan rasa takut. Tapi sejak revitalisasi dilakukan, wajah sekolah kami berubah total. Sekarang kami punya ruang belajar yang kokoh dan nyaman,” tuturnya.

Tak hanya berdampak pada siswa dan guru, program ini juga menggerakkan ekonomi lokal. Dalam siaran pers resmi Kemendikdasmen, disebutkan bahwa pelaksanaan revitalisasi melibatkan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, sehingga turut membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan





warga. Ma'ruf El Rumi, Staf Khusus Kemendikdasmen Bidang Komunikasi dan Media, menegaskan, "Kami ingin revitalisasi ini menjadi gerakan bersama. Ketika masyarakat terlibat, rasa memiliki terhadap sekolah juga tumbuh," ujarnya.

Secara administratif, dari total



Ma'ruf El Rumi

sasaran 13.834 sekolah, sebanyak 11.179 telah melengkapi dokumen dan menandatangani perjanjian kerja sama. Rinciannya meliputi 1.260 PAUD, 3.903 SD, 3.974 SMP, dan 2.042 SMA. Dari jumlah tersebut, 75,8% merupakan sekolah negeri dan 24,2% sekolah swasta. Data ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga memperhatikan keberadaan sekolah swasta yang turut berkontribusi dalam pendidikan nasional.

Program ini juga bersinergi dengan inisiatif kesehatan siswa, seperti Cek

Kesehatan Gratis dan kampanye gaya hidup bersih. Toilet yang sehat dan UKS yang aktif menjadi bagian integral dari pendekatan holistik Kemendikdasmen terhadap pendidikan. "Kami percaya bahwa anak yang sehat akan belajar lebih baik. Maka kami prioritaskan fasilitas sanitasi dan kesehatan," ujar Gogot Suharwoto.

Revitalisasi sekolah bukanlah proyek jangka pendek. Ia adalah bagian dari visi jangka panjang untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, Kemendikdasmen berharap program ini menjadi fondasi bagi transformasi pendidikan yang lebih manusiawi.

"Setiap bata yang kami pasang adalah harapan. Setiap dinding yang kami tegakkan adalah perlindungan bagi mimpi anak-anak. Dan setiap sekolah yang kami revitalisasi adalah bukti bahwa negara hadir," tutup Abdul Mu'ti dengan penuh keyakinan.



Ciptakan Lingkungan Layak Ribuan Sekolah Diperbaiki

Pemerintah terus melakukan perbaikan (revitalisasi) ribuan sekolah seluruh Indonesia pada 2025 untuk ciptakan lingkungan pendidikan yang layak dan nyaman.



Anggaran
Rp16,9 triliun



Sasaran
15.523 sekolah

Jumlah Sekolah Penerima Program Revitalisasi Sekolah 2025



PAUD
1.454 sekolah
Rp522,31 miliar



SD
6.149 sekolah
RP4,5 triliun



SMP
3.994 sekolah
Rp4,6 triliun



SMA
2.237 sekolah
Rp2,4 triliun

*1.689 lainnya terdiri
dari SMK, SLB, dan SKB



MENYENTUH MASA DEPAN PENDIDIKAN:

INTERACTIVE FLAT PANEL DAN LOMPATAN DIGITALISASI KEMENDIKDASMEN

Jakarta, Oktober 2025 — Di ruang kelas SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, suasana belajar tampak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak duduk dengan mata berbinar, menyimak video pembelajaran yang diputar di layar besar di depan kelas. Layar itu bukan sekadar televisi, melainkan *Interactive Flat Panel* (IFP)—perangkat digital multifungsi yang kini menjadi simbol transformasi pendidikan Indonesia. Di layar itu, guru tak lagi hanya menulis, tetapi mengajak siswa berinteraksi, menggambar, menjawab kuis, dan menyimulasikan konsep-konsep abstrak secara visual. “Seru banget, Bu! Bisa nonton, bisa gambar, bisa jawab soal langsung,” ujar Dika, siswa kelas lima, sambil menunjukkan hasil kuis matematika yang baru saja ia selesaikan.

Transformasi ini bukan terjadi begitu saja. Ia lahir dari visi besar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dipimpin oleh Menteri Abdul Mu’ti. Dalam pidatonya saat peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, Mu’ti menyampaikan dengan tegas, “Digitalisasi bukan sekadar mengganti papan tulis dengan layar. Ini adalah perubahan cara berpikir, cara mengajar, dan cara belajar. Kita sedang membangun ekosistem pembelajaran yang relevan dengan zaman, yang menjangkau semua anak Indonesia, di mana pun mereka berada.”

Program digitalisasi pembelajaran ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Digitalisasi Pendidikan. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menghadirkan teknologi pembelajaran ke seluruh pelosok

negeri. “Saya ingin setiap sekolah memiliki layar digital. Di situ kita bisa memberi materi pelajaran terbaik, langsung dari pusat,” ucapnya dalam pidato kenegaraan di Istana Merdeka. Arahannya menjadi titik tolak bagi Kemendikdasmen untuk bergerak cepat, menyusun strategi, dan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan.

Interactive Flat Panel sendiri adalah perangkat layar sentuh berukuran besar yang menggabungkan fungsi papan tulis, proyektor, komputer, dan speaker dalam satu sistem. Dengan konektivitas internet dan sistem operasi yang mendukung berbagai aplikasi pembelajaran, IFP memungkinkan guru menyampaikan materi secara visual, dinamis, dan kolaboratif. Di SDN 1 Banyumas, Ibu Rini, guru matematika, menceritakan bagaimana siswa lebih cepat memahami konsep pecahan melalui simulasi visual. “Dulu saya harus menggambar lingkaran dan membaginya manual. Sekarang, saya tinggal klik, dan anak-anak langsung melihat bagaimana satu per empat itu bekerja. Mereka jadi lebih antusias,” tuturnya.

Kemendikdasmen tidak hanya membagikan perangkat, tetapi juga menyiapkan konten pembelajaran digital yang terintegrasi. Melalui platform Rumah Belajar dan TV Edukasi, guru dapat mengakses ribuan materi ajar, video pembelajaran, dan simulasi interaktif yang dapat ditampilkan langsung di IFP. “Kami ingin memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya canggih, tapi juga bermakna. Kontennya harus relevan, kontekstual, dan mendukung capaian kurikulum,” ujar Ma’ruf El, Staf Khusus Kemendikdasmen Bidang Komunikasi dan Media.

Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program digitalisasi pendidikan kini sudah mulai berjalan dengan baik. “Kami telah menyiapkan paket materi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima perangkat pembelajaran digital. Progres pelaksanaan program digitalisasi pendidikan, alhamdulillah, sekarang sudah mulai proses pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima. Insya Allah semuanya lancar,” katanya kepada awak media.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk mendukung pengadaan 15.000 unit smart board atau IFP, televisi pendidikan, dan pelatihan guru. “Kami tidak ingin teknologi ini hanya



"Kami tidak ingin teknologi ini hanya menjadi pajangan. Guru harus mampu menggunakannya secara maksimal. Karena itu, pelatihan menjadi bagian penting dari program ini."

**Mendikdasmen
Abdul Mu'ti**



menjadi pajangan. Guru harus mampu menggunakannya secara maksimal. Karena itu, pelatihan menjadi bagian penting dari program ini,” tegas Mu’ti saat meninjau pelaksanaan pelatihan di Balai Guru Penggerak Jakarta.

Di daerah seperti Samarinda, pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis yang lebih jelas dari pusat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan kesiapan daerah untuk menyesuaikan jika program benar-benar dijalankan. “Informasinya memang masih dibahas di pusat. Tapi kalau jadi dilaksanakan, tentu bagus, karena perangkat ini jauh lebih interaktif dan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran,” ujarnya kepada media lokal.

Program ini juga dirancang untuk menjangkau daerah 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam rapat bersama Panitia Kerja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto,



Asli Nuryadin

menyampaikan bahwa sebanyak 33.182 sekolah di wilayah 3T telah ditetapkan sebagai penerima bantuan digitalisasi pembelajaran dari pemerintah. “Sasaran daerah 3T yang sudah kita hitung itu sekitar 33.182 dari 300.000 sasaran sekolah penerima digitalisasi pembelajaran,” ujar Gogot.

Gogot juga menekankan bahwa digitalisasi pembelajaran bukan hanya soal perangkat keras, tetapi soal pemerataan kualitas pendidikan. “Kami ingin anak-anak di pelosok Papua bisa mengakses materi yang sama dengan anak-anak di Jakarta. Dengan teknologi, semua bisa belajar, semua bisa tumbuh,” katanya dalam forum pendidikan nasional.



Gogot Suharwoto

Transformasi ini menuntut perubahan budaya belajar. Guru perlu berani bereksperimen, siswa perlu aktif berpartisipasi, dan sekolah perlu membuka diri terhadap inovasi. “Digitalisasi bukan hanya soal alat, tapi soal cara berpikir. Kita harus ubah paradigma dari mengajar menjadi memfasilitasi belajar,” tegas Mu’ti.

Majalah ini mencatat bahwa program digitalisasi pembelajaran melalui IFP adalah salah satu kebijakan pendidikan paling ambisius dalam satu dekade terakhir. Ia menyentuh aspek teknologi, pedagogi, pemerataan, dan partisipasi masyarakat. Ia membuka peluang bagi Indonesia untuk melompat lebih jauh dalam menciptakan generasi pembelajar yang tangguh, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global.

Ketika ditanya tentang target jangka panjang, Kemendikdasmen menyebutkan bahwa pada akhir 2026, sebanyak 288 ribu sekolah di Indonesia diharapkan telah menerima perangkat digital, termasuk IFP, laptop, dan koneksi internet. “Kami tidak ingin ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena lahir di tempat yang jauh. Dengan teknologi, kita hadirkan keadilan dalam pendidikan,” tutup Abdul Mu’ti dengan penuh keyakinan.



SMART TV UNTUK 330 RIBU SEKOLAH



Tegangan listrik
100-240 volt



75 inci



OS
Android 13



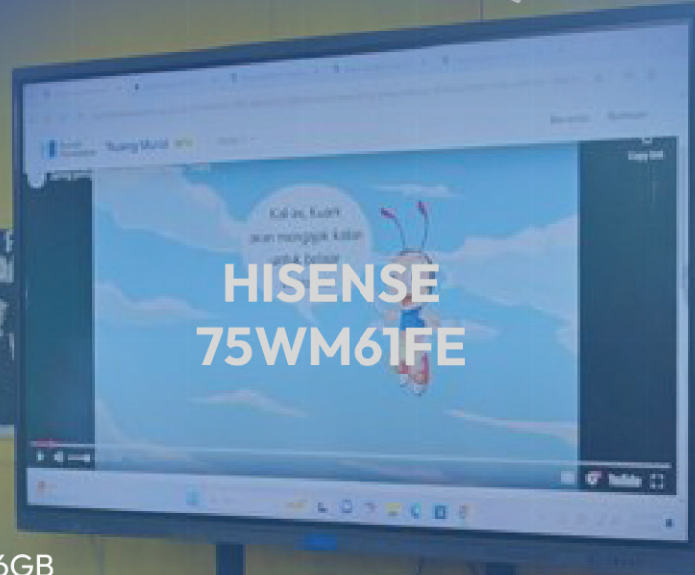
Memori 16GB



Terintegrasi
akun Merdeka
Belajar



Rp26juta/unit
(incl. ongkir
dan asuransi)



Rencana Jumlah Sekolah Penerima (Kumulatif)



"Tahun depan kita tambah satu sekolah tiga layar. Idealnya nanti satu kelas satu layar. Di situ pelajaran-pelajaran dengan konten yang terbaik animasi, dan kita bisa long-distance education, tele education."

Presiden Prabowo Subianto
(via Sekretariat Presiden, 12 September 2025)





DEMO RICUH DI BERBAGAI NEGARA MEMANTIK PERLAWANAN YANG S KEKECEWAAAAN TERHADAP PEME

Selama Agustus hingga September 2025, di berbagai negara di Asia terjadi aksi demonstrasi luar biasa dari masyarakat. Nepal, Filipina, Malaysia, Timor Leste hingga Indonesia, melakukan unjuk rasa atas kekecewaan mereka kepada pemerintah yang cenderung acuh terhadap permasalahan warga negara.

Gerakan-gerakan ini tidak homogeni. Mereka dipicu oleh peristiwa lokal (skandal korupsi, kebijakan kontroversial, pemutusan akses digital, tekanan ekonomi) namun terhubung oleh cara

berorganisasi: platform digital, simbol budaya pop, dan taktik mobilisasi cepat.

Sepintas, demonstrasi di kota-kota besar Asia pada 2025 tampak seperti rentetan peristiwa yang berdiri sendiri. Unjuk rasa mahasiswa di Jakarta, protes *online* yang memuncak di Kathmandu, ribuan warganya yang turun ke jalan di Manila, atau aksi massa di Kuala Lumpur. Tetapi ketika ditelusuri lebih dekat, pola dan persamaan penting muncul: mayoritas gelombang ini melibatkan generasi muda yang memakai media sosial sebagai tulang punggung organisasi; tuntutan yang sering

berkisar pada korupsi, layanan publik yang buruk, ketidaksetaraan ekonomi, dan penolakan terhadap pembatasan kebebasan digital; serta simbol-simbol budayawan populer yang diadopsi sebagai identitas gerakan.

Analisis *region-wide* menyebut fenomena ini sebagai “kebangkitan Gen-Z” di Asia—bukan sekadar kebetulan tetapi pergeseran sosial-politik yang nyata.

Indonesia, Dari Protes Gaji Hingga Driver Ojol yang Terlindas

Selama sepekan, 25-31 Agustus 2025, gelombang unjuk rasa terjadi



RA, SAMA ATAS RINTAH

di berbagai kota di Indonesia.

Semula, para pengunjung rasa memprotes gaji dan tunjangan DPR hingga sulitnya mencari kerja. Namun aksi membesar pada 28 Agustus 2025, ketika pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal akibat dilindas kendaraan taktis polisi.

Lantas, bagaimana sebenarnya awal mula rangkaian demo yang sebenarnya berlangsung damai ini berujung pada kericuhan dan menimbulkan korban jiwa? berikut ulasannya!

Awal Mula Demo

Ketua Umum Partai Buruh, Said

Iqbal, menyebut sebanyak 5.000 buruh Jabodetabek dan Karawang ikut serta dalam aksi yang dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Agustus kemarin.

Aksi ini juga berlangsung serentak di berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Makassar, Aceh, Medan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, hingga Morowali.

Buruh menyuarakan enam tuntutan utama terkait kesejahteraan, termasuk penolakan terhadap upah murah. Said Iqbal menegaskan bahwa demonstrasi buruh berlangsung damai dan tertib.

Bahkan, rencana aksi di Istana Kepresidenan dibatalkan dan

dipusatkan di DPR. Dalam orasinya, Said menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara buruh dan wakil rakyat. Ia menegaskan jika tuntutan terus diabaikan, maka buruh siap menggelar mogok nasional.

Dalam orasi lantangnya, Said membandingkan upah buruh yang rata-rata Rp3-5 juta dengan gaji anggota DPR yang bisa mencapai Rp100 juta per bulan.

Menurutnya, perjuangan buruh untuk sekadar kenaikan Rp200.000 sangat sulit, sementara DPR bisa menaikkan gaji sendiri dengan mudah. Pernyataan ini disambut sorakan massa, sekaligus memicu seruan untuk mogok nasional.



Bentrokan dan Kerusakan Fasilitas Umum

Kericuhan berlanjut hingga sore dan malam. Massa mahasiswa dan aparat terlibat saling dorong, lempar batu, bom molotov, hingga kembang api.

Aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan meluas hingga kawasan Asia Afrika, Patal Senayan, dan Pejompongan.

Sejumlah fasilitas umum rusak, termasuk lampu lalu lintas yang dibakar, pagar beton pembatas jalan dihancurkan, serta pecahan kaca berserakan di jalan.

Petugas kebersihan harus bekerja ekstra membersihkan sisa kerusuhan. Ratusan mahasiswa masih bertahan hingga malam di kawasan Penjernihan dan Pejompongan.

Antisipasi Aparat dan DPR

Aparat kepolisian sejak awal melakukan langkah pencegahan agar pelajar tidak ikut serta dalam demo. Polres Metro Depok mendatangi sekolah-sekolah untuk memastikan siswa tetap belajar dan tidak ikut turun ke jalan.

Kapolres Metro Depok, Kombes Abdul Waras, menegaskan pelajar masih punya kewajiban utama untuk belajar dan belum cukup umur untuk berdemonstrasi.

Dari pihak DPR, Sekretariat Jenderal mengeluarkan surat edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 agar ASN dan Tenaga Ahli bekerja dari rumah (WFH).

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, keterbatasan akses, serta potensi gangguan aktivitas akibat demo.

Demo Buruh Selesai, Mahasiswa Ambil Alih

Usai demo buruh, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus datang dan melanjutkan aksi. Mereka berasal dari Universitas Indraprasta PGRI, Universitas Pancasila, Universitas Pamulang, dan lainnya. Massa membawa spanduk serta berorasi di depan DPR.

Awalnya damai, tetapi situasi memanaskan ketika mahasiswa berhadapan dengan aparat. Polisi mulai menyemprotkan water cannon, sementara massa merespons dengan lemparan batu, petasan, hingga bom molotov.

Jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota ditutup sementara. Polisi juga mengalihkan arus lalu lintas dari arah Bundaran Senayan ke Bundaran HI.

Insiden Tragis: Driver Ojol Tewas

Tragedi terjadi sekitar pukul 19.27 WIB pada 28 Agustus 2025, ketika sebuah mobil barracuda Brimob melaju di Jalan Bendungan Hilir dan menabrak driver ojol bernama Affan Kurniawan yang sedang mengantarkan pesanan. Affan terlindas rantis Brimob, meski sempat dibawa ke RSCM, nyawanya tidak tertolong.

Insiden ini menyulut amarah massa. Mereka mendatangi Mako Brimob Kwitang untuk menuntut pertanggungjawaban aparat. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf secara terbuka dan menyesalkan peristiwa ini.

“Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam dalamnya,” ucapnya.

Ia memerintahkan Propam untuk menindak tegas oknum terlibat

serta menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan komunitas ojek online.

Demo 28 Agustus 2025 menjadi salah satu aksi terbesar sekaligus paling tragis tahun ini. Dimulai dengan tuntutan buruh yang berjalan damai, situasi berubah ricuh saat mahasiswa mengambil alih aksi. Kerusuhan meluas hingga menimbulkan kerusakan fasilitas umum dan menelan korban jiwa seorang driver ojol.

Nepal, Gen-Z dan Krisis Digital yang Menyulut Gunung

Mengutip AFP, demonstrasi Nepal bermula dari blokir yang dilakukan pemerintah ke dua lusin platform media sosial. Platform tersebut dianggap gagal memenuhi tenggat waktu pendaftaran di negara tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi telah menginstruksikan otoritas telekomunikasi untuk menonaktifkan akses ke 26 platform tidak terdaftar yang beroperasi di negara tersebut. Ini termasuk Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn milik Meta.

“Platform media sosial yang tidak terdaftar akan dinonaktifkan mulai hari ini dan seterusnya,” kata juru bicara kementerian, Gajendra Kumar Thakur.

“Platform-platform tersebut akan segera dibuka kembali setelah mereka mengajukan pendaftaran,” tambahnya.

Pemblokiran merupakan keputusan kabinet setelah adanya perintah Mahkamah Agung pada September tahun lalu. Pada tahun 2023, negara tersebut mengeluarkan arahan yang mewajibkan platform media sosial untuk mendaftar dan



membangun kehadiran lokal.

“Meskipun telah ada beberapa pemberitahuan dan upaya, platform-platform besar belum mengajukan pendaftaran,” kata petugas informasi kementerian, Rabindra Prasad Poudel.

“Jika sebuah platform media sosial digunakan di Nepal, platform tersebut harus diatur terhadap aktivitas ilegal atau konten yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Diketahui hanya lima platform, termasuk TikTok dan Viber, yang telah terdaftar secara resmi dan



Rabindra Prasad Poudel

dua lainnya sedang dalam proses. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X memiliki jutaan pengguna di Nepal dengan akun untuk hiburan, berita, dan bisnis.

“Ini secara langsung melanggar hak-hak dasar publik,” kata Presiden Digital Rights Nepal, Bholanath Dhungana, mengatakan bahwa penutupan mendadak ini menunjukkan pendekatan “mengendalikan” pemerintah.

“Meregulasi media sosial memang tidak salah, tetapi pertama-tama kita perlu memiliki infrastruktur hukum untuk menegakkannya. Penutupan mendadak seperti ini merupakan bentuk pengendalian,” tegasnya.

Nepal telah membatasi akses ke platform daring populer di masa lalu. Akses ke aplikasi perpesanan Telegram diblokir pada bulan Juli, dengan alasan meningkatnya penipuan daring dan pencucian uang.

Pada bulan Agustus tahun lalu, pemerintah mencabut larangan



sembilan bulan terhadap TikTok. Ini setelah aplikasi itu setuju untuk mematuhi peraturan Nepal.

Hal ini kemudian membuat demo pecah menjadi kerusuhan. Para demonstran memulai protes mereka dengan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum meneriakkan penolakan terhadap pemblokiran media sosial dan korupsi.

Mahasiswa Ikshama Tumrok, 20 tahun, mengatakan ia memprotes “sikap otoriter” pemerintah. Meniru Indonesia, dari beberapa laporan foto, pendemo membawa bendera One Piece dalam aksi.

“Kami ingin melihat perubahan. Orang lain telah mengalami ini, tetapi ini harus diakhiri oleh generasi kami,” katanya.

Ada beberapa kasus korupsi yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir, melibatkan menteri, mantan menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Sejak larangan tersebut, video yang membandingkan perjuangan rakyat Nepal biasa dengan anak-anak politisi yang memamerkan barang-barang mewah dan liburan mahal telah menjadi viral di TikTok.

“Ada gerakan-gerakan di luar negeri yang menentang korupsi, dan mereka khawatir hal itu juga akan terjadi di sini,” kata pengunjung rasa Bhumika Bharati.

Aksi keras polisi membubarkan demonstran membuat 19 orang tewas. Polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan ketika para demonstran menerobos kawat berduri dan mencoba menyerbu area terlarang di dekat gedung parlemen.

“Tujuh belas orang tewas,” ujar Shekhar Khanal, juru bicara kepolisian Lembah Kathmandu, kepada AFP.

Dua orang lainnya tewas di Distrik Sunsari di Nepal timur, lapor media lokal. Khanal mengatakan sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 polisi.

Beberapa saksi mengatakan mereka melakukan protes damai namun dibalas aparat dengan kekerasan. Dilaporkan bagaimana sirene meraung-raung di seluruh kota saat para korban luka dibawa ke rumah sakit.

“Saya berada di sana untuk

protes damai, tetapi pemerintah menggunakan kekerasan,” kata Iman Magar, 20 tahun, pendemo yang terkena tembakan di lengan kanannya.

“Itu bukan peluru karet, melainkan peluru logam, dan peluru itu melukai sebagian tangan saya. Dokter mengatakan saya perlu menjalani operasi,” ujarnya.

“Saya belum pernah melihat situasi yang begitu meresahkan di rumah sakit,” kata Ranjana Nepal, petugas informasi di Rumah Sakit Sipil, yang menerima banyak korban luka.

Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak mengundurkan diri dalam rapat kabinet mendadak. PBB menuntut penyelidikan yang cepat dan transparan atas kekerasan tersebut.

Berselang sehari, Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli juga mengundurkan diri. Ia memberi surat resmi ke Presiden Nepal.

“Saya telah mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri efektif mulai hari ini... untuk mengambil langkah lebih lanjut menuju solusi

politik dan penyelesaian masalah,” ujar politisi Partai Komunis itu.

Ketidakpuasan semakin meningkat dengan ketidakstabilan politik, korupsi, dan lambatnya pembangunan ekonomi di negara Himalaya berpenduduk 30 juta jiwa ini. Menurut statistik pemerintah, penduduk berusia 15-40 tahun mencakup hampir 43% dari populasi sementara tingkat pengangguran berkisar sekitar 10% dan PDB per kapita menurut Bank Dunia hanya US\$1.447 (sekitar Rp 23 juta).

Negara ini menjadi republik federal pada tahun 2008 setelah perang saudara selama satu dekade dan kesepakatan damai yang membawa kaum Maois ke dalam pemerintahan, serta penghapusan monarki.

Sejak saat itu, pergantian perdana menteri yang menua dan budaya tawar-menawar telah memicu persepsi publik bahwa pemerintah tidak peka ke kondisi masyarakat.

Parlemen & Rumah PM Dibakar-Menkeu Diarak

Di sisi lain kemarin, sejumlah video menunjukkan bagaimana

demonstran Nepal membakar parlemen pada hari Selasa saat PM Oli mengundurkan diri. Para demonstran membanjiri jalan-jalan ibu kota Kathmandu di mana beberapa bersuka cita dan merayakan, yang lain membakar gedung-gedung pemerintah dan mengacungkan senapan otomatis.

Pembakaran juga terjadi di rumah eks PM Oli. Bukan hanya itu, Menteri Keuangannya, Bishnu Prasad Paudel, juga dikejar di jalanan di Ibu Kota Kathmandu.

Video menunjukkan Paudel, 65 tahun, berlari di jalanan Kathmandu dengan puluhan orang dibelakangnya. Seorang pengunjung rasa muda dari arah berlawanan melompat dan menendang sang menteri hingga jatuh, yang membuatnya kehilangan keseimbangan dan menabrak tembok merah.

Video tersebut menunjukkan, menteri Nepal itu tidak membuang waktu dan langsung bangkit, lalu kembali berlari. Video terputus pada titik ini.

“Para pengunjung rasa, para pemimpin yang mereka percayai, dan tentara harus bersatu untuk

membuka jalan bagi pemerintahan sementara,” ujar pengacara konstitusi Dipendra Jha.

Analisis Crisis Group, Ashish Pradhan, sependapat dengan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa “pengaturan transisi sekarang perlu segera disusun dan melibatkan tokoh-tokoh yang masih memiliki kredibilitas di mata rakyat Nepal, terutama kaum muda negara ini”.

Balendra Shah, insinyur sekaligus rapper berusia 35 tahun yang terpilih sebagai wali kota Kathmandu pada tahun 2022, dan yang dipandang sebagai tokoh populer dalam transisi mendatang, menggunakan Facebook untuk menyerukan agar masyarakat “menahan diri”.

“Kami telah menegaskan: ini murni gerakan Gen Z,” tulis Shah setelah pengunduran diri Oli, merujuk pada anak muda yang sebagian besar berusia 20-an.

Diketahui, protes-protes keras yang dipicu oleh ketidakpuasan atas ketimpangan dan fasilitas mewah bagi anggota parlemen telah mengguncang Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Setahun yang lalu, pemberontakan rakyat yang dipimpin mahasiswa atas kuota pekerjaan menggulingkan pemimpin lama di Bangladesh.

Demo Malaysia, Desak PM Mundur Karena Gagal Realisasikan Janji

Ribuan warga Malaysia turun ke jalan di Kuala Lumpur, menuntut Perdana Menteri Anwar Ibrahim mundur dari jabatannya.

Aksi ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian publik terhadap lonjakan biaya hidup serta tuduhan bahwa Anwar gagal merealisasikan janji reformasinya.





Para demonstran, mayoritas mengenakan kaus dan ikat kepala hitam bertulisan “Turun Anwar”, melakukan perjalanan panjang melintasi pusat kota sebelum berkumpul di Lapangan Merdeka.

Polisi memperkirakan sebanyak 18 ribu orang hadir dalam menunjukkan opini tersebut.

Anwar, yang mengambil alih kekuasaan pada November 2022 dengan membawa misi reformasi, dikritik atas kebijakan yang dinilai membebani rakyat.

Beberapa di antaranya termasuk perluasan pajak penjualan dan jasa, serta penyesuaian subsidi yang dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga barang.

Pekan ini, Anwar mengumumkan bantuan tunai, peningkatan bantuan untuk rumah tangga miskin, serta janji untuk menurunkan harga bahan bakar sebagai upaya meredam keresahan masyarakat. Namun, protes tetap berlangsung.

Seorang pengunjung rasa, Nur Shahirah Leman (23), yang termasuk

dalam kelompok mahasiswa Islam, menyatakan kekhawatiran bahwa kebijakan pajak baru dan tarif listrik yang lebih tinggi bagi pelaku usaha besar akan berdampak langsung pada masyarakat.

“Pajak ini dibebankan kepada produsen, otomatis akan memengaruhi harga makanan,” kata Shahirah.

Selain isu ekonomi, Anwar juga diserang kritik soal dugaan campur tangan dalam urusan peradilan serta komitmen pemberantasan korupsi yang dipertanyakan.

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan tokoh dekat pemerintah dihentikan oleh jaksa, ditambah dengan penundaan penunjukan hakim agung, menambah sorotan terhadap jaksa pemerintahannya.

Anwar sendiri membantah tuduhan telah mencampuri proses hukum.

Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang baru saja genap berusia 100 tahun turut hadir dalam aksi tersebut.

Ia menuduh Anwar menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan lawan politiknya.

“Mereka yang tidak bersalah dituntut, yang bersalah dibebaskan,” ujar Mahathir di hadapan massa.

Mahathir dan Anwar dikenal sebagai rival politik sejak lama.

Meski sempat berdamai dan bersama-sama menggulingkan koalisi Barisan Nasional pada 2018, aliansi mereka hanya bertahan kurang dari dua tahun akibat konflik internal.

Filipina Membara Karena Proyek Pengendalian Banjir

Sejumlah mahasiswa dan organisasi masyarakat Filipina menggelar demo massal selama satu pekan, mulai hari Senin 15 September sampai Minggu 21 September 2025.

Aksi demo sepekan di Filipinan dipicu oleh skandal kasus korupsi proyek pengendalian banjir. Para pengunjung rasa tersebut berasal dari elemen yang bervariasi, mulai dari pebisnis, pemimpin gereja hingga pensiunan militer.

Dalam tiga tahun terakhir, Filipina telah menggunakan dana untuk proyek mitigasi bencana banjir kisaran 545 miliar peso. Kendati begitu, beberapa proyek diklaim tak memenuhi standar dan tidak ada dalam laporan.

Adapun unjuk rasa dilakukan dengan formasi atau skala kecil. Mengutip laporan Inquirer News, demo pertama tanggal 15 September 2025 dilakukan di Philippines University.

Pada 16 September, ada pula aksi demonstrasi oleh pihak Universitas Politeknik Filipina bertajuk “Protes Senin Hitam”. Dilanjutkan dengan demo mogok transportasi secara

nasional mulai 17-19 September.

Selain itu, terdapat pula gelaran rapat umum rakyat Laban di Katiwalian (18/9), pemogokan transportasi piston (19/9), dan protes kepada DPWH Kota Quezon (20/9) mendatang. Adapun puncak massa membludaknya dispekulasikan terjadi pada Minggu (21/9) nanti.

Aksi tanggal 21 mendatang akan berbarengan dengan protes masyarakat tentang deklarasi darurat militer Filipina tahun 1972. Masyarakat akan hadir di Taman Rizal untuk menggelar aksi demo massal besar-besaran tersebut.

Marcos selaku pemimpin negara sudah memberikan respons terkait permasalahan korupsi tersebut. Bahkan, sudah merencanakan aksi penyelidikan terhadap persoalan yang berimbas demo ini.

Mengutip laporan AP News, Marcos telah mengungkapkan kasus korupsi tersebut melalui pidato tahunan kenegaraan bulan Juli lalu. Dalam rencana penyidikan kasus penyelewengan dana itu, ia berjanji untuk tak pandang bulu.

Presiden Filipina ini sudah menunjuk Andres Reyes, Eks Hakim Mahkamah Agung, sebagai kepala badan investigasi kasusnya. Beberapa nama Dewan Perwakilan Rakyat, Senat, dan legislator sudah masuk dalam daftar terduga.

Tepatnya pada pekan lalu, sejumlah pihak konstruksi telah menduga 30 anggota DPR dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Filipina terlibat. Mereka diklaim telah mendapatkan uang tunai.

Kendati demo Filipina belum mencapai titik kerusuhan, pemerintahannya tetap berusaha menjaga perdamaian di lokasi demonstrasi. Seperti dilansir



Philippine News Agency, Marcos memberikan peringatan khusus kepada para demonstran yang ingin bikin ricuh. Kepolisian akan ikut dilibatkan untuk menertibkan mereka.

Demo Timor Leste, UU Dana Pensiun Batal

Pemerintah Timor Leste membatalkan undang-undang dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga presiden dan perdana menteri buntut demo besar-besaran beberapa waktu lalu.

Parlemen Timor Leste pada 26 September menggelar pemungutan suara guna membatalkan undang-undang yang memberikan pejabat negara gaji seumur hidup tersebut.

“Teruntuk mahasiswa, permintaan kalian telah dituruti. Tolong hentikan demonstrasi,” kata anggota parlemen dari Partai Khunto, Olinda Guterres, seperti dikutip AFP.

Demonstrasi pecah di ibu kota Dili dengan ribuan orang menuntut parlemen membatalkan rencana pengadaan mobil mewah untuk seluruh anggota DPR.

Timor Leste tahun lalu menyetujui rencana anggaran US\$4,2 juta (sekitar Rp70,3 miliar) untuk pembelian Toyota Prado SUV bagi 65 anggota DPR.

Masyarakat Timor Leste tak setuju dan menggelar protes besar-besaran guna menghentikan hal ini. Timor Leste adalah negara yang lebih dari 40 persen populasinya hidup dalam kemiskinan.

Demonstrasi yang terjadi selama dua hari berturut itu kemudian meluas, dengan masyarakat mulai mengkritik gaji seumur hidup pejabat negara.

Di bawah undang-undang tahun 2006, anggota parlemen, menteri, presiden, hingga perdana menteri berhak mendapatkan gaji pensiun yang besarnya setara dengan gaji mereka saat masih menjabat.

Undang-undang pensiun ini kini telah dibatalkan buntut didemo warga. Pembatalan ini dilakukan dengan menerbitkan undang-undang baru yang akan diserahkan kepada Presiden Jose Ramos Horta untuk disahkan.



FASE PERTAMA PERDAMAIAN, BABAK BARU DI TENGAH PUING GAZA

Setelah dua tahun berperang, pada Rabu (8/10/2025) waktu Mesir atau Kamis (9/10/2025) WIB, perundingan Hamas-Israel di Sharm El Sheikh mencapai kesepakatan atas rencana fase pertama untuk mengakhiri perang. Semua pihak menyambut baik kesepakatan itu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan meluapkan kegembiraannya dengan pencapaian itu. Di *Truth Social*, ia menulis, "Israel dan Hamas telah menandatangani

tahap pertama rencana perdamaian kami. Hal ini berarti semua sandera akan segera dibebaskan dan Israel akan menarik pasukan mereka ke garis yang disepakati sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, awet, dan abadi. Semua pihak akan diperlakukan secara adil!"

Babak Baru di Tengah Puing Gaza

Langit Gaza untuk pertama kalinya tampak lebih tenang pada pertengahan Januari 2025. Setelah berbulan-bulan dilanda serangan

udara dan pertempuran darat, suara ledakan nyaris menghilang. Di antara reruntuhan bangunan, warga mulai keluar dari tempat perlindungan, menyambut kedatangan truk-truk bantuan kemanusiaan. Semua terjadi setelah Israel dan Hamas akhirnya menyetujui sebuah kesepakatan bersejarah: Perjanjian Tiga Fase Gencatan Senjata dan Pertukaran Tawanan, dengan tahap pertama dimulai pada 19 Januari 2025.

Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi panjang yang dimediasi

oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, setelah konflik besar meletus akibat serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera. Balasan militer Israel kemudian menghantam Gaza tanpa henti, menewaskan lebih dari 30 ribu warga Palestina menurut data Kementerian Kesehatan Gaza.

Kini, dunia menatap harapan baru: apakah fase pertama perdamaian ini dapat berjalan tanpa runtuh seperti upaya-upaya sebelumnya?

Isi Kesepakatan Fase Pertama

Perjanjian gencatan senjata ini dibagi ke dalam tiga fase besar. Fase pertama—yang disebut sebagai masa *uji kepercayaan* dirancang berlangsung selama 42 hari. Intinya mencakup penghentian pertempuran, penarikan pasukan Israel dari area padat penduduk, pembebasan sandera oleh Hamas, dan pertukaran tahanan oleh Israel.



Berikut garis besar isi perjanjian tersebut:

- **Gencatan Senjata dan Penarikan Pasukan**

Israel wajib menghentikan operasi militer ofensif, termasuk serangan udara, dan menarik pasukannya dari wilayah permukiman besar di Gaza. Pasukan ditempatkan di pinggiran utara dan selatan, sementara pengawasan udara dibatasi hanya pada beberapa jam tertentu setiap harinya. Ini untuk memungkinkan distribusi bantuan kemanusiaan berlangsung aman.

Di sisi lain, Hamas berjanji menghentikan peluncuran roket dan serangan lintas batas ke wilayah Israel.

- **Pertukaran Tawanan dan Sandera**

Hamas sepakat membebaskan 33 sandera Israel, termasuk anak-anak, perempuan, lansia, serta warga yang sakit atau terluka. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sekitar 1.800 hingga 1.900 tahanan Palestina, sebagian besar adalah tahanan politik, remaja, dan perempuan. Mekanisme pertukaran dilakukan bertahap, dengan prioritas pada kelompok rentan. Setiap pembebasan disaksikan oleh perwakilan Qatar dan Palang Merah Internasional.

- **Akses Bantuan Kemanusiaan dan Pemulangan Pengungsi**

Salah satu poin terpenting dalam perjanjian adalah pembukaan kembali jalur bantuan kemanusiaan. Truk-truk dari Mesir diizinkan masuk ke Gaza melalui perbatasan Rafah dan Kerem Shalom membawa makanan, obat-obatan, serta bahan bakar. Warga Palestina yang mengungsi di selatan Gaza diperbolehkan kembali ke rumah mereka di utara, meski banyak rumah telah hancur.

- **Kontrol Keamanan Israel**

Meski menarik pasukan dari wilayah padat, Israel tetap mempertahankan kontrol di beberapa koridor keamanan, termasuk jalur Philadelphi di perbatasan dengan Mesir. Pemerintah Israel menilai hal ini penting untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza.

Fase pertama ini tidak hanya diuji oleh kesepakatan di atas kertas, tapi juga oleh ketidakpercayaan mendalam yang telah menumpuk selama puluhan tahun konflik.

- **Diplomasi Sunyi di Doha dan Kairo**

Negosiasi menuju kesepakatan ini berlangsung jauh dari sorotan publik. Di Doha dan Kairo, diplomat dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat melakukan shuttle diplomacy yang melelahkan selama berbulan-bulan. Setiap poin perjanjian dibahas secara detail, mulai dari jumlah sandera, rute bantuan, hingga urutan pembebasan.

“Ini bukan sekadar perjanjian teknis, tapi uji moral bagi dua pihak yang saling menaruh luka mendalam,” ujar Martin Griffiths, pejabat PBB bidang kemanusiaan, dalam wawancara dengan *Al Jazeera*.

Menurutnya, fase pertama adalah

“langkah kecil namun paling krusial” karena jika berhasil, dunia memiliki dasar untuk menuntun kedua pihak menuju rekonstruksi dan perdamaian permanen.

Bagi Amerika Serikat, keberhasilan ini juga penting secara



Martin Griffiths

politik. Pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi tekanan domestik untuk menghentikan penderitaan di Gaza, sekaligus memastikan Israel tetap dalam orbit sekutunya.

Sementara itu, Qatar kembali tampil sebagai pemain diplomasi kunci di Timur Tengah, dengan reputasi sebagai mediator yang dipercaya baik oleh Barat maupun kelompok Islamis.

Kisah dari Lapangan: Nafas Baru di Tengah Abu

Di distrik Zeitoun, Gaza City, **Mahmoud al-Kurd**, seorang guru, untuk pertama kalinya bisa keluar dari ruang bawah tanah tempat ia bersembunyi bersama keluarganya selama dua bulan.

“Anak-anak saya tidak percaya ketika mendengar pesawat berhenti terbang,” ujarnya kepada *Reuters*. “Kami tahu ini mungkin hanya sementara, tapi setidaknya malam ini kami bisa tidur tanpa ledakan.”

Seiring dimulainya fase pertama, konvoi bantuan mulai mengalir. Organisasi seperti UNRWA dan Palang Merah melaporkan bahwa lebih dari 300 truk bantuan berhasil memasuki Gaza dalam minggu pertama. Rumah

sakit-rumah sakit yang hancur mulai menerima pasokan obat-obatan dan bahan bakar.

Namun, di balik kelegaan itu, masih ada rasa cemas. Banyak warga khawatir gencatan senjata bisa berakhir sewaktu-waktu. “Kami sudah terlalu sering diberi janji damai yang tak bertahan lama,” kata Rania Abu Salem, seorang perawat di Khan Younis.

Bayang-Bayang Ketidakpercayaan

Tak lama setelah perjanjian mulai berjalan, muncul tuding pelanggaran dari kedua pihak. Hamas menuduh Israel menunda penarikan pasukan dari beberapa area dan memperlambat masuknya bantuan ke Gaza utara. Israel membantah dan menuding Hamas berupaya menyembunyikan sandera di lokasi-lokasi tertentu.

“Ketidakpercayaan ini sudah melekat begitu dalam. Bahkan satu pelanggaran kecil bisa menjadi alasan untuk memutuskan seluruh proses,” ujar analis politik Timur Tengah, Ehud Yaari, kepada *The Jerusalem Post*.

Pada 2 Februari, Hamas sempat menunda pembebasan sekelompok sandera selama dua hari. Mereka menuduh Israel melanggar kesepakatan soal jumlah truk bantuan yang dijanjikan. Setelah mediasi tambahan dari Qatar, proses pembebasan kembali dilanjutkan.

Ujian Publik di Israel dan Palestina

Bagi Israel, fase pertama perjanjian ini menimbulkan dilema politik dalam negeri. Sebagian warga menyambut gembira kembalinya sandera, namun sebagian lain menilai pemerintah terlalu lunak terhadap Hamas.

Puluhan keluarga korban serangan 7 Oktober melakukan aksi di depan kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menuntut agar seluruh sandera dibebaskan sebelum gencatan senjata diperpanjang.

Sementara itu di Gaza, Hamas memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan bahwa mereka mampu “memaksa” Israel melakukan konsesi politik. Namun, kelompok ini juga menghadapi tekanan besar dari warga yang ingin segera pulang ke rumah dan memulai kehidupan normal.

“Tidak ada kemenangan di atas kehancuran,” ujar seorang warga di Rafah kepada media lokal *Palestine Chronicle*. “Kami hanya ingin hidup.”

Dampak Kemanusiaan dan Harapan Rekonstruksi

Fase pertama juga membuka peluang besar bagi masuknya bantuan internasional. PBB memperkirakan bahwa dalam enam minggu pertama, lebih dari 250 ribu warga Gaza berhasil menerima pasokan makanan dan air bersih. Namun, infrastruktur yang rusak membuat distribusi tidak merata.

“Fase ini adalah kesempatan emas untuk memetakan kembali Gaza,” kata Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA. “Jika kita bisa menjaga stabilitas hingga akhir fase pertama, dunia internasional dapat menyiapkan paket rekonstruksi yang nyata.”

Beberapa negara, termasuk Norwegia dan Jepang, telah menyatakan kesediaan mendukung pendanaan tahap rekonstruksi pasca-gencatan senjata. Namun, semua tergantung pada apakah Israel dan Hamas bisa menepati janji hingga fase kedua dimulai.



Menatap Fase Kedua

Menurut rancangan kesepakatan, fase kedua akan mencakup pembebasan seluruh sandera yang tersisa, penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, dan dimulainya proses politik menuju gencatan senjata permanen.

Namun, jalan ke sana masih panjang. Setelah 42 hari pertama berakhir pada 1 Maret 2025, belum ada kejelasan apakah kedua pihak akan segera melanjutkan ke fase berikutnya atau kembali ke medan perang.

Amerika Serikat dan Mesir mendorong agar kedua pihak memperpanjang masa tenang, sementara beberapa faksi keras di Israel menolak. Di sisi Hamas, beberapa pemimpin lapangan menilai gencatan senjata justru memberi waktu bagi Israel untuk mengatur ulang kekuatan militernya.

“Fase pertama hanyalah jembatan rapuh,” ujar analis konflik dari USIP, Daniel Kurtzer. “Jika tidak diperkuat dengan kepercayaan dan mekanisme pengawasan yang kuat, jembatan itu bisa runtuh kapan saja.”



António Guterres

Pelajaran dari Sejarah

Upaya damai antara Israel dan Palestina bukanlah hal baru. Dari *Oslo Accords* tahun 1993 hingga *Ceasefire Cairo* tahun 2014, semua berakhir dengan siklus yang sama: jeda singkat, kemudian kekerasan kembali meledak.

Namun, kali ini ada perbedaan: tekanan internasional jauh lebih besar, opini publik dunia menuntut penghentian kekerasan, dan kesadaran bahwa Gaza tidak bisa terus menjadi kuburan terbuka.

Bagi dunia Arab, keberhasilan

perjanjian ini akan menjadi simbol bahwa diplomasi—bukan senjata—masih punya tempat di kawasan yang lelah oleh perang. Bagi Barat, ini menjadi tolok ukur apakah komitmen kemanusiaan benar-benar lebih kuat dari kepentingan geopolitik.

Harapan di Tengah Abu

Menjelang akhir fase pertama, suasana Gaza masih penuh tanda tanya. Anak-anak mulai berani bermain di jalan, meski di antara puing-puing bangunan. Sekolah-sekolah darurat dibuka kembali, dan masjid kembali mengumandangkan azan di waktu subuh tanpa suara bom yang bersahutan.

“Tidak ada yang tahu apakah ini akan bertahan,” kata Iman al-Sheikh, seorang guru sukarelawan. “Tapi setiap jeda dalam perang adalah ruang kecil untuk berharap.”

Bagi sebagian besar warga Gaza dan Israel, fase pertama ini mungkin bukan akhir dari konflik. Namun setidaknya, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada ruang bagi napas damai—meski sementara.

Perdamaian, Satu Fase Sekaligus

Perjanjian Fase Pertama Israel-Hamas bukanlah jawaban akhir dari konflik yang sudah berusia 75 tahun. Tetapi, seperti dikatakan Sekjen PBB António Guterres, “Setiap langkah kecil menuju diamnya senjata adalah langkah besar menuju martabat manusia.”

Apakah gencatan senjata ini bisa bertahan, atau kembali berubah menjadi bara perang, masih menjadi misteri. Namun dunia kini tahu: perdamaian di Timur Tengah, sesulit apa pun, masih mungkin—asal kedua pihak berani menepati satu janji kecil, satu fase pada satu waktu.

SATELIT N5 UNTUK KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN TEKNOLOGI INDONESIA



Satelit Nusantara Lima (N5) sukses diluncurkan. Indonesia memasuki babak baru kemajuan teknologi untuk kepentingan rakyat.

Bangsa yang siap menghadapi kompetisi adalah bangsa yang berfikir menjadi bangsa yang besar. Keberhasilan dalam kompetisi di tingkat regional dan global tentunya harus dibarengi dengan bagaimana bangsa tersebut mempersiapkan secara serius kemajuan teknologinya.

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berikhtiar untuk menuju ke arah sana. Bentuk nyata yang dilakukan pemerintah dengan menghadirkan teknologi yang guna menunjang akses komunikasi yang mudah. Hal ini sangat penting dilakukan sebab Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Marauke.

Keberhasilan Indonesia meluncurkan Satelit Nusantara Lima (N5) pada 10 September 2025 pukul 08.56 WIB diharapkan menjadi pertanda Indonesia memasuki babak baru kemajuan teknologi komunikasi.

Satelit N5 itu diluncurkan dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. Satelit ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dengan dukungan Boeing dan roket Falcon 9 milik SpaceX.

Menghubungkan Tanpa Batas

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan bahwa Satelit N5 menjadi tonggak baru

dalam upaya pemerataan akses digital di seluruh nusantara.

Dia pun mengatakan kehadiran satelit ini dirancang untuk kepentingan rakyat. Hadirnya satelit ini menjadi jembatan yang mampu menghubungkan Indonesia tanpa batas.

Meutya mengatakan dengan hadirnya pemerataan akses digital ini sangat membantu anak-anak di seluruh Indonesia memiliki akses



Meutya Hafid

belajar yang sama. Selain itu, akan membantu para Usaha Masyarakat Kecil Menengah atau UMKM mampu bersaing dalam dunia digital.

“Satelit Nusantara Lima adalah jembatan yang menghubungkan Indonesia tanpa batas. Internet cepat bukan hanya soal teknologi, tapi soal kesempatan yang sama. Anak-anak di Maluku dan Papua akan punya akses belajar yang sama dengan anak-anak di Jakarta, pasien di pulau kecil bisa

konsultasi dengan dokter terbaik, dan UMKM kita bisa bersaing di dunia digital. Inilah makna pemerataan digital yang sesungguhnya,” kata Meutya.

Meutya menambahkan bahwa peluncuran N5 sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menekankan pentingnya kemandirian dan kedaulatan teknologi. Transformasi digital adalah program strategis agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Spesifikasi Satelit Nusantara Lima

Satelit yang diharapkan akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia ini ditempatkan pada slot orbit 113° Bujur Timur. Kapasitas yang dimiliki satelit kebanggaan bangsa ini mencapai 160 Gbps dan 101 spot beam Ka-band, satelit ini menjadi satelit komunikasi terbesar di Asia Tenggara.

Dikutip dari *detik.com* Satelit N5 ini menggunakan platform Boeing 702 MP dengan bobot sekitar 8 ton, satelit ini dirancang memiliki masa pakai lebih dari 15 tahun. Teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) yang dibawanya juga menjadikan satelit N5 sebagai satelit terkuat milik Indonesia di kawasan Asia.

Stasiun darat untuk mendukung pengoperasian satelit ini tersebar di tujuh wilayah, yakni Cikarang, Banjarmasin, Aceh, Bengkulu, Gresik, Kupang, dan Tarakan.

Kehadirannya akan membuka peluang lebih luas bagi pendidikan jarak jauh, layanan kesehatan digital, UMKM berbasis daring, hingga akses hiburan dan informasi bagi masyarakat di pelosok yang selama ini sulit terjangkau.



Nurul Arifin

Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan registrasi orbit, sekaligus menjaga kedaulatan nasional dalam pengelolaan satelit ini.

Peluncuran N5 menjadi tonggak sejarah baru setelah Palapa A1 pada 1976, Nusantara Satu pada 2019, dan SATRIA-1 pada 2023. Dengan N5, Indonesia menegaskan diri bukan hanya konsumen, tetapi juga pengelola teknologi satelit yang menghadirkan manfaat langsung bagi rakyat sekaligus memperkokoh posisi bangsa sebagai pusat konektivitas digital di kawasan Asia Pasifik.

Kontribusi Satelit N5 bagi Indonesia

Satelit Nusantara Lima (N5) merupakan salah satu proyek satelit komunikasi Indonesia yang diluncurkan untuk memperkuat infrastruktur telekomunikasi nasional.

Seperti arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto satelit ini diharapkan akan menjadikan bangsa Indonesia mandiri dan berdaulat dalam bidang teknologi.

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjelaskan beberapa manfaat penting dari satelit Nusantara Lima (N5) ini;

- 1. Mempercepat pemerataan internet hingga ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
- 2. Menopang transformasi digital nasional dan memperkuat ekonomi digital.
- 3. Menjadi simbol kemandirian satelit nasional, menjaga kedaulatan data dan ketahanan

Bidang	Kontribusi
Pendidikan	Menyediakan akses internet untuk pembelajaran jarak jauh (online learning) di daerah terpencil.
Kesehatan	Mendukung layanan kesehatan digital seperti telemedicine dan sistem informasi puskesmas.
Pertahanan dan keamanan	Mendukung sistem komunikasi untuk aparat pertahanan di wilayah perbatasan dan terluar.
Ekonomi Lokal	Meningkatkan akses pasar digital untuk pelaku usaha di pedesaan dan kepulauan.
Penanggulangan Bencana	Menyediakan komunikasi darurat di wilayah terdampak bencana alam.



komunikasi Indonesia.

4. Mengembalikan posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin satelit di Asia.

Selain itu, disampaikan pula terkait kontribusi dari Satelit Nusantara Lima bagi Indonesia juga ASEAN, yaitu:

1. Menyalurkan akses internet merata hingga ke pelosok desa, guna menunjang layanan pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM digital.
2. Memperluas jaringan konektivitas ke negara-negara tetangga, sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai hub konektivitas regional.
3. Memiliki kapasitas 160 Gbps, menjadikannya satelit komunikasi terbesar di kawasan ASEAN.
4. Menjadi pencapaian bersejarah berikutnya setelah peluncuran

Satelit Palapa A1 (1976), Satelit Nusantara Satu (2019), dan SATRIA-1 (2023).

Pemerataan Akses Digital

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi I memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan peluncuran Satelit Nusantara Lima (N5) pada 10 September 2025 di Cape Canaveral, Amerika Serikat.

Apresiasi ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin yang mengatakan bahwa hadirnya Satelit N5 ini menjadi momentum penting dalam mempercepat pemerataan akses internet.

Menurutnya hadirnya Satelit N5 bukan hanya sekadar dipandang sekadar kemajuan teknologi bangsa ini. Ada hal yang paling penting yakni untuk menjadi jembatan kesetaraan di seluruh wilayah Indonesia.

Ini merupakan salah satu implementasi dari sila ke-5 Pancasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirnya satelit N5 ini akan mempermudah seluruh anak bangsa dalam belajar. Tidak ada lagi kesulitan yang dialami anak-anak di pelosok negeri dalam mengakses internet. Tidak hanya dalam bidang Pendidikan, bidang yang lain juga akan mengalami manfaat dari satelit N5 ini.

“Peluncuran Satelit N5 adalah tonggak bersejarah. Ini bukan sekadar teknologi, tetapi jembatan kesetaraan. Anak-anak di Maluku dan Papua akan memiliki akses belajar yang setara dengan anak-anak di Jakarta. Pasien di pulau-pulau kecil dapat berkonsultasi dengan dokter terbaik, dan UMKM kita bisa menembus pasar global. Inilah makna sejati dari pemerataan

digital,” ujarnya.

Politisi Golkar ini juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian dan program pro rakyat yang telah dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam rapat kerja bersama Komdigi, KPI, Dewan Pers, dan KIP, ia menegaskan bahwa langkah-langkah strategis Komdigi bukan hanya sebatas pembangunan infrastruktur, melainkan juga investasi besar bagi masa depan bangsa.

“Komdigi telah menunjukkan kepemimpinan nyata dalam mendorong transformasi digital Indonesia. Mulai dari pemerataan konektivitas di wilayah timur, pembersihan ruang digital dari konten negatif, pemberantasan judi online, hingga pembangunan pusat data dan penyusunan peta jalan AI. Semua inisiatif ini mencerminkan komitmen untuk menghadirkan ruang digital yang aman, produktif, dan inklusif bagi seluruh rakyat,” ujar Nurul Arifin.

Dia juga memandang bahwa program Digital Talent Scholarship (DTS) yang menargetkan 100.000 lulusan ahli digital pada tahun 2025 sebagai investasi sumber daya manusia yang visioner.

Menurutnya, penguatan kapasitas digital generasi muda akan menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, melainkan juga produsen inovasi global.

“Kami di DPR RI mendukung penuh setiap langkah Komdigi untuk memastikan rakyat memiliki akses informasi dan layanan internet yang lebih cepat, luas, dan merata. Transformasi digital adalah fondasi kedaulatan bangsa di era baru, dan Komdigi telah berada di jalur yang benar untuk mewujudkannya,”



Aryo PS Djojohadikusumo

tegasnya.

Dorong Kemandirian Luar Angkasa Tanah Air

Peluncuran Satelit Nusantara 5 oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) menandai langkah penting dalam kemandirian luar angkasa Indonesia melibatkan partisipasi swasta dan bukan hanya BUMN.

Seperti disampaikan oleh Sekjen Asosiasi Antariksa Indonesia (Ariksa), Aryo PS Djojohadikusumo menyebutkan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki pengusaha Tanah Air. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian luar angkasa bukan hanya domain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

“Indonesia sebagai negara dengan tapak batas terbesar di area khatulistiwa, dengan teritori hak kedaulatan terbesar di khatulistiwa perlu berada di antariksa. Hari ini kita berbangga karena bertambah satu lagi armada satelit Indonesia. Ke depannya akan terus bertambah dan bukan hanya diluncurkan dari negara luar, tetapi juga dari Tanah Air,” kata Arto saat menghadiri

peluncuran Satelit Nusantara Lima (N5) di Florida, Amerika Serikat, Kamis (11/9/2025) waktu setempat atau Jumat (12/9/2025) pagi di Tanah Air seperti dilansir *Bisnis.com*.

Menurutnya dengan pencapaian baru ini, Ariksa akan memperjuangkan hadirnya kawasan bandar udara antariksa di Tanah Air ke depannya. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat mengembangkan Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida sebagai kawasan ekosistem luar angkasa. Sejumlah perusahaan swasta yang berlomba menembus tepi langit seperti Blue Origin milik Jeff Bezos hingga SpaceX milik Elon Musk memiliki markas pengembangan di kawasan tersebut.

Selanjutnya dia menekankan, kehadiran kawasan bandar udara antariksa selain meningkatkan perekonomian Indonesia juga akan menjadi sumber aspirasi dan inspirasi bagi anak-anak muda Tanah Air untuk mewujudkan mimpi menembus luar angkasa.

Sementara itu CEO PSN yang juga Ketua Umum Ariksa, Adi Rahman Adiwoso mengatakan bahwa kemandirian dalam penguasaan orbit adalah sebuah keharusan. Ia mengingatkan adanya kutipan dari film dokumenter *Wild Wild Space* (2024) yang sangat relevan bagi dunia antariksa.

“Whoever controls space, may very well control the future of humanity (Siapa pun yang menguasai teknologi antariksa, sangat mungkin akan menguasai masa depan umat manusia),” kata Adi dalam pernyataan terpisah.

Menurut sosok yang berpengalaman dalam industri luar angkasa sejak era pra-Satelit Palapa 1 atau sejak 1974 itu, Indonesia harus mempertahankan kemandirian atas

langitnya di sepanjang garis ekuator.

Dia menilai peluang hadirnya bandar udara antariksa di Biak, Papua sangat menjanjikan secara bisnis.

Dia mencontohkan, posisi Biak yang sangat dekat ke orbit ekuator



Adi Rahman Adiwoso



memungkinkan peningkatan signifikan. Tanpa investasi baru, roket India yang hanya mampu mengangkat muatan 600 kilo gram dapat ditingkatkan hingga 900 kilogram.

Selanjutnya dia menyebut, secara kasar, untuk pengiriman material 1 kilo gram ke luar angkasa dibutuhkan biaya sekitar US\$12.000. Dengan demikian, terdapat tambahan penghematan hingga US\$3,6 juta setiap peluncuran.

“Saya gak usah koreksi alat (roketnya). Itu mengurangi biaya sangat banyak. Belum lagi dari penghematan bahan bakar,” kata Adi dilansir *Bisnis.com*.

Dan dia juga menambahkan, dengan asumsi pengembangan bandar udara antariksa di Biak sebesar US\$50 juta, hanya dibutuhkan 15 kali peluncuran untuk mengembalikan modal investasi.

Sedangkan di sepanjang ekuator, dibutuhkan 50 hingga 70 satelit beroperasi secara berkesinambungan. Kawasan ini juga dihuni 12% penduduk bumi atau sekitar 1 miliar orang.

“Itu *legacy* (bandar udara Antariksa) akan memberikan Indonesia kemampuan sangat strategis,” tegasnya.



KRISIS BBM DI INDONESIA: DI BALIK KISRUH SHELL, VIVO, BP, DAN PEMERINTAH

Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, antrean kendaraan mengular di SPBU Pertamina menjadi pemandangan yang tak lazim namun semakin akrab. Sejak awal September 2025, masyarakat mulai merasakan dampak dari kelangkaan BBM non-subsidi yang melanda SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo. Keluhan

datang dari berbagai penjuru, mulai dari pengemudi ojek online hingga pemilik kendaraan pribadi. “Kenapa SPBU Shell kosong terus? Vivo juga tutup. Mau isi bensin jadi kayak berburu harta karun,” keluh Rina, seorang pengemudi ojek online yang biasa beroperasi di kawasan Sudirman.

Kekosongan pasokan BBM di SPBU swasta bukan sekadar gangguan

logistik. Ia mencerminkan ketegangan mendalam antara kebijakan energi nasional, kepentingan bisnis global, dan kebutuhan rakyat sehari-hari. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), segera merespons dengan menggelar pertemuan darurat bersama para pelaku usaha. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dikenal vokal dan tegas, menyampaikan

bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. “Kami tidak bisa membiarkan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal pelayanan publik,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

Pertemuan tersebut menghasilkan empat kesepakatan penting. Pertama, SPBU swasta sepakat untuk membeli base fuel dari Pertamina sebagai solusi pasokan jangka pendek. Kedua, dilakukan survei bersama untuk menentukan harga yang adil dan kompetitif. Ketiga, pemerintah menjamin stok BBM normal selama tujuh hari ke depan. Dan keempat, penyesuaian harga dilakukan secara transparan agar tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Namun, kesepakatan ini tidak bertahan lama. Ketika Shell dan BP mulai meninjau kandungan base fuel yang ditawarkan Pertamina, muncul kekhawatiran baru: etanol.

Base fuel, dalam konteks ini, adalah BBM murni sebelum dicampur dengan aditif seperti etanol. Pertamina menawarkan base fuel dengan kandungan etanol tertentu, sesuai dengan standar nasional. Namun, SPBU swasta mempertanyakan apakah campuran tersebut sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan pelanggan mereka. “Kami khawatir kandungan etanol tidak sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan pelanggan kami,” ujar salah satu eksekutif Shell yang enggan disebutkan namanya. Vivo dan BP, yang semula menyatakan akan membeli base fuel dari Pertamina, kemudian membatalkan rencana tersebut. Mereka menilai bahwa campuran etanol bisa menimbulkan masalah teknis dan citra merek.



Di sisi lain, masyarakat semakin terhimpit. Pengemudi ojek online, sopir angkot, dan pelaku UMKM terpaksa antri di SPBU Pertamina yang masih beroperasi normal. Harga BBM pun melonjak di beberapa wilayah, terutama untuk jenis non-subsidi. “Saya harus bangun jam 4 pagi cuma buat antri bensin. Kalau telat, bisa nggak narik seharian,” kata Dedi, pengemudi GrabCar di Bekasi. SPBU swasta mengalami penurunan volume penjualan drastis. Beberapa bahkan tutup sementara karena tidak ada pasokan. Di media sosial, tagar #BBMKosong dan #ShellTutup menjadi trending, menandakan keresahan publik yang meluas.

Menteri Bahlil pun kembali angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pasokan BBM adalah bagian dari kedaulatan energi nasional. Ia mendorong SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina demi kepentingan masyarakat. “Kalau mereka tidak mau beli dari dalam negeri, ya jangan salahkan kalau masyarakat marah,” tegasnya. Di tengah tekanan publik, Pertamina

menjadi satu-satunya penyedia BBM yang tetap beroperasi normal. Namun, banyak pihak menilai bahwa monopoli pasokan bisa berbahaya dalam jangka panjang. Ketergantungan pada satu penyedia, minimnya transparansi harga, dan kurangnya diversifikasi pasokan menjadi masalah struktural yang harus segera diatasi.

Krisis ini membuka tabir rapuhnya sistem distribusi BBM di Indonesia. Pemerintah perlu membuka peluang impor BBM oleh swasta dengan regulasi ketat. Publik harus tahu komponen harga BBM, termasuk biaya produksi dan distribusi. Regulasi soal kandungan etanol juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan konflik teknis. Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) harus lebih aktif dalam pengawasan dan mediasi antar pelaku usaha. Tanpa reformasi struktural, krisis semacam ini bisa terulang kembali.

Di lapangan, suara-suara masyarakat menjadi bukti nyata dampak sosial dari kebijakan energi. Artikel ini akan terus diperbarui



dengan kutipan dari pengemudi, pemilik SPBU, dan pejabat pemerintah. Narasi visual tentang antrean dan dampak sosial akan melengkapi laporan ini, bersama infografik tentang distribusi BBM dan perbandingan harga antar SPBU. Di balik angka dan kebijakan, ada cerita manusia yang perlu didengar.

Etanol, Mesin, dan Ketegangan yang Membara

Di balik kesepakatan awal antara pemerintah dan SPBU swasta, tersimpan satu isu teknis yang kemudian menjadi bara dalam sekam: kandungan etanol dalam base fuel yang ditawarkan oleh Pertamina. Secara teknis, etanol adalah aditif yang digunakan untuk meningkatkan oktan dan efisiensi pembakaran. Namun, tidak semua mesin kendaraan di Indonesia dirancang untuk menerima campuran etanol dalam kadar tinggi. Di sinilah letak persoalan yang memicu ketegangan baru.

Shell Indonesia, dalam pernyataan internal yang bocor ke media, menyampaikan kekhawatiran bahwa campuran etanol dalam base fuel Pertamina bisa menimbulkan

kerusakan pada mesin kendaraan tertentu. “Kami memiliki standar global yang harus kami patuhi. Campuran bahan bakar harus sesuai dengan spesifikasi mesin dan iklim lokal,” ujar seorang sumber internal Shell yang tidak ingin disebutkan namanya. Vivo dan BP pun mengambil sikap serupa. Mereka menilai bahwa ketidaksesuaian spesifikasi bisa merusak reputasi merek dan menimbulkan tuntutan dari konsumen.

Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, menanggapi dengan nada tegas. Menteri Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kandungan etanol dalam base fuel Pertamina telah melalui uji laboratorium dan sesuai dengan standar nasional. “Kalau mereka bilang tidak cocok, saya tanya: cocoknya di mana? Kita ini negara berdaulat. Jangan seenaknya menolak bahan bakar dalam negeri,” ujarnya dalam wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional.

Namun, di lapangan, kekhawatiran teknis bukan sekadar retorika. Beberapa bengkel otomotif di Jakarta dan Bandung melaporkan peningkatan keluhan dari pelanggan yang merasa performa

kendaraan mereka menurun setelah menggunakan BBM dengan campuran etanol tinggi. “Mesin jadi cepat panas, tarikan berat, dan konsumsi bahan bakar lebih boros,” kata Rudi, seorang mekanik senior di bilangan Cibubur. Ia menambahkan bahwa kendaraan keluaran lama lebih rentan terhadap perubahan komposisi bahan bakar.

Kondisi ini menempatkan SPBU swasta dalam dilema. Di satu sisi, mereka ingin tetap beroperasi dan melayani konsumen. Di sisi lain, mereka tidak ingin mengambil risiko teknis dan reputasi yang bisa berdampak jangka panjang. Akibatnya, banyak SPBU Shell, BP, dan Vivo memilih untuk mengurangi jam operasional atau bahkan tutup sementara. Di beberapa wilayah, seperti Tangerang dan Bekasi, SPBU swasta hanya buka beberapa jam dalam sehari, dan itu pun dengan stok terbatas.

Sementara itu, Pertamina terus memperluas distribusi dan menambah pasokan ke SPBU miliknya. Di media sosial, muncul narasi bahwa pemerintah sengaja “menggiring” konsumen ke Pertamina dengan membatasi pasokan ke SPBU swasta. Narasi ini dibantah oleh Kementerian ESDM, yang menyatakan bahwa semua pelaku usaha diberi kesempatan yang sama untuk membeli base fuel. “Kalau mereka tidak mau beli, itu pilihan mereka. Tapi jangan salahkan pemerintah kalau masyarakat beralih ke Pertamina,” ujar Bahlil.

Di tengah konflik ini, masyarakat menjadi korban utama. Konsumen tidak hanya kesulitan mendapatkan BBM, tetapi juga bingung memilih bahan bakar yang aman untuk kendaraan mereka. Ketidakjelasan

PEMERINTAH MINTA SPBU SWASTA KOLABORASI DENGAN PERTAMINA



GAMBARAN KONSUMSI BBM NASIONAL

**Total penjualan
SPBU Pertamina
Patra Niaga (2024)**
(Pertamin Patra Niaga)

105

Juta
Kiloliter



“

**Kenapa harus
Pertamina?**

Karena
Pertamina
adalah
representasi
negara. Kita
tidak bisa
menyerahkan
sepenuhnya hajat
hidup orang banyak
pada mekanisme
pasar.



Menteri ESDM
Bahlil Lahadalia

**Total distribusi
BBM (2023)**
(BPH Migas)

126,39

Juta
Kiloliter

PERBANDINGAN JUMLAH SPBU ANTAR OPERATOR



13.603

Pertamina

migas.esdm.go.id, Maret 2025)



186

Shell



166

BP/AKR



34

Vivo



informasi tentang kandungan etanol, spesifikasi mesin, dan dampak jangka panjang membuat publik merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. “Kami cuma bisa beli yang ada. Tapi kalau nanti mesin rusak, siapa yang tanggung jawab?” tanya Andi, seorang pemilik mobil keluarga di Bogor.

Kisruh etanol ini membuka pertanyaan mendasar tentang transparansi dan komunikasi publik dalam kebijakan energi. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka komposisi bahan bakar, dampaknya terhadap berbagai jenis kendaraan, dan standar uji yang digunakan. Tanpa itu, ketidakpercayaan akan terus tumbuh, dan SPBU swasta akan semakin enggan berpartisipasi dalam sistem distribusi nasional.

Dampak Sosial dan Ekonomi: Ketika BBM Menjadi Barang Langka

Di tengah ketegangan antara pemerintah dan SPBU swasta, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak. Krisis BBM bukan hanya soal antrean panjang dan stok yang menipis, tetapi juga

tentang bagaimana bahan bakar—yang selama ini dianggap sebagai kebutuhan dasar—berubah menjadi komoditas yang sulit dijangkau. Bagi pengemudi ojek online, sopir angkot, dan pelaku usaha kecil, kelangkaan BBM berarti ancaman langsung terhadap penghasilan harian.

Di kawasan Babelan, Bekasi, seorang pengemudi bernama Suryadi mengaku harus mengurangi jumlah order karena sulit mendapatkan bensin. “Biasanya saya bisa narik sampai malam. Sekarang jam 2 siang sudah berhenti karena bensin habis. SPBU Vivo tutup, Shell kosong, BP nggak jelas. Mau nggak mau ke Pertamina, tapi antreannya luar biasa,” ujarnya dengan nada lelah. Ia menambahkan bahwa penghasilan hariannya turun hampir 40 persen sejak krisis BBM melanda.

Kondisi serupa dialami oleh pelaku UMKM yang mengandalkan kendaraan untuk distribusi barang. Fitri, pemilik usaha katering rumahan di Jakarta Timur, mengaku harus membatalkan beberapa pesanan karena tidak bisa mengantarkan tepat waktu. “Saya pakai mobil sendiri untuk antar makanan. Tapi

kalau bensin susah, saya harus pilih-pilih order. Padahal pelanggan sudah bayar,” katanya. Ia juga khawatir reputasi usahanya akan menurun jika kondisi ini terus berlanjut.

Di sektor transportasi umum, sopir angkot dan bus kota mulai mengeluhkan penurunan jumlah penumpang akibat jadwal yang tidak menentu. Beberapa trayek bahkan terpaksa berhenti beroperasi sementara karena tidak ada jaminan pasokan BBM. “Kami nggak bisa jalan kalau bensin nggak ada. Pemerintah harusnya pikirin kami juga, bukan cuma SPBU besar,” ujar Pak Darto, sopir angkot trayek K-10 di Jakarta Selatan.

Krisis ini juga memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional. Di media sosial, banyak pengguna mempertanyakan mengapa SPBU swasta tidak diberi akses pasokan yang adil. Sebagian menilai bahwa pemerintah terlalu berpihak pada Pertamina, sementara pelaku usaha lain dibiarkan berjuang sendiri. “Kalau semua dipaksa beli dari Pertamina, itu namanya monopoli. Mana janji soal persaingan sehat?” tulis seorang pengguna Twitter dengan tagar #BBMKacau.

Di sisi lain, ada pula suara yang mendukung langkah pemerintah. Mereka menilai bahwa SPBU swasta terlalu bergantung pada impor dan tidak mau beradaptasi dengan bahan bakar lokal. “Kalau mau jual BBM di Indonesia, ya harus ikut aturan Indonesia. Jangan seenaknya,” tulis seorang pengguna Facebook dalam diskusi daring. Perdebatan ini menunjukkan bahwa krisis BBM telah menjadi isu yang melampaui urusan teknis—ia menyentuh rasa keadilan, kedaulatan, dan identitas

nasional.

Dalam konteks ini, pemerintah menghadapi tantangan besar: bagaimana menyeimbangkan kepentingan bisnis, kebutuhan rakyat, dan stabilitas energi nasional. Menteri Bahlil Lahadalia menyadari bahwa krisis ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi teknis. Ia mulai mengajak dialog terbuka dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kebijakan jangka panjang. “Kita harus duduk bersama. Ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana kita bisa membangun sistem energi yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya dalam forum diskusi publik di Bandung.

Namun, dialog saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata. Mereka ingin jaminan bahwa BBM akan tersedia tanpa harus antri berjam-jam. Mereka ingin kepastian bahwa kendaraan mereka tidak akan rusak karena bahan bakar yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, mereka ingin dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa itu, kebijakan energi akan selalu dianggap sebagai urusan elite yang jauh dari kehidupan sehari-hari.

Narasi Publik dan Kedaulatan Energi: Siapa yang Mengendalikan Cerita?

Di era digital, krisis tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang narasi. Ketika SPBU swasta mulai tutup dan antrian di Pertamina mengular, media massa dan media sosial berlomba-lomba membongkar peristiwa ini. Beberapa media nasional menyoroti ketegasan pemerintah dalam menjaga pasokan energi, sementara lainnya mengangkat suara pelaku usaha

yang merasa ditekan oleh regulasi yang berubah-ubah. Di Twitter, tagar seperti #BBMKacau, #ShellTutup, dan #PertaminaMenang menjadi medan pertempuran opini.

Narasi yang berkembang tidak selalu sejalan dengan fakta teknis. Banyak pengguna media sosial yang menyimpulkan bahwa pemerintah sengaja mematikan SPBU swasta demi memperkuat dominasi Pertamina. Sebaliknya, ada pula yang menilai bahwa SPBU swasta terlalu manja dan tidak mau beradaptasi dengan bahan bakar lokal. Di tengah polarisasi ini, suara masyarakat biasa sering kali tenggelam. Mereka yang antri berjam-jam, yang kehilangan penghasilan, yang bingung memilih bahan bakar—jarang mendapat ruang dalam pemberitaan utama.

Media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang kedaulatan energi. Ketika Menteri Bahlil menyatakan bahwa “ini soal kedaulatan,” sebagian media mengangkatnya sebagai simbol ketegasan nasional. Namun, makna kedaulatan itu sendiri menjadi kabur. Apakah kedaulatan berarti semua harus tunduk pada satu penyedia? Ataukah kedaulatan berarti membuka ruang bagi berbagai pelaku usaha untuk berkontribusi dalam sistem energi nasional?

Di sinilah pentingnya narasi yang inklusif dan berbasis pengalaman nyata. Beberapa jurnalis independen mulai mengangkat cerita dari lapangan—pengemudi yang kehilangan penghasilan, pemilik SPBU yang bingung dengan regulasi, dan konsumen yang merasa tidak punya pilihan. Narasi-narasi ini menunjukkan bahwa krisis BBM bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal kepercayaan, komunikasi,

dan rasa keadilan.

Dalam sebuah diskusi publik yang digelar oleh LIPI dan Universitas Indonesia, muncul gagasan bahwa kebijakan energi harus didesain dengan pendekatan naratif. Artinya, kebijakan tidak hanya berbasis angka dan regulasi, tetapi juga mendengarkan cerita dari masyarakat. “Kalau kita bicara energi, kita harus bicara tentang kehidupan. Tentang bagaimana orang bekerja, bergerak, dan bermimpi,” ujar Dr. Ratri, peneliti kebijakan publik yang menjadi pembicara utama.

Krisis BBM ini menjadi cermin dari bagaimana negara berkomunikasi dengan warganya. Ketika kebijakan berubah tiba-tiba, ketika informasi teknis tidak dijelaskan dengan baik, ketika pelaku usaha merasa tidak dilibatkan—maka yang muncul adalah ketidakpercayaan. Dan dalam konteks energi, ketidakpercayaan bisa berujung pada ketidakstabilan.

Namun, di balik semua itu, ada peluang besar. Jika pemerintah mampu membangun narasi yang jujur, transparan, dan inklusif, maka krisis ini bisa menjadi titik balik. Titik di mana masyarakat mulai memahami kompleksitas sistem energi, dan pelaku usaha mulai melihat peran mereka dalam membangun kedaulatan bersama. Titik di mana BBM bukan hanya soal harga dan pasokan, tetapi juga soal siapa yang punya suara dalam menentukan arah bangsa.

Dari Krisis ke Kesempatan—Menata Ulang Energi Nasional

Kisruh BBM yang melibatkan Shell, Vivo, BP, dan pemerintah Indonesia bukan sekadar episode sementara dalam sejarah distribusi energi. Ia adalah cermin dari sistem



yang belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas zaman. Ketika SPBU swasta kesulitan mendapatkan pasokan, ketika masyarakat harus antri berjam-jam, dan ketika kebijakan berubah tanpa komunikasi yang memadai—maka yang terguncang bukan hanya pasokan, tetapi juga kepercayaan publik.

Di satu sisi, pemerintah menunjukkan ketegasan dalam menjaga kedaulatan energi. Menteri Bahlil Lahadalia tampil sebagai figur yang berani mengambil keputusan cepat, meski tidak selalu populer. Ia menegaskan bahwa BBM bukan hanya komoditas, tetapi juga simbol kemandirian nasional. “Kalau kita terus bergantung pada impor, kita tidak akan pernah berdaulat. Kita harus bangun sistem sendiri,” ujarnya dalam wawancara terakhirnya.

Namun, di sisi lain, pelaku usaha swasta merasa dipinggirkan. Mereka menilai bahwa regulasi yang berubah-ubah dan tekanan untuk membeli dari satu penyedia menghambat inovasi dan persaingan sehat. Shell, BP, dan Vivo bukan hanya merek global, tetapi juga bagian dari

ekosistem energi yang selama ini membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika mereka mundur, yang hilang bukan hanya pasokan, tetapi juga pilihan.

Masyarakat berada di tengah pusaran ini. Mereka tidak peduli siapa yang memasok BBM, selama bahan bakar tersedia, aman, dan terjangkau. Mereka ingin sistem yang transparan, di mana harga tidak naik tiba-tiba, dan kualitas tidak diragukan. Mereka ingin dilibatkan, bukan hanya diberi instruksi. Dan yang paling penting, mereka ingin kebijakan yang berpihak pada kehidupan nyata—bukan hanya angka dan grafik.

Krisis ini membuka peluang besar untuk menata ulang sistem energi nasional. Pemerintah bisa memulai dengan membangun mekanisme komunikasi publik yang lebih terbuka. Setiap perubahan kebijakan harus disertai penjelasan yang mudah dipahami, dengan ruang dialog yang melibatkan konsumen, pelaku usaha, dan akademisi. Transparansi bukan ancaman, melainkan fondasi kepercayaan.

Selain itu, diversifikasi

pasokan harus menjadi prioritas. Ketergantungan pada satu penyedia, meski milik negara, berisiko tinggi dalam jangka panjang. Pemerintah perlu membuka ruang bagi pelaku usaha lain untuk berkontribusi, dengan regulasi yang adil dan pengawasan yang ketat. Standarisasi bahan bakar, termasuk kandungan etanol, harus ditetapkan secara nasional dan diuji secara independen.

BPH Migas dan Kementerian ESDM perlu memperkuat kapasitasnya sebagai mediator dan pengawas. Mereka bukan hanya regulator, tetapi juga penjaga keseimbangan antara kepentingan negara, bisnis, dan rakyat. Dalam dunia yang semakin kompleks, peran mereka harus lebih proaktif dan adaptif.

Dan akhirnya, narasi publik harus berubah. Energi bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal cerita. Cerita tentang pengemudi yang bangun pagi demi antri bensin. Cerita tentang pemilik SPBU yang bingung menghadapi regulasi. Cerita tentang warga yang ingin tahu, ingin terlibat, dan ingin dihargai. Jika kebijakan energi mampu merangkul cerita-cerita ini, maka kita tidak hanya membangun sistem yang kuat, tetapi juga bangsa yang percaya pada dirinya sendiri.

Kisruh BBM ini mungkin akan berlalu. SPBU akan kembali buka, antrian akan berkurang, dan pasokan akan stabil. Tapi jika kita tidak belajar dari krisis ini, maka ia akan datang kembali—dengan wajah yang berbeda, tetapi luka yang sama. Maka mari kita jadikan krisis ini sebagai titik balik. Titik di mana kita berhenti menyalahkan, dan mulai membangun. Titik di mana energi bukan hanya soal bahan bakar, tetapi juga tentang harapan.

OPERATOR BBM SWASTA URUNG BELI DARI PERTAMINA



**Pertamina impor
100.000 barel base
fuel untuk suplai
SPBU swasta**

VIVO

Sepakat membeli 40.000
(26 September 2025)



**30 September
2025**

Kesepakatan tidak
dilanjutkan karena uji
laboratorium mendapati
kandungan etanol **3,5%**
pada fuel base

BP-AKR

Diklaim menyatakan
minat untuk membeli
(jumlah tidak disebutkan)



Shell

Tidak melanjutkan
pembicaraan kerja sama



"Sampai saat ini, kami hanya menjual diesel. Untuk BBM jenis bensin bisa dikatakan hampir seluruh SPBU kami sudah mengalami situasi kehabisan stok. Saat ini yang ada mungkin tidak sampai 10, hanya sekitar 5 SPBU, yang kalau kami melihat besok malam (2 Oktober) mungkin juga sudah habis."

**Presiden Direktur Shell Indonesia,
Ingrid Siburian**

"Vivo kita punya 44 SPBU, semuanya di Jabodetabek. Kita punya 600 karyawan, Dan saat ini tinggal RON 92 yang akan habis di pertengahan Oktober, yang RON 90 sama 95 sudah habis."

**Direktur Vivo Energy
Indonesia Leonard
Mamahit**

"Saat ini hanya tinggal mungkin sekitar 1-2 SPBU kami saja yang masih menjual BBM gasoline atau bensin. Mungkin sampai akhir bulan ini (Oktober)."

**Presiden Direktur
BP-AKR, Vanda
Laura**



SATU TAHUN KEMENDIKDASMEN:

MENENUN ARAH ASTA CITA PRESIDEN DALAM PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menapaki perjalanan yang tidak hanya administratif, tetapi juga ideologis dan emosional. Di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu'ti, kementerian ini tidak sekadar

menjalankan program, melainkan menafsirkan dan mewujudkan cita-cita besar Presiden yang tertuang dalam Asta Cita—delapan arah kebijakan strategis yang menjadi kompas pembangunan nasional. Di antara delapan cita tersebut, cita keempat menjadi landasan utama: “Mewujudkan masyarakat Indonesia

yang berpendidikan dan berbudaya.”

Namun, pendidikan bukan sekadar angka partisipasi sekolah atau jumlah gedung yang dibangun. Pendidikan adalah ruang hidup, tempat anak-anak membentuk cara pandang, guru menanamkan nilai, dan masyarakat menaruh harapan. Maka, ketika Kemendikdasmen

menyatakan komitmennya untuk mewujudkan “pendidikan bermutu untuk semua,” itu bukan sekadar slogan, melainkan janji untuk menjangkau yang terpinggirkan, memperkuat yang sudah berjalan, dan mengubah yang belum adil.

Dalam refleksi satu tahun ini, terlihat bagaimana kementerian bergerak dari kebijakan ke praktik, dari rencana ke dampak nyata. Terlihat bagaimana arah Asta Cita diterjemahkan ke dalam ribuan ruang kelas, jutaan interaksi pembelajaran, dan puluhan ribu guru yang kini merasa lebih dihargai dan didukung. Terlihat bagaimana pendidikan menjadi alat pemersatu bangsa, bukan hanya dalam kurikulum, tetapi dalam pengalaman belajar yang inklusif, relevan, dan bermakna.

Salah satu capaian paling menonjol adalah revitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan anggaran sebesar Rp 16,9 triliun, Kemendikdasmen tidak hanya memperbaiki infrastruktur fisik, tetapi juga memperbarui pendekatan pedagogis, memperkuat kurikulum, dan memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan inspiratif bagi peserta didik. Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan, tetapi soal membangun harapan baru—bahwa anak-anak di pelosok Papua, pesisir Kalimantan, dan pegunungan Sumatra memiliki hak yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang bermutu.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi guru menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Guru bukan hanya pelaksana kurikulum, tetapi pemimpin pembelajaran. Maka, Kemendikdasmen meluncurkan berbagai program pelatihan

berbasis praktik baik, memperkuat komunitas belajar, dan membuka ruang bagi guru untuk saling berbagi, berefleksi, dan berkembang. Dalam satu tahun terakhir, ribuan guru mengikuti pelatihan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat nilai-nilai profesionalisme, empati, dan inovasi. Guru-guru di daerah terpencil kini memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber belajar digital, mentoring, dan dukungan psikososial.

Kemendikdasmen juga menunjukkan komitmen kuat terhadap pendidikan inklusif. Dalam konteks Asta Cita, inklusi bukan hanya soal menerima anak berkebutuhan khusus, tetapi soal memastikan bahwa setiap anak—tanpa memandang latar belakang ekonomi, geografis, atau sosial—memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Program perluasan akses pendidikan digital, penyediaan perangkat belajar, dan penguatan literasi digital menjadi langkah konkret untuk menjembatani kesenjangan. Di banyak daerah, anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses internet kini bisa belajar melalui platform daring, modul cetak, atau siaran radio pendidikan.

Tak kalah penting, Kemendikdasmen juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui Taklimat Media Setahun Pendidikan Bermutu untuk Semua, kementerian membuka ruang dialog dengan masyarakat, menjelaskan capaian, tantangan, dan rencana ke depan. Ini bukan sekadar laporan kinerja, tetapi bentuk penghormatan terhadap hak publik untuk tahu, menilai, dan berpartisipasi. Dalam

taklimat tersebut, Menteri Mu’ti menyampaikan dengan lugas, “Kami baru memulai pelaksanaan kebijakan Bapak Presiden di tahun pertama ini, dan Alhamdulillah capaian yang telah dilakukan sudah sesuai dengan arah kebijakan nasional pendidikan bermutu untuk semua.”

Pernyataan tersebut mencerminkan kesadaran bahwa pendidikan adalah proses jangka panjang, dan bahwa satu tahun pertama adalah fondasi untuk perubahan yang lebih besar. Namun, fondasi itu harus kokoh, adil, dan berorientasi pada dampak nyata. Maka, Kemendikdasmen tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi turun ke lapangan, mendengar suara guru, siswa, dan orang tua. Mereka mengunjungi sekolah-sekolah yang rusak, berbincang dengan kepala sekolah yang berjuang tanpa anggaran, dan mendengarkan cerita anak-anak yang belajar di bawah pohon karena belum ada ruang kelas.

Dalam proses tersebut, kementerian juga belajar bahwa kebijakan yang baik harus fleksibel, kontekstual, dan berbasis data. Maka, penguatan sistem pendataan pendidikan menjadi prioritas. Dengan data yang akurat, Kemendikdasmen bisa merancang intervensi yang tepat, mengalokasikan anggaran secara adil, dan memantau dampak secara berkelanjutan. Sistem pendataan ini juga menjadi alat untuk memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal, tidak ada guru yang terabaikan, dan tidak ada sekolah yang luput dari perhatian.

Di tengah semua capaian ini, tantangan tetap ada. Kesenjangan antarwilayah, keterbatasan anggaran, dan resistensi terhadap perubahan adalah realitas yang

harus dihadapi. Namun, satu tahun pertama menunjukkan bahwa dengan komitmen, kolaborasi, dan keberanian untuk berinovasi, tantangan tersebut bisa diubah menjadi peluang. Kemendikdasmen tidak bekerja sendiri, tetapi bersama pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan komunitas pendidikan. Kolaborasi ini menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Lebih dari itu, satu tahun terakhir juga menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya urusan kementerian, tetapi urusan bangsa. Ketika seorang guru di Nusa Tenggara Timur berhasil mengembangkan metode pembelajaran kontekstual yang membuat anak-anak lebih aktif, itu adalah kemenangan bangsa. Ketika seorang siswa di Aceh berhasil menulis puisi tentang perdamaian dan membacanya di depan kelas, itu adalah harapan bangsa. Ketika sebuah sekolah di Kalimantan berhasil membangun perpustakaan dari sumbangan masyarakat, itu adalah semangat bangsa.

Dalam refleksi ini, tidak hanya terlihat angka dan program, tetapi juga wajah-wajah yang menjadi saksi perubahan. Wajah guru yang tersenyum karena akhirnya mendapat pelatihan yang relevan. Wajah anak-anak yang bersemangat karena ruang kelas mereka kini lebih layak. Wajah orang tua yang merasa lebih percaya bahwa anak mereka akan mendapat pendidikan yang bermutu. Wajah-wajah inilah yang menjadi bukti bahwa arah Asta Cita Presiden bukan sekadar dokumen, tetapi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.

Ke depan, Kemendikdasmen memiliki tugas yang lebih besar:



memperluas dampak, memperdalam kualitas, dan memperkuat keberlanjutan. Pendidikan bermutu untuk semua bukan tujuan akhir, tetapi proses yang terus berkembang. Maka, kementerian harus terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi. Mereka harus terus mendengar suara-suara dari lapangan, merespons kebutuhan yang berubah, dan menjaga semangat kolaborasi.

Dalam konteks global, pendidikan juga menjadi alat diplomasi, pembangunan, dan perdamaian. Maka, Kemendikdasmen perlu memperkuat kerja sama internasional, belajar dari praktik baik negara lain, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia serius dalam membangun pendidikan yang inklusif, relevan, dan bermutu. Pendidikan Indonesia harus menjadi cermin dari semangat kebangsaan, keberagaman, dan kemanusiaan.

Akhirnya, satu tahun pertama Kemendikdasmen adalah awal dari perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak hanya mengubah sistem, tetapi

juga mengubah cara memandang pendidikan. Dari sesuatu yang administratif menjadi sesuatu yang personal. Dari sesuatu yang teknis menjadi sesuatu yang emosional. Dari sesuatu yang eksklusif menjadi sesuatu yang inklusif.

Dan dalam perjalanan itu, semua pihak adalah bagian. Guru, siswa, orang tua, pembuat kebijakan, aktivis, dan masyarakat umum memiliki peran untuk memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi hak, bukan privilese. Bahwa pendidikan benar-benar menjadi alat pembebasan, bukan pengekangan. Bahwa pendidikan benar-benar menjadi jalan menuju cita-cita bangsa.

Satu tahun Kemendikdasmen bukan hanya tentang kementerian, tetapi tentang harapan yang tumbuh, tentang perubahan yang dimulai, dan tentang masa depan yang sedang dibentuk. Maka, semangat ini perlu dijaga, kolaborasi perlu diperkuat, dan langkah menuju pendidikan bermutu untuk semua harus terus dilanjutkan.



Prinsipnya, satu tahun ini
adalah landasan kami untuk
bekerja lebih baik lagi,
modal kami untuk
memberikan yang terbaik
bagi masyarakat,
memperbaiki yang kurang,
dan **menyempurnakan**
yang sudah berjalan.

Mendikdasmen
Abdul Mu'ti



KERJA NYATA MENDIKDASMEN HADIRKAN LAYANAN PENDIDIKAN MERATA, INKLUSIF DAN BERMUTU BAGI SELURUH ANAK INDONESIA

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berjalan. Kerja-kerja nyata dalam menjalankan amanat rakyat berlahan dan dan pasti tertunaikan satu persatu. Kekurangan pasti ada, namun kekurangan tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kedepan semakin lebih baik.

Kerja nyata tersebut pun dijawab oleh kepuasan masyarakat yang cukup besar. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Index Politica yang dirilis pada Oktober 2025 mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet Merah Putih (KMP) sebesar 83,5 persen.

Sama halnya kerja nyata yang telah dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti; selama satu tahun kepemimpinannya mengurus pendidikan di Indonesia mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari masyarakat. Hal tersebut dapat terbaca dari hasil survei nasional yang dilakukan oleh lembaga riset Independen IndoStrategis yang menempatkan Mendikdasmen, Abdul Mu'ti sebagai menteri yang berkinerja tertinggi di Kabinet Merah Putih.

Seperti yang dijelaskan oleh Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, capaian skor tertinggi kinerja menteri kabinet itu didasari atas capaian program prioritas di masing-masing kementerian.

“Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skor 3,35,” katanya di Jakarta, Jumat 17 Oktober 2025.

Komitmen Majukan Pendidikan

Hasil survei nasional yang dilakukan oleh IndoStrategis sejalan dengan kerja nyata yang dilakukan oleh Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. Selama satu tahun kepemimpinannya dia kerja keras dan berkomitmen untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia sepanjang periode Oktober 2024 hingga oktober 2025.

Anggaran sebesar Rp181 triliun telah disalurkan dengan baik untuk enam program prioritas. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen kuat meningkatkan kualitas pendidikan. Langkah ini untuk menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045.

Adapun program prioritas tersebut adalah;

1. Revitalisasi satuan pendidikan dari PAUD sampai SMA/SMK dan SLB dengan anggaran Rp16,97 triliun yang telah berhasil melampaui target. Dari target 10.440 dapat dialokasikan untuk 15.523 satuan pendidikan.
2. Digitalisasi pendidikan, sesuai Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, Untuk memfasilitasi akses pembelajaran digital bagi lebih dari 285.000 sekolah pada jenjang PAUD hingga SKB.

3. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan alokasi anggaran Rp13,2 triliun, yakni ; 1). Tunjangan Profesi bagi guru non-ASN @Rp2 juta untuk untuk lebih dari 785 ribu guru. 2). Bantuan subsidi upah (BSU) @ Rp300 ribu bagi 253 ribu guru PAUD nonformal non-ASN. 3). Fasilitas pengembangan karir S1/D4 menjangkau 16.197 guru dan sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 804 ribu. 4). Insentif guru non-ASN @Rp300 ribu per bulan, mulai Juni 2025 diberikan selama 7 bulan. Jadi setiap guru dapat Rp2,1 juta yang disalurkan mulai Agustus-September 2025.
4. Program Indonesia Pintar (PIP) mentarget 18,5 juta siswa dengan pagu anggaran Rp13,5 triliun dan beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang menargetkan 4.679 siswa dengan pagu anggaran Rp127 miliar.
5. Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik telah menyalurkan Rp59,3 triliun untuk 50.463.212 peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan.
6. Tunjangan bagi guru ASN melalui Dana

Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dengan anggaran Rp70 triliun telah dialokasikan untuk 1) Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1.522.722 guru; 2) Dana Tambahan Penghasilan (DTP) untuk 332.170 guru; dan 3) Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk 62.536 guru.

7. kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi :bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.

Melihat program-program prioritas yang telah dijalankan oleh Kemendikdasmen menjadi harapan yang besar bahwa pendidikan di Indonesia akan jauh lebih baik. Pemerintah telah memberikan perhatian yang besar demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Mengutip perkataan Ki Hajar Dewantara, “Sebuah bangsa yang maju adalah bangsa yang memuliakan pendidikan”.

Perkataan ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Jika ingin menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju adalah bagaimana kemampuan pemerintah itu sendiri memuliakan pendidikan di Indonesia.

Kami bersyukur di pemerintahan Presiden Prabowo, upaya memuliakan pendidikan dijalankan dengan baik melalui kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh Kementerian



Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Abdul Mu'ti.

Program Prioritas Berdampak dan Memberikan Manfaat

Pemerintah mendorong pemanfaatan Papan Interaktif Digital atau Interactive Flat Panel (IFP) guna menciptakan pembelajaran yang lebih atraktif, inklusif, dan bermakna bagi siswa. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pemerataan fasilitas pembelajaran digital dan peningkatan mutu sarana pendidikan berjalan sesuai sasaran.

Dan manfaat itu dirasakan oleh sekolah-sekolah di daerah, misalnya di SMP Negeri 2 Majalengka, Jawa Barat.

Hal ini diungkapkan oleh guru Ade bahwa pemanfaatan IFP telah memberikan dampak

nyata terhadap kualitas pembelajaran. Dia mengatakan bahwa metode ajar dengan menggunakan pendekatan audio-visual interaktif dan evaluasi melalui platform digital Wayground Quizizz membuat siswa lebih aktif, fokus, dan mudah teridentifikasi capaian belajarnya.

“Siswa antusias dan tidak cepat bosan. Media ini juga digunakan di berbagai mata pelajaran, termasuk matematika. Harapannya, SMPN 2 dapat menerima 10 unit sesuai data dapodik,” ujarnya pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Pemerintah terus berupaya mempercepat revitalisasi fasilitas pendidikan di berbagai daerah sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat intruksi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan layak bagi seluruh peserta didik.

Dan program revitalisasi sekolah juga dirasakan oleh SMP IT Al Ittihad Sumberjaya, Majalengka.

Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SMP IT Al Ittihad, Aziz Wildan bahwa perkembangan revitalisasi satuan pendidikan di sekolahnya telah mencapai sekitar 40 persen sejak dimulai pada 21 September dan ditargetkan rampung pada 15 Desember.

“Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala berarti. Revitalisasi mencakup penataan lantai dua untuk perpustakaan serta UKS. Setelah ini juga akan ada bimbingan teknis lanjutan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 16 Makassar. Pihaknya merasa bersyukur atas perhatian yang diberikan pemerintah, serta memastikan pembangunan berjalan dengan baik.

“Alhamdulillah, kami bersyukur mendapat kunjungan yang luar biasa dari Bapak Menteri dan Komisi X. Ini menjadi penyemangat bagi kami semua di sekolah. Kami juga berharap nantinya bisa mendapat tambahan dukungan, seperti laptop untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi,” katanya saat bertemu Mendikdasmen di Makassar pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

Dan dia pun mengatakan bahwa revitalisasi fasilitas SMP Negeri 16 Makassar menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun pendidikan yang aman, nyaman, dan inklusif sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR, dan satuan pendidikan dalam menghadirkan mutu

pendidikan terbaik bagi seluruh peserta didik Indonesia.

Tidak hanya itu, program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru juga sangat dirasakan manfaatnya.

Dengan adanya tunjangan profesi, guru merasa sangat terbantu karena memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi, rasa dihargai, dan motivasi untuk meningkatkan kompetensi.

Sehingga ini akan berdampak positif pada kualitas pendidikan karena guru yang sejahtera dan termotivasi dapat lebih fokus pada peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan diri.

Selain itu dengan tunjangan profesi guru ini juga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Sebab Guru yang lebih profesional dan inovatif akan lebih mampu mengelola proses pembelajaran, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Satu tahun telah berjalan, Kemendikdasmen dibawah komando Abdul Mu'ti telah membawa arah pendidikan yang jauh lebih baik. Program-program prioritas telah memberikan dampak dan manfaatnya sangat dirasakan oleh murid dan guru. Kerja nyata ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

Oleh : Amir Fiqi,

*Penulis adalah Guru di SMA Muhammadiyah 4
Kota Tengerang, Banten*

KETIKA REVITALISASI SEKOLAH MENJADI MESIN PERTUMBUHAN EKONOMI

Setiap kali pemerintah menggulirkan program revitalisasi sekolah, perhatian publik kerap terfokus pada wujud fisiknya: perbaikan atap bocor, pengecatan dinding kusam, atau penambahan ruang kelas. Padahal, di balik itu semua tersimpan potensi besar yang jarang disadari: penggerak roda ekonomi daerah.

Revitalisasi sekolah sejatinya bukan hanya menciptakan ruang belajar yang lebih nyaman, melainkan juga menjadi pemicu aktivitas ekonomi lokal. Mulai dari serapan tenaga kerja di bidang konstruksi, partisipasi usaha kecil dalam penyediaan material bangunan, hingga dampak jangka panjang berupa peningkatan kualitas lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan global. Dengan kata lain, setiap bata yang dipasang dan setiap atap yang diganti, sesungguhnya sedang menanam bibit produktivitas ekonomi masa depan.

Peta Revitalisasi Sekolah 2025

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan, pada tahun 2025 terdapat lebih dari 20 ribu sekolah yang masuk daftar prioritas rehabilitasi. Sekitar 12 ribu di antaranya merupakan sekolah dasar, 5 ribu sekolah menengah pertama, dan sisanya sekolah menengah atas/kejuruan. Lokasi paling banyak berada di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang justru paling membutuhkan dukungan infrastruktur pendidikan.

Jika diasumsikan biaya revitalisasi satu sekolah rata-rata Rp1 miliar, maka perputaran dana yang terjadi untuk 20 ribu sekolah mencapai Rp20 triliun. Anggaran

sebesar ini tidak hilang di udara, melainkan langsung menggerakkan perekonomian lokal: toko material bangunan, bengkel kayu, jasa las, transportasi lokal, bahkan usaha kuliner yang melayani para pekerja proyek.

Efek Berganda bagi Ekonomi Daerah

Program revitalisasi sekolah memiliki multiplier effect yang signifikan. Pertama, ia menyerap tenaga kerja lokal. Tukang, buruh harian, dan pekerja konstruksi memperoleh lapangan pekerjaan baru. Kedua, perputaran pasar bahan bangunan ikut meningkat—semen, batu bata, pasir, kayu, dan cat dibutuhkan dalam jumlah besar, yang sebagian besar tersedia di pasar lokal.

Tidak berhenti di situ, usaha kecil menengah (UKM) sekitar lokasi proyek juga ikut merasakan manfaat. Warung makan di dekat sekolah, penyedia jasa transportasi, hingga percetakan lokal yang membuat papan proyek turut mendapatkan tambahan pemasukan. Uang yang beredar dari proyek ini tidak hanya berhenti di satu tangan, melainkan mengalir ke banyak sektor dalam masyarakat.

Pendidikan sebagai Investasi Produktif

Namun, manfaat terbesar dari revitalisasi sekolah justru ada pada jangka panjang. Ruang belajar yang lebih sehat dan aman mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Siswa tidak lagi belajar di kelas yang bocor, lantai rapuh, atau fasilitas sanitasi buruk. Hal ini menurunkan angka ketidakhadiran, meningkatkan konsentrasi belajar, dan mendorong capaian akademik.

Generasi yang tumbuh dalam lingkungan sekolah



layak akan menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan mampu menciptakan inovasi. Dengan demikian, revitalisasi sekolah sesungguhnya adalah investasi pada kualitas manusia—fondasi utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dampak Lokal yang Nyata

Di banyak wilayah, terutama yang jauh dari pusat ekonomi, revitalisasi sekolah sering kali menjadi proyek pembangunan terbesar yang melibatkan masyarakat setempat. Ketika sebuah sekolah desa diperbaiki, dampaknya terasa langsung: penduduk desa memperoleh pekerjaan, toko bangunan meningkat penjualannya, dan orang tua lebih percaya diri menyekolahkan anak di wilayah mereka sendiri.

Dalam jangka panjang, hal ini mendorong retention of talent, di mana anak-anak daerah dapat berkembang tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Dengan begitu, rehabilitasi sekolah turut memperkuat pembangunan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

Revitaliasasi Sekolah sebagai Stimulus Ekonomi

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah memerlukan strategi yang mampu menjaga stabilitas pertumbuhan domestik. Belanja publik pada sektor pendidikan menjadi salah satu jawabannya. Revitalisasi sekolah termasuk investasi padat karya yang menghasilkan manfaat ganda: efek langsung berupa serapan tenaga kerja serta konsumsi lokal, sekaligus manfaat jangka panjang berupa peningkatan kualitas pendidikan.

Inilah yang menjadikan revitalisasi sekolah sebagai stimulus ekonomi yang produktif. Hasilnya tidak hanya berupa bangunan fisik, melainkan generasi emas Indonesia 2045.

Potensi besar ini tidak lepas dari sejumlah hambatan. Pertama, aspek akuntabilitas—pengawasan yang lemah berisiko menurunkan kualitas hasil. Kedua, birokrasi dan keterlambatan anggaran sering kali membuat proyek molor dari target. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal masih sering terbatas, padahal pelibatan koperasi, BUMDes, atau UMKM setempat akan membuat manfaat program ini lebih luas.

Revitalisasi Sekolah sebagai Agenda Strategis

Oleh karena itu, revitalisasi sekolah perlu dipandang sebagai agenda strategis, bukan sekadar rutinitas tahunan. Pemerintah daerah bisa menjadikannya instrumen penggerak ekonomi lokal, misalnya dengan melibatkan UMKM sebagai pemasok material atau penyedia jasa. Dengan demikian, belanja negara benar-benar menghidupkan ekonomi rakyat.

Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha

Kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha juga penting. Skema kemitraan publik-swasta (PPP) maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan sekolah, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan pola ini, keberlanjutan program lebih terjamin dan dampaknya semakin meluas.

Menuju Indonesia Emas 2045

Seluruh upaya revitalisasi sekolah pada akhirnya bertujuan mencetak generasi unggul. Infrastruktur pendidikan yang kuat akan melahirkan lulusan yang cerdas, berdaya saing, dan mampu bersaing di tingkat global.

Dengan demikian, revitaliasasi sekolah tidak boleh dipandang sebatas proyek pembangunan fisik. Ia adalah motor pertumbuhan ekonomi yang bekerja dalam dua lapis: jangka pendek melalui perputaran ekonomi lokal, serta jangka panjang melalui peningkatan kualitas manusia. Pada titik inilah, revitalisasi sekolah menjelma sebagai investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh: Edi Setiawan,

Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA

MIMPI YANG KEMBALI PUPUS:

KEGAGALAN INDONESIA MENUJU PIALA DUNIA 2026



Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, dini hari 12 Oktober 2025. Zidane Iqbal, gelandang muda Irak, melepaskan sepakan mendatar dari luar kotak penalti yang menembus gawang Ernando Ari. Gol itu bukan hanya mengakhiri pertandingan,

tetapi juga mengubur harapan jutaan rakyat Indonesia untuk melihat tim nasional mereka tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia: Piala Dunia 2026.

“Ini sangat menyakitkan. Kami sudah berjuang, tapi hasilnya tidak berpihak,” ujar Patrick Kluivert,

pelatih kepala Timnas Indonesia, dalam konferensi pers pasca pertandingan. Wajahnya tegang, matanya menatap kosong ke arah meja, seolah masih mencari jawaban atas kegagalan yang telah diprediksi banyak pihak namun tetap menyisakan luka mendalam.



Indra Sjafri

Kekalahan 0-1 dari Irak, menyusul kekalahan 2-3 dari Arab Saudi beberapa hari sebelumnya, memastikan Indonesia menjadi juru kunci Grup B di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dua kekalahan beruntun, minim kreativitas di lini tengah, dan rapuhnya koordinasi pertahanan menjadi sorotan tajam dari para pengamat dan pecinta sepak bola tanah air.

“Strategi yang diterapkan Kluivert tidak efektif. Pemain seperti Marselino dan Sananta tidak diberi peran optimal. Kita seperti kehilangan arah,” kata mantan pelatih Timnas U-19, Indra Sjafri, dalam wawancara eksklusif dengan Bola.net.

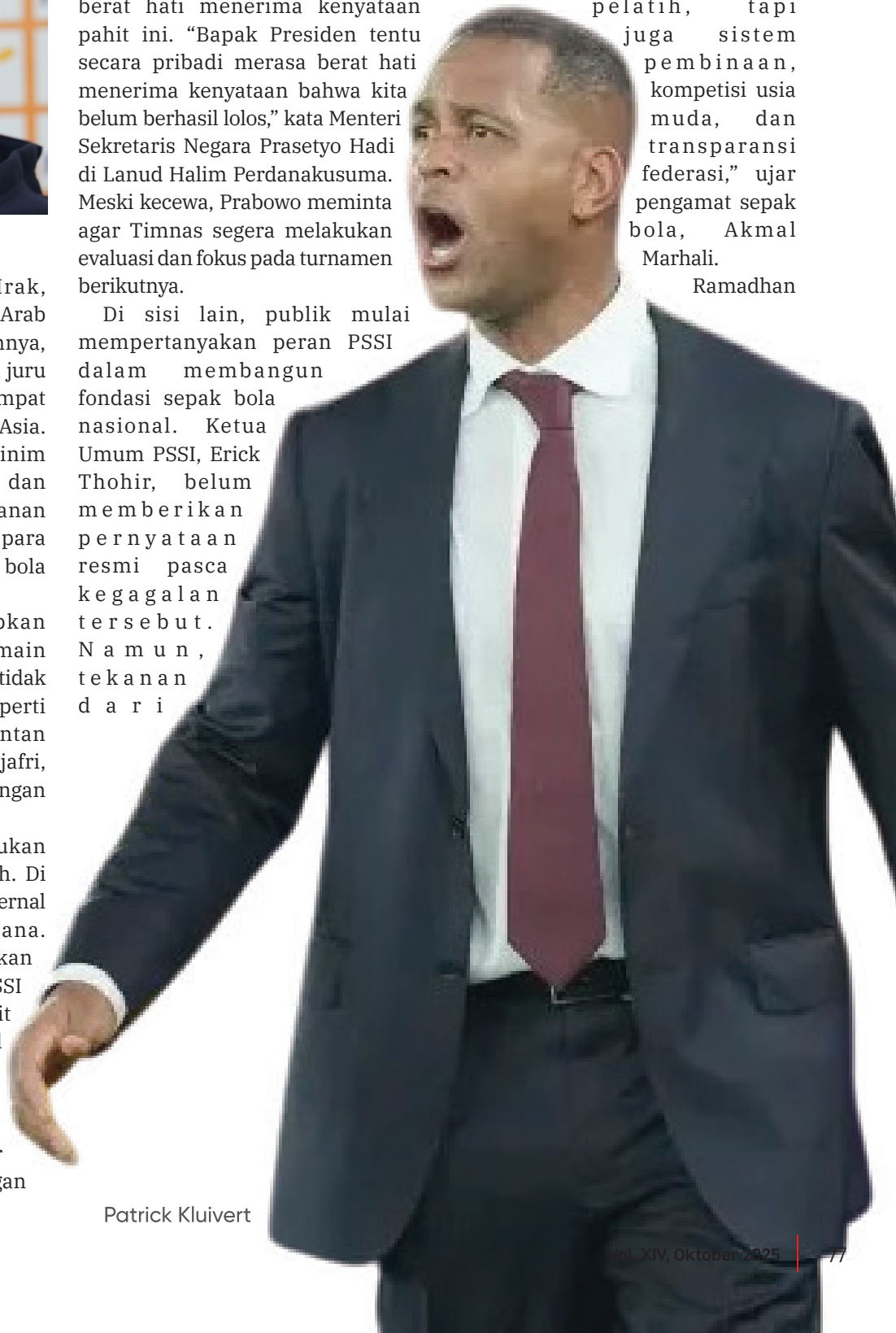
Namun, kegagalan ini bukan semata tanggung jawab pelatih. Di balik layar, intrik dan kisruh internal turut memperkeruh suasana. Beberapa sumber menyebutkan adanya ketegangan antara PSSI dan staf pelatih asing terkait pemilihan pemain dan jadwal latihan. “Ada ego yang tidak bisa dikompromikan. Beberapa keputusan teknis diambil tanpa diskusi yang cukup,” ujar seorang staf pelatih yang enggan disebutkan namanya.

Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal sebagai pendukung setia Timnas, disebut merasa berat hati menerima kenyataan pahit ini. “Bapak Presiden tentu secara pribadi merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma. Meski kecewa, Prabowo meminta agar Timnas segera melakukan evaluasi dan fokus pada turnamen berikutnya.

Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan peran PSSI dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum memberikan pernyataan resmi pasca kegagalan tersebut. Namun, tekanan dari

masyarakat dan media semakin meningkat. “Kita butuh reformasi total. Jangan hanya bicara soal pelatih, tapi juga sistem pembinaan, kompetisi usia muda, dan transparansi federasi,” ujar pengamat sepak bola, Akmal Marhali.

Ramadhan



Patrick Kluivert

Sananta, yang menjadi top scorer Timnas selama kualifikasi, menyampaikan rasa kecewanya melalui media sosial. “Terima kasih untuk semua dukungan. Kami minta maaf belum bisa memberikan yang terbaik. Kami akan bangkit,” tulisnya di akun Instagram pribadinya.

Kegagalan ini juga memunculkan pertanyaan besar: siapa yang bertanggung jawab? Apakah pelatih yang gagal meracik strategi? Apakah federasi yang tidak menyediakan dukungan maksimal? Ataukah sistem sepak bola nasional yang belum siap bersaing di level dunia?

Dua Malam yang Mengubah Segalanya

Kamis, 9 Oktober 2025, Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Timnas Indonesia memulai laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi. Harapan membunyah. Di atas kertas, skuad Garuda tampil dengan formasi menyerang 4-3-3, menurunkan trio lini depan Ramadhan Sananta, Rafael Struick, dan Marselino Ferdinan. Namun,



Erick Thohir

sejak menit awal, tekanan dari The Green Falcons tak terbendung.

Indonesia sempat unggul 1-0 lewat gol cepat Marselino di menit ke-7, hasil dari umpan terobosan Thom Hays. Namun, Arab Saudi membalas dengan dua gol dalam 10 menit melalui Salem Al-Dawsari dan Feras Albukhari. Skor sempatimbang 2-2 setelah Jay Idzes mencetak gol sundulan dari sepak pojok, tapi di menit ke-88, kesalahan koordinasi lini belakang membuat Indonesia kebobolan lagi. Skor akhir: 2-3.

“Ini bukan soal taktik semata. Kami kehilangan fokus di momen-momen krusial,” ujar Patrick Kluivert, pelatih



Prasetyo Hadi

kepala Timnas Indonesia, dalam konferensi pers usai laga. Ia tampak frustrasi, namun tetap percaya diri menghadapi laga berikutnya.

Dua hari kemudian, Minggu dini hari, Indonesia menghadapi Irak. Pertandingan berlangsung sengit. Indonesia tampil lebih defensif, dengan formasi 4-2-3-1. Thom Hays dicadangkan, dan Nathan Tjoe-A-On dipasang sebagai gelandang bertahan. Namun, strategi ini justru membuat lini tengah Indonesia kehilangan kreativitas. Gol tunggal Zidane Iqbal di menit ke-72 menjadi penentu. Indonesia kalah 0-1 dan resmi tersingkir dari jalur kualifikasi.



Statistik yang Menelanjangi Realitas

Sepanjang dua laga di putaran keempat, Indonesia mencatatkan 3 gol dan kebobolan 4 kali. Penguasaan bola rata-rata hanya 42%, dengan akurasi umpan 78%. Ramadhan Sananta menjadi top scorer dengan 1 gol, sementara Marselino dan Jay Idzes masing-masing menyumbang satu. Namun, lini tengah Indonesia gagal menciptakan cukup peluang. Hanya 5 tembakan tepat sasaran dari total 18 percobaan.

“Lini tengah kita terlalu pasif. Tidak ada transisi yang cepat. Kita



seperti kehilangan koneksi antara pertahanan dan serangan,” ujar analis sepak bola, Akmal Marhali, dalam wawancara dengan Bola.com.

Intrik dan Ketegangan di Balik Layar

Kegagalan ini memunculkan pertanyaan besar tentang dinamika internal PSSI dan staf pelatih. Sebelum putaran keempat dimulai, PSSI memecat Shin Tae-yong secara kontroversial. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyebut lima alasan utama: kegagalan di Piala AFF, konflik internal, dan perbedaan visi jangka panjang. Publik bereaksi keras. Tagar #STYOut dan #KluivertOut bersaing di media sosial.

“Pemecatan Shin terlalu tergesa-gesa. Ia membangun fondasi yang kuat. Kluivert datang tanpa cukup waktu untuk adaptasi,” ujar mantan

pemain nasional, Bima Sakti.

Di internal tim, beberapa sumber menyebut adanya ketegangan antara pelatih asing dan staf lokal. Pemilihan pemain, rotasi, dan jadwal latihan menjadi titik gesekan. “Ada ego yang tidak bisa dikompromikan. Beberapa keputusan teknis diambil tanpa diskusi yang cukup,” ujar seorang staf pelatih yang enggan disebutkan namanya.

Permintaan Maaf dan Evaluasi Nasional

Setelah kekalahan dari Irak, Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kami mohon maaf atas hasil ini. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh,” katanya di Bandara Halim Perdanakusuma. Prabowo, yang dikenal sebagai pendukung setia Timnas, disebut

kecewa namun tetap mendukung penuh pembinaan jangka panjang. “Bapak Presiden tentu secara pribadi merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Kegagalan ini bukan akhir, tetapi titik balik. Indonesia harus membenahi sistem pembinaan usia muda, kompetisi lokal, dan manajemen federasi. “Kita tidak bisa hanya menyalahkan pelatih. Ini soal sistem. Kita butuh reformasi total,” tegas Akmal Marhali.

Timnas Indonesia akan fokus pada Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Erick Thohir menyebut bahwa pembinaan jangka panjang akan menjadi prioritas. “Kami akan membangun dari akar. Dari akademi, dari kompetisi usia muda, dari pelatih lokal,” ujarnya dalam wawancara eksklusif.

RANGGA DAN CINTA (2025):

REINKARNASI ROMANSA, RELEVANSI BARU



Film *Rangga dan Cinta* yang tayang perdana pada Oktober 2025 bukan sekadar kelanjutan dari warisan sinema romantis Indonesia, melainkan sebuah reimaginasi yang berani dan penuh warna. Disutradarai oleh Riri Riza dan diproduksi oleh Mira Lesmana bersama Nicholas Saputra, film ini membawa penonton kembali ke Jakarta tahun 2001, namun dengan pendekatan yang jauh lebih musikal, ekspresif, dan kontemporer. Dalam wawancara di Busan International Film Festival, Riri menyatakan bahwa proyek ini bukan remake, melainkan rebirth. “Kami ingin menghadirkan kembali semangat cinta dan pencarian jati diri, tapi dengan cara yang lebih ekspresif dan musikal,” ujarnya.

Film ini dibintangi oleh dua aktor muda yang melakukan debut layar lebar mereka: El Putra Sarira sebagai Rangga dan Leva Princy sebagai Cinta. Keduanya berhasil menghidupkan karakter ikonik dengan interpretasi baru yang lebih gelisah, puitis, dan berani. El Putra mengatakan bahwa ia tidak ingin meniru Rangga versi Nicholas Saputra, melainkan menciptakan Rangga yang lebih muda dan lebih kompleks. Leva Princy, yang memerankan Cinta, menyampaikan bahwa ia merasa terhubung secara emosional dengan karakter yang ia mainkan. “Cinta itu bukan hanya romantis, dia juga berani dan punya suara. Saya ingin menunjukkan itu,” katanya dalam sesi bincang-bincang bersama Miles Films.

Sinopsis film ini berpusat pada pertemuan dua remaja yang sama-sama terjebak dalam pencarian makna hidup dan cinta. Cinta, seorang siswi SMA yang aktif di komunitas sastra sekolah, sedang mempersiapkan perlombaan puisi nasional. Rangga, siswa pindahan yang pendiam dan misterius, tiba-tiba muncul sebagai kompetitor yang tak terduga. Awalnya, hubungan mereka dipenuhi ketegangan dan persaingan. Namun, seiring waktu, keduanya mulai saling membuka diri, berbagi luka masa lalu, dan menemukan bahwa cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga keberanian untuk mengenal diri sendiri. Film ini mengusung konsep “from enemies to lovers” dengan nuansa musikal yang kuat, diiringi lagu-lagu ciptaan Melly Goeslaw dan Anto Hoed yang dinyanyikan oleh Eva Celia dan Bilal Indrajaaya. Lagu “Rangga Cinta” menjadi anthem emosional



yang mengikat narasi film secara mendalam.

Sinematografi oleh Vera Lestafa menghadirkan Jakarta tahun 2001 dengan nuansa hangat dan intim, sementara editing oleh Aline Jusria menjaga ritme naratif yang puitis namun tetap dinamis. Musik menjadi elemen penting dalam film ini, bukan hanya sebagai latar, tetapi sebagai bagian dari dialog dan ekspresi karakter. Lagu “Tentang Seseorang” yang dinyanyikan ulang oleh para pemeran menjadi momen klimaks emosional yang menyentuh dan mengundang nostalgia.

Sejak dirilisnya trailer resmi, publik langsung membanjiri media sosial dengan tagar #RanggaCinta dan #RebirthAADC. Trailer memperlihatkan adegan-adegan penuh intensitas emosional, dialog puitis, dan koreografi musikal yang memikat. “Kita semua hanya ingin mencintai. Nyanyikan lantang suara hatimu, ekspresikan harapanmu seperti Cinta,” tulis narasi dalam trailer final. Dalam 11 hari

penayangan, film ini telah ditonton lebih dari 500.000 penonton. Miles Films menyampaikan rasa haru dan syukur atas antusiasme tersebut. “Lebih dari lima ratus ribu penonton sudah ikut merayakan jatuh cinta dan bahagianya jadi remaja bareng film *Rangga & Cinta*!” tulis mereka dalam unggahan resmi.

Film *Rangga dan Cinta* bukan hanya sukses secara komersial, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang cinta, identitas, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Ia bukan sekadar nostalgia, tetapi refleksi tentang keberanian, tentang suara hati yang tak boleh dibungkam, dan tentang cinta yang tumbuh dari kejujuran. Riri Riza dan Mira Lesmana berhasil mengemas ulang warisan sinema Indonesia dengan cara yang segar dan bermakna. “Kami tidak ingin hanya membuat ulang AADC. Kami ingin menciptakan sesuatu yang baru, yang bisa bicara pada generasi sekarang,” ujar Mira Lesmana.



PESTAPORA 2025:

PANGGUNG MUSIK, PANGGUNG PROTES

Festival musik tahunan Pestapora kembali digelar pada 5–7 September 2025 di Gambir Expo dan Hall D2, Kemayoran, Jakarta. Dengan lebih dari 230 musisi lintas genre dan generasi, Pestapora 2025 semula dirancang sebagai perayaan

musik, kebebasan berekspresi, dan semangat kolektif. Namun, di tengah sorak-sorai penonton dan dentuman bass dari panggung utama, sebuah kontroversi meletus yang mengubah wajah festival ini secara drastis: keterlibatan PT Freeport Indonesia sebagai sponsor resmi.

Puluhan musisi memutuskan mundur dari festival musik Pestapora 2025 sebagai bentuk protes terhadap keterlibatan PT Freeport Indonesia sebagai salah satu sponsor utama acara. Keputusan ini memicu gelombang penarikan diri yang terjadi secara serentak, terutama pada hari kedua festival, dan menjadi sorotan publik serta media sosial. Di tengah euforia penonton dan dentuman musik dari panggung utama, muncul ketegangan yang tidak bisa diabaikan: pertanyaan tentang etika, keberpihakan, dan nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh sebuah festival musik independen.



Kiki Ucup

menyampaikan hal serupa: “Kami memutuskan untuk mundur dari Pestapora.” Hindia, .Feast, Rekah, Leipzig, Kelelawar Malam, dan belasan nama lain ikut menyatakan sikap yang sama.

Di balik layar, suasana menjadi tegang. Beberapa musisi yang sudah berada di lokasi memilih tidak naik panggung. Vincent dan Desta, yang turut tampil di festival, terlihat memeluk rekan-rekan musisi yang mundur sebagai bentuk solidaritas. “Kami tahu ini bukan keputusan mudah. Tapi kami menghormati sikap mereka,” ujar Vincent dalam sebuah video yang beredar luas di TikTok.

Direktur Festival Pestapora, Kiki Ucup, akhirnya angkat bicara. Dalam unggahan resmi di Instagram, ia menyampaikan bahwa pihak Pestapora telah memutuskan kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. “Per hari ini, Sabtu tanggal 6 September 2025, Pestapora telah memutuskan kerja sama dengan PT Freeport Indonesia,” tulis akun @pestapora. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mendengar aspirasi dari komunitas musik dan mempertimbangkan semangat kolektif yang menjadi fondasi festival ini. “Kami mendengar. Kami belajar. Kami bertanggung jawab,” ujar Kiki

dalam pernyataan lanjutan.

Meski kerja sama dengan Freeport telah dihentikan, dampaknya tetap terasa. Beberapa musisi tetap memilih tidak tampil, sementara sebagian lainnya kembali ke panggung dengan membawa pesan-pesan sosial dalam penampilan mereka. Di panggung utama, Kangen Band membawakan lagu Sheila on 7 sebagai bentuk solidaritas dan nostalgia, yang kemudian viral di media sosial. Penampilan mereka menjadi simbol bahwa musik tetap bisa menyatukan, bahkan di tengah perbedaan sikap dan pandangan.

Pestapora 2025 tetap berlangsung hingga hari ketiga, dengan penyesuaian lineup dan jadwal. Penonton tetap memadati area festival, meski suasana terasa berbeda. Di antara tawa dan nyanyian, ada percakapan serius tentang etika sponsorship, keberpihakan musisi, dan masa depan festival independen di Indonesia. “Kami datang bukan hanya untuk menonton musik, tapi juga untuk mendukung sikap,” ujar Raka, seorang penonton yang mengenakan kaos bertuliskan ‘Musik Bukan Tambang’.

Festival ini menjadi pelajaran penting bagi industri hiburan tanah air. Bahwa di era keterbukaan informasi dan kesadaran sosial yang tinggi, keputusan bisnis tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai komunitas. Pestapora 2025 bukan hanya panggung musik, tapi juga panggung protes, panggung refleksi, dan panggung keberanian. Ia menunjukkan bahwa di balik dentuman bass dan sorotan lampu, ada suara-suara yang tak bisa dibungkam. Dan bahwa musik, pada akhirnya, adalah tentang keberanian untuk bersikap.

Kisruh bermula ketika logo Freeport Indonesia muncul di sejumlah materi promosi dan booth sponsor. Banyak musisi yang selama ini dikenal vokal dalam isu lingkungan dan hak masyarakat adat merasa keberatan tampil di panggung yang didanai oleh perusahaan tambang yang kontroversial. Mereka menyampaikan keputusan mundur melalui media sosial masing-masing, sebagian dengan pernyataan singkat namun tegas. “Kami telah memutuskan untuk tidak tampil di Pestapora 2025. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih,” tulis Sukatani. The Jeblogs

Periode 1 Juni - 31 Desember 2025

Pindah Payroll ke BNI Dapatkan Berbagai Benefit

Reward Cashback hingga
Rp500 Ribu

Special Rate
Fasilitas Pinjaman

Bonus hingga
100 Kupon Undian
rejeki **wondr** BNI

Cash Reward **1%**
untuk Perusahaan



Dapatkan
kesempatan mengikuti
rejeki **wondr** BNI

Informasi Selengkapnya
bni.id/payroll